



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NO.17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022**



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 355 ayat (1), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 disusun dengan maksud dijadikan sebagai:
 - a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi perangkat daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022;

- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Juli 2022
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang,
pada tanggal 27 Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd

MOCH. TRANGGONO

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BIRO HUKUM



WIL PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang daerah dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Provinsi Banten berkewajiban melaksanakan perencanaan pembangunan untuk mencapai target kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan. Perencanaan Tahun 2022 telah disusun pada Tahun anggaran 2021 dan menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan Triwulan kedua Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Banten memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2022.

Sebagaimana Penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 tidak mengalami perubahan tema pembangunan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022 yaitu **“Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”** dan tidak mengalami perubahan pada

prioritas karena dianggap masih relevan dengan kondisi saat ini adapun prioritas pembangunan dalam RKPD 2022 meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
2. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan hasil Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD/APBD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada, sebagaimana dalam Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Dalam rangka penyesuaian tersebut perlu dilakukan Perubahan RKPD sehingga seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro berimplikasi pada stuktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2022 yang nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2022 yang akan akan disepakati bersama

antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2022 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447);

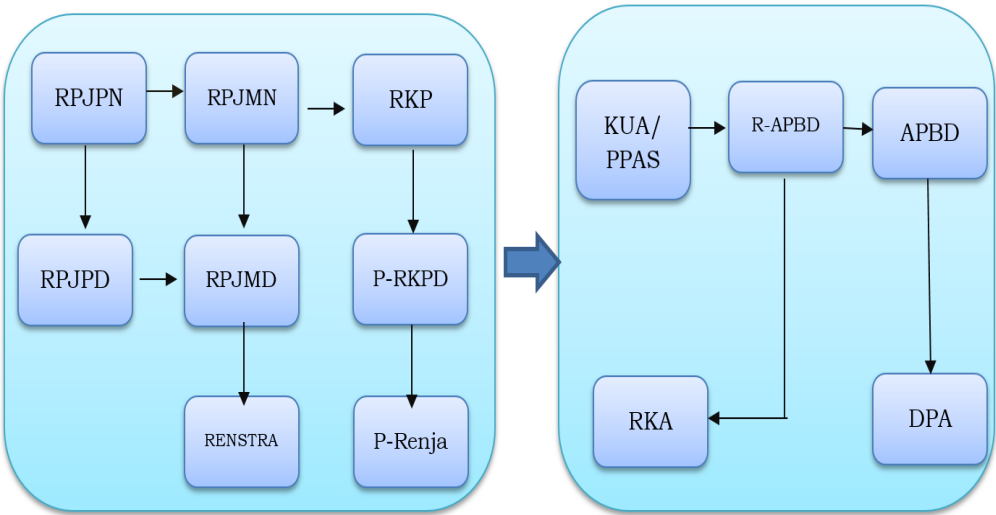
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);

- 20. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
- 21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2021 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Perubahan, yang terdiri dari RKPD Perubahan, KUA-PPAS Perubahan, dan rencana kerja anggaran RKA Perubahan Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 akan menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten.



Gambar 1-1
Hubungan Antar Dokumen

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2022 sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2022, sebagai berikut:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi kebijakan umum APBD 2022 juga mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah pada 2022 dimana rencana pendapatan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
4. Melakukan perubahan kebijakan belanja terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, meliputi:

- a. Penyesuaian target kinerja pembangunan daerah Tahun 2022;
- b. Adanya pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran pada Perangkat Daerah;
- c. Adanya kewajiban pembayaran pada pihak ketiga;
- d. Adanya Reklasifikasi belanja pada Perangkat Daerah;
- e. Penambahan dukungan pada Recovery Ekonomi dan Sosial karena adanya Pandemi Covid-19.

1.6 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

2. BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2021 sampai dengan triwulan II Tahun 2022.

3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2022.

4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas pembangunan daerah.

5. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisi rencana program prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 termasuk di dalamnya adalah kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran Tahun 2022.

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 di Provinsi Banten.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2022

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, lingkup pengendalian dan evaluasi pembangunan meliputi; 1) pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 2) pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan 3) evaluasi terhadap hasil pembangunan daerah. Bagian ini merupakan evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun berkenaan yang meliputi capaian evaluasi Indikator Makro Pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.1 Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Banten

Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022. Penyusunan tema pembangunan Provinsi Banten dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, secara teknokratis dilakukan dengan mempertimbangkan RPJPD dan RPJMD Provinsi Banten. Secara hierarki dan keterkaitan antar dokumen, tema pembangunan RPJMD 2017-2022 mempertimbangkan tema indikatif yang dirumuskan dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Tema RKPD Provinsi Banten tahun 2022 adalah “Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia” dengan prioritas: 1).Pertumbuhan Ekonomi Inklusif 2).Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan 3).Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 4).Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun apabila menelaah kondisi kinerja Pemda, sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022, terdapat 22 indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Pemda Provinsi Banten. Berdasarkan analisis capaian yang dilakukan, belum cukup tersedia data untuk memberikan kesimpulan tercapai atau tidaknya sasaran strategis yang dimaksud, namun demikian berdasarkan data

sementara yang diperoleh dan refleksi kondisi maupun capaian di tahun sebelumnya.

Dalam evaluasi pencapaian Indikator Makro Pembangunan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 mengacu pada hasil evaluasi pencapaian IKU Triwulan IV Tahun 2021. Hal ini disebabkan sifat data IKU merupakan data tahunan sehingga belum seluruh data capaian tersedia pada triwulan II Tahun 2022. Data capaian IKU diperkirakan akan mulai tersedia pada Triwulan III tahun 2022 yang bersumber dari data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lainnya.

Capaian Indikator Makro Pembangunan dan IKU RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2. 1
Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target RKPD	Realisasi Triwulan II	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,60-73,68	72,72	Realisasi Tahun 2021
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,0-5,6	4,97	--
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,7-9,2	8,53	--
4	Peresentase Penduduk Miskin	Persen	4,99-5,40	6,50	Realisasi Tahun 2021
5	Indeks Gini	poin	0,365	0,363	Realisasi Tahun 2021
6	Tingkat Inflasi	persen	3,4-4,0	1,04	--

Sumber: Laporan Dalev RKPD Provinsi Banten Triwulan II Tahun 2022, BPS Provinsi Banten

Selanjutnya secara rinci capaian sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan akhir Triwulan II/2022 disampaikan sebagai berikut.

Tabel 2. 2
Capaian IKU Daerah Tahun 2022 (sd TW II)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian s.d. TW II Th. 2022*)
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,4	3,45
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	B
		Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	A	BB
2	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah	Capaian kinerja infrastruktur daerah	persen	100	98,33
	Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	Persen	85	86,8
3	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,21	72,75
		Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Poin	0,365	0,363
		Kemiskinan	Persen	5,06	6,16
		Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,03	8,98
	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	14,5	13,02
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,1	8,93
		Daya beli	persen	100	
	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	100	63,79
	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92,51	91,67*
4	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,66	70,02
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Poin	290	100,39

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022	Capaian s.d. TW II Th. 2022*)
		Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Poin	28	4,8
5	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5-5.06	4,97
		Tingkat Inflasi	Persen	4	1,91
	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persen	6	8
	Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	2,9	..**
	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Peringkat	5	5
	Terwujudnya Pembangunan rendah karbon	Emisi Rumah Kaca	Persen	100	81,9

Sumber: Hasil Olahan Bappeda
Keterangan: *) Data Capaian Tahun 2022

Uraian pencapaian dari masing-masing IKU Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana tersebut di atas, diinformasikan sebagai berikut:

2.1.1 Tujuan Pertama: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Penyelenggaraan manajemen pembangunan pemerintahan yang sejalan dengan prinsip efektif, efisien, mencegah korupsi politik maupun administratif, dan menghindari kesalahan kinerja dan alokasi anggaran, menjadi salah satu hal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten, dalam rangka perwujudan kepuasan pada pelayanan publik. Dalam rangka itu terdapat beberapa tolok ukur untuk tujuan pertama meliputi, Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Capaian SAKIP Perangkat Daerah, dimana pada capaian 2021 Indeks Reformasi Birokrasi dan Capaian SAKIP masih belum mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Tujuan Pertama Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022
			Target	Realisasi s/d Tw II	Realisasi		
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,45	3,5	3,45	98%	3,5	98%
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B (63,11)	A (80)	B	78,8%	A	78,8%
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	BB (70,04)	A (80)	BB	87,5	A	87,5

Sumber: Hasil Olahan Bappeda

Pertama pada capaian nilai IKM tercatat sebesar 3,45 pada tahun 2021 angka tersebut menunjukkan bahwa IKM kita pada kategori Sangat Baik. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kepuasan masyarakat pada pelayanan Provinsi Banten sudah sangat baik. Dengan target di tahun 2022 sebesar 3,5, maka pemerintah Provinsi Banten optimis nilai IKM akan mencapai target sesuai amanat RPJMD.

Kedua, capaian Nilai Reformasi Birokrasi Banten sebesar 63,11 kategori B (baik) pada tahun 2021, menunjukkan tingkat capaian Reformasi Birokrasi yang mengalami kemajuan dibanding awal tahun 2018 yang saat itu masih pada kategori C, indikator ini memang diperlukan kerja keras oleh seluruh ASN karena Pemerintah Provinsi Banten menargetkan nilai A (sangat baik) pada tahun terakhir RPJMD di tahun 2022. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam pencapaian Reformasi Birokrasi adalah masih belum optimalnya peningkatan nilai pada komponen Hasil (Merit system, Indeks Profesionalitas ASN, Nilai SPBE, Indeks pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan public, nilai APIP, Nilai SPIP, Nilai Kualitas pengelolaan arsip) dan masih belum

sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil Evaluasi RB dari Kemenpan RB.

Ketiga, capaian SAKIP Perangkat Daerah ini masih menunjukkan nilai 70,04 atau kategori BB ditahun 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan upaya Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan nilai SAKIP yang dievaluasi secara internal oleh inspektorat. Capaian SAKIP yang masih belum memenuhi target RPJMD yaitu nilai A pada tahun 2022, dikarenakan beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya efektivitas dan efisiensi dibandingkan capaian kinerjanya, hal ini karena masih belum optimalnya pembangunan budaya kinerja organisasi dan penyelenggaraan pemerintah berorientasi hasil masih belum berjalan dengan baik. Diperlukan pendampingan intens dari Inspektorat, Bappeda dan Biro Organisasi dalam mencapai nilai SAKIP Perangkat Daerah yang bisa memenuhi target akhir RPJMD 2022 dan juga kerja keras seluruh Perangkat Daerah untuk bisa memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan terukur.

2.1.2 Tujuan Kedua: Meningkatnya Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang, Orang Dan Jasa Yang Berorientasi Pada Peningkatan Pembangunan Wilayah Dan Perekonomian Daerah

Peningkatan pembangunan wilayah dan perkonomian daerah harus ditopang dengan infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur menjadi perhatian khusus dalam pembangunan daerah di Provinsi Banten, dengan infrastruktur yang memadai akan berdampak pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah. Tolok ukur untuk melihat peningkatan infrastruktur tersebut adalah dengan melihat persentase pembangunan dan penanganan infrastruktur dimana pada tahun 2021 telah mencapai 86,80 persen.

Tabel 2. 4
Capaian Kinerja Tujuan Kedua Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022
			Target RKPD Murni	Realisasi S/d Tw II	Realisasi		
Capaian kinerja infrastruktur daerah	persen	98,33	100	98,33	98,33	100	98,33
Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	Persen	86,80	100	86,80	86,80	100	86,80

Sumber: hasil olahan Bappeda

Capaian pembangunan dan penanganan infrastruktur tersebut di atas meliputi: pembangunan jalan dan jembatan, sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air, perumahan dan permukiman, sarana transportasi dan penyediaan listrik desa.

2.1.3 Tujuan Ketiga: Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing

Peningkatan Sumber daya manusia merupakan hal penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan sehat, dan sejahtera. Beberapa hal yang menjadi indikator pada tujuan ketiga ini secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 5
Capaian Kinerja Tujuan Ketiga Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022
			Target RKPD Murni	Realisasi S/d Tw II	Realisasi		
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,75	72,60-73,68	72,75	96	73.00	96
Index Gini Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	/ Poin	0,363	0,370	0,363	101	0.360	100
Kemiskinan	Persen	6,50	4,99 – 5,4	6,16	87	5.0	87
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,98	9,7-9,2	8,53	98	7,84	98
Harapan lama sekolah	Tahun	13,02	15	13,02	86,8	15	86,8
Rata rata lama sekolah	Tahun	8,93	9.3	8,93	96	9.3	96
Daya beli	persen	-					
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	63,79	100	63,79	63,79	100	63,79
Indeks pembangunan gender (IPG)	Poin	91,67*	92.79	91,83	98	92.79	98

Sumber: hasil olahan Bappeda

Pencapaian indikator pada tujuan ketiga ditunjukkan oleh ketercapaian 9 (sembilan) indikator kinerja daerah yakni Indeks Pembangunan Manusia, Indek Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Daya Beli dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Kesatu capaian IPM tercatat sebesar 72,72 yang menunjukkan trend kenaikan setiap tahunnya.

Kedua, Indeks gini yang mencapai 0,363 di tahun 2021 ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya yaitu 0,365. Ketiga Angka Kemiskinan tercatat sebesar 6,16 menunjukkan trend penurunan sebesar 0,34% dibanding tahun September 20021, penurunan ini diakibatkan dari mulai pulihnya kegiatan/aktivitas masyarakat sejaka adanya pandemic covid yang sudah terjadi 2 tahun terakhir, sebenarnya angka kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan trend menurun, di tahun 2019 angka kemiskinan tercatat 5,09 hingga di tahun 2021 melonjak di angka 6,5.

Keempat, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka pada Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten turun menjadi 8,53% persen pada Februari 2022 dari 8,98% pada tahun sebelumnya tahun 2022 TPT ditargetkan sebesar 7,84%. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Februari 2022 memperlihatkan Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 5,91 juta orang, turun 340,76 ribu orang dibanding Februari 2021.

Hal ini menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,64, kondisi ini dimaknai selain memag TPT di Provinsi Banten menunjukkan masalah daerah yang paling krusial namun dampak covid-19 ikut mempengaruhi signifikan terkait naiknya angka pengangguran. Kelima, Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat mencapai 13,02 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 14,05 tahun pada tahun 2021. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada umur tertentu di masa mendatang terus menunjukkan peningkatan. Keenam, capaian RLS tercatat mencapai 8,93 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 9,1 tahun pada tahun 2021.

Kondisi ini dapat dimaknai bahwa jumlah tahun dalam menjalani pendidikan formal terus meningkat dari tahun ke tahun, namun masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2021. Ketujuh, daya beli menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat masih cukup tinggi. Kedelapan, capaian TPAK tercatat sebesar 63,79 dimana menunjukkan partisipasi Angkatan kerja dibandingkan dengan Jumlah penduduk pada usia kerja. Kesembilan, capaian IPG tercatat sebesar 91,83 poin pada tahun 2021 dan target akhir adalah 92,79. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa komitmen untuk melaksanakan strategi pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) terus menunjukkan perkembangan yang positif.

2.1.4 Tujuan Keempat: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akses Dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan sebagai wujud penguatan pelayanan publik pada Urusan kesehatan ditandai dengan indikator yang bisa menggambarkan kondisi tersebut, beberapa indikator antara lain:

Tabel 2. 6
Capaian Kinerja Tujuan Keempat Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 terhadap target akhir RPJMD 2022
			Target RKPD Murni	Realisasi s/d Tw II	Realisasi		
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,02	70.96	70,02	98,6	70.96	98,6
Angka Kematian Ibu (Per 100,000 kelahiran hidup)	Poin	100,39	285	100,39	283	285	283
Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Poin	4,8	26	4,8	541	26	541

Sumber: Hasil Olahan Bappeda

Untuk mengukur peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan salah satu indikator pada bidang kesehatan yang merupakan komponen Indeks pembangunan Manusia adalah Angka Harapan Hidup atau Umur Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup Banten pada Tahun 2021, mencapai 70, 02 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2021 mempunyai

harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun 2 bulan. Sepanjang periode Tahun 2017-2021, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 0, 23 tahun. Meski demikian masih ditemukan kasus kematian ibu dan bayi apabila dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih relatif tinggi.

2.1.5 Tujuan Kelima: Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal

Peningkatan perekonomian masyarakat Banten dengan berfokus pada Pengembangan ekonomi lokal menjadi perhatian bagi tujuan kelima, dimana melalui indikator ini diharapkan menjamin peningkatan ekonomi secara inklusif. Adapun beberapa indikator dirinci sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Capaian Kinerja Tujuan Kelima Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD 2022
			Target RKPD Murni	Realisasi S/d Tw II	Realisasi		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,44	5,0-5,6	4,97	88	7	88
Tingkat Inflasi	Persen	1,91	4	1,91	209	4	209
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persen	8,00	6,00	8,00	133	6,00	133
Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	-	2,90	-		2,90	
Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Peringkat	5,00	5,00	5,00	100	5,00	100
Emisi Rumah Kaca	Persen	81,90	100	81,90	81,9	100	81,9

Sumber: Hasil Olahan Bappeda

Pencapaian pada tujuan kelima, ditunjukkan oleh (6 enam) indikator yaitu LPE, Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan, Indeks Keuangan Inklusif, Peringkat Daya Saing Provinsi, Emisi Rumah Kaca. Kesatu Laju Pertumbuhan Ekonomi tercatat berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen.

Lapangan usaha yang tumbuh sangat tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,98 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,09 persen, dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,66 persen. Kedua Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan tercatat 8,06, sektor unggulan Provinsi Banten terdiri dari LPE sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian dan pariwisata.

Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya tercatat -3,38 maka telah terjadi perbaikan signifikan dalam pertumbuhan LPE sektor unggulan di Provinsi Banten. Ketiga, Indeks keuangan Inklusif tercatat 84,29 pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak ada rilis lanjutan setelahnya.

Keempat, Peringkat Daya Saing tercatat berada di peringkat 5 (lima) besar, dengan tahun 2021 di peringkat 6 (enam) besar, pemerintah Provinsi Banten optimis akan mencapai target pada tahun 2022 dengan target yaitu peringkat 5 (lima). Melihat hal tersebut menunjukkan semakin baiknya peringkat daya saing Provinsi Banten dimana tiap tahun telah mencapai target sesuai yang diharapkan. Keenam, emisi rumah kaca merupakan target yang ada setelah RPJMD Perubahan dimana pada tahun 2021 persentase penurunan Emisi gas Rumah kaca tercatat sebesar 81,9 persen.

2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

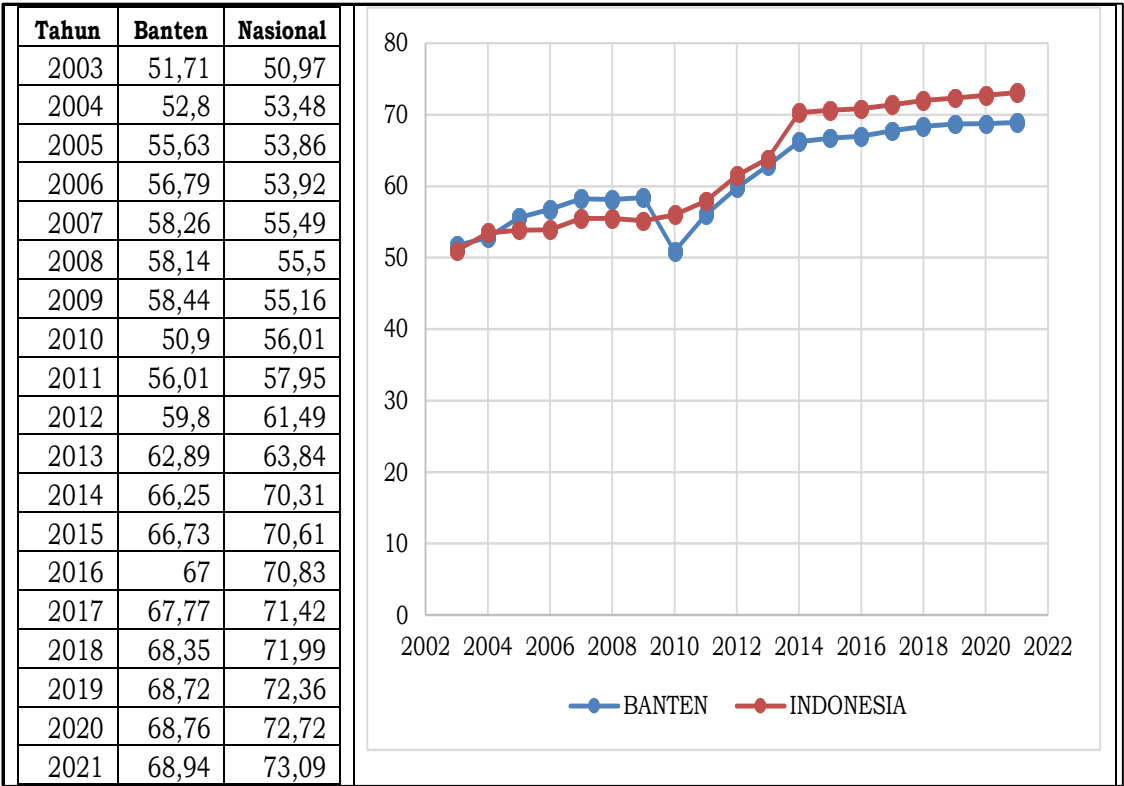
2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan wajib dasar yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh daerah. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan Wajib Dasar ini meliputi bidang urusan: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

a. Bidang Urusan Pendidikan

Kualitas SDM yang baik dapat diwujudkan salah satunya melalui pembangunan pendidikan. Pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata menjadi target pelaksanaan pembangunan pendidikan di Banten dan sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's). Beberapa upaya dilakukan untuk mendukung pencapaian pembangunan pendidikan.

Pencapaian Indikator kinerja penyelenggaraan pendidikan tergambar pada angka partisipasi sekolah (APS). Berdasarkan tabel dan gambar di bawah, terlihat bahwa realisasi APS di Provinsi Banten sering berada di bawah rata-rata realiasi nasional. Bahkan mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 terlihat bahwa nilai APS Provinsi Banten konsisten di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, realisasi APS Provinsi Banten sebesar 68,94 pada tahun 2021 menduduki peringkat kelima terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan nilai APS tahun 2021, Provinsi Banten hanya lebih baik dibandingkan Provinsi Papua, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan Bangka Belitung.



Gambar 2. 1
Perbandingan APS Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2003-2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Sementara itu gambaran mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Selama periode 2018 hingga 2021, Banten telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/SMK/MA sebesar 75,66 meningkat sebesar 2,31 dari tahun sebelumnya dan Angka partisipasi murni SMA/MA sebesar 59,69 poin meningkat 0,63 poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 8

Indikator Kinerja Urusan Pendidikan APK Tahun 2018-2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)			
		2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	109,5	107,93	107,24	106,91
2	SMP/MTs	91,71	91,61	92,76	94.88
3	SMA/SMK/MA	71,7	72,92	73,35	75,66

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel 2. 9

Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	97,56	97,97	97,98	97,95	98,15
2	SMP/MTs	80,59	80,91	81,93	82,73	84,28
3	SMA/SMK/MA	57,88	58,72	58,8	59,06	59,69

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan, menggambarkan indikator-indikator keberhasilan SPM pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Banten serta Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang hasilnya dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan SPM dalam Sektor Pendidikan selama Tahun Anggaran 2021.

Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi pendidikan menengan dan pendidikan khusus, berikut capaian SPM untuk bidang pendidikan.

Tabel 2. 10
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pendidikan Menengah Atas Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	138.205	138.205	100	129.081	129.081	100
2	Pendidikan Menengah Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	89.765	89.765	100	84.393	84.393	100
3	Pendidikan Khusus Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	1.198	1.198	100	1.282	1.282	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, telah berupaya maksimal menerapkan standar mutu pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Permendikbud No. 32 Tahun 2018 dan berdasarkan data capaian dapat tercapai dengan relatif baik, tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi diantaranya yaitu terkait mutu pendidikan yang harus lebih ditingkatkan agar mutu dan relevansi pendidikan di Provinsi Banten dapat bersaing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten.

Berdasarkan data capaian SPM, terdapat 2 (dua) standar yang perlu diperhatikan yaitu standar sarana dan prasarana serta Pendidik dan Tenaga Pendidikan (PTK) yang data capaiannya masih di bawah beberapa indikator standar yang lain.

b. Bidang Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator pada Urusan Kesehatan. Pemerintah Provinsi Banten terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan cakupan akses kesehatan bagi masyarakat Banten. Capaian pada indikator

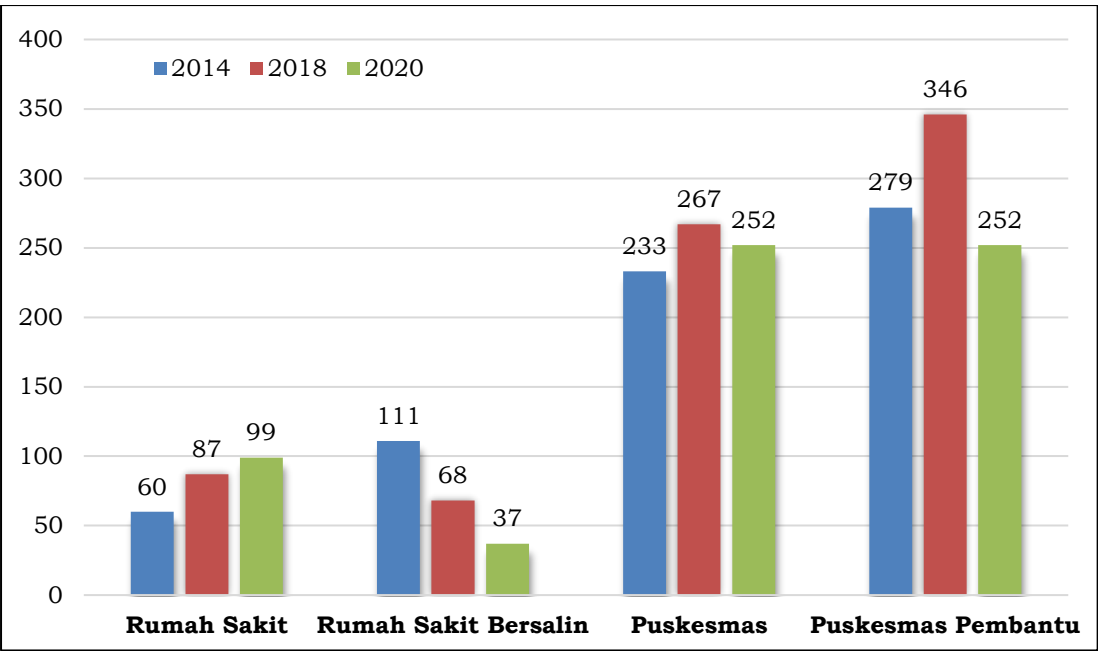
menunjukkan capaian urusan kesehatan menunjukkan ketercapaian target kinerja yang tinggi terutama pada penurunan jumlah kematian ibu yang tercatat dari 242 kematian ibu menurun menjadi 198, dan penurunan kematian bayi juga mengalami penurunan dari 1.670 menjadi 1.157 kematian bayi.

Capaian indikator urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten tergambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 11					
Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2021					
NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (orang)	257	222	242	198
2	Penurunan Jumlah Kematian Bayi (orang)	1158	1299	1670	1157
3	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (%)	100	100	100	100
4	BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>) RSUD Banten	121,67	112,75	100,66	101,87
5	BOR (<i>Bed Occupancy Ratio</i>) RSUD Malingping	122,15	127,75	108,40	101,26

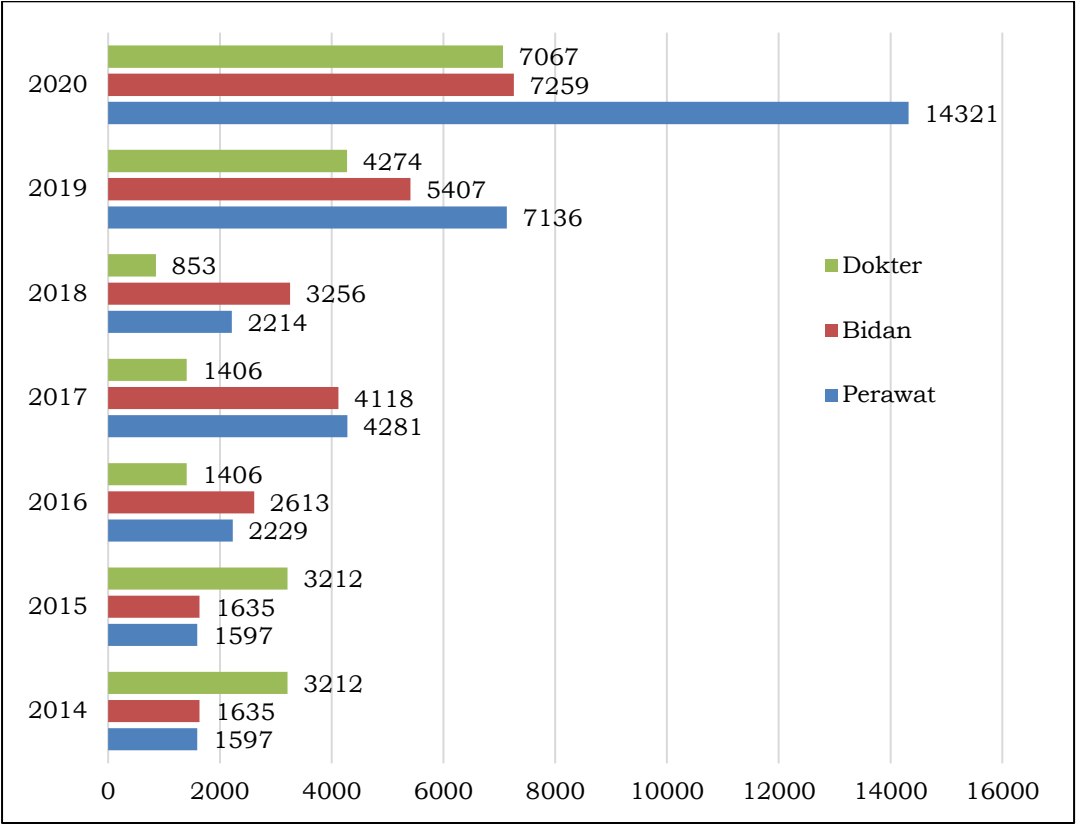
Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Selanjutnya pada fasilitas sarana kesehatan tercatat data terakhir yaitu rumah sakit sebanyak 99 unit, rumah sakit bersalin 37 unit, puskesmas 252 unit, puskesmas pembantu 252 unit dan di tahun mendatang diharapkan ketersediaan infrastruktur kesehatan semakin meningkat.



Gambar 2. 2
Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020 (Unit)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten semakin menunjukkan jumlah yang meningkat apalagi dengan terbangunnya jumlah Rumah Sakit, peningkatan terbanyak adalah tenaga kesehatan perawat yang menunjukkan penambahan lebih dari 100 persen.



Gambar 2. 1
Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2014-2020 (Jiwa)
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021)

Selanjutnya, berkaitan dengan stunting, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesi (SSGI) tahun 2021, telah terjadi penurunan prevalensi stunting secara nasional dari 27,67 persen pada tahun 2019 (SSGBI 2019) menjadi 24,4 persen tahun 2021 (SSGI 2021) atau turun sekitar 3,27 persen. Prevelensi *Stunting* di Provinsi Banten berada di atas nasional yakni 24.5 persen atau naik 1,1 persen dari tahun 2019 sebesar 23,4 persen (SSGBI 2019). Beberapa Kabupaten/Kota menunjukan kenaikan Prevalensi Stunting yaitu Kabupaten Pandeglang naik sebesar 4,8 persen, Kabupaten Tangerang naik sebesar 6,5 persen, dan Kota Tangerang Selatan naik sebesar 5,5 persen. Adapun kabupaten/kota lainnya berhasil menurunkan angka *stunting* dimana penurunan terbanyak adalah Kabupaten Serang.

Tabel 2. 12
Prevalensi *Stunting* Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2021
1	Kabupaten Pandeglang	39,47	33,00	37,80
2	Kabupaten Lebak	40,19	33,10	27,30
3	Kabupaten Tangerang	23,23	16,80	23,30
4	Kabupaten Serang	32,04	38,60	27,20
5	Kota Tangerang	19,07	16,40	15,30
6	Kota Cilegon	23,32	28,20	20,60
7	Kota Serang	24,62	28,20	23,40
8	Kota Tangerang Selatan	19,85	14,40	19,90
PROVINSI BANTEN		26,58	23,40	24,50
INDONESIA		30,80	27,67	24,40

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Anak bebas gizi buruk merupakan komitmen bersama yang tertuang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's), dimana pentingnya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan gizi serta pertanian yang berkelanjutan. Balita dengan gizi buruk mempunyai dampak jangka pendek dan panjang berupa gangguan tumbuh kembang termasuk kognitif/*stunting*, kesakitan, risiko penyakit degeneratif di kemudian hari.

Jenis pelayanan dasar SPM bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

- a. Pelayanan dasar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.

Tabel 2. 13
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A	Presentase Pelayanan Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Presentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Potensi Bencana Provinsi	418.873	418.873	100%	115.464	115.464	100%
B	Presentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prsentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	19.086	19.086	100%	61.613	61.613	100%

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan antara lain:

- Kurangnya sosialisasi, masih belum jelasnya konsep pelayanan dasar;
- Penetapan target SPM yang terlalu tinggi;
- Tidak adanya sistem insentif dan disinsentif; dan
- Keterbatasan anggaran daerah dan minimnya kualitas SDM.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan peninjauan kembali konsep layanan dasar, peningkatan sosialisasi, peninjauan target capaian SPM, serta pemberlakuan *reward* dan *punishment*, pengalokasian anggaran harus menjadi skala prioritas serta peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki.

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa indikator, seperti Tingkat Kemantapan Jalan, Kondisi Baik Jaringan Irigasi, Cakupan Pelayanan Air Minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar, yang perlu diperhatikan adalah layanan irigasi yang dipergunakan untuk pengairan sawah juga mengalami kenaikan luas layanan dari sebelumnya 16.051,13 Ha saat ini 16.411,00 Ha namun dalam 30 tahun terakhir masih belum ada penambahan luasan irigasi. Untuk penyediaan air baku juga mengalami penurunan, jika kita lihat sebelumnya bisa 100 persen namun saat ini hanya 85 persen, untuk lebih rinci digambarkan pada table di bawah ini.

Tabel 2. 14
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	91,4	98,15	94,44	98,00
2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	-	-	91,10	93,60
3	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi (%)	20,84	26,89	27,20	27,28
4	Luasan Layanan Irigasi (Ha)	15.312,06	15.826.06	16.051,13	16.411
5	Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku (%)	-	-	100	85,49
6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	88,5	88,7	96,43	90
7	Persentase Tersusunnya Perda rencana Tata Ruang 8 kawasan strategis Provinsi (%)	-	-	20	20
8	Persentase kesesuaian pembinaan Pemanfaatan ruang	-	-	100	90

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Urusan Penataan Ruang di Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030. Proses Rencana Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Banten yang mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini masih dalam tahap paripurna dan belum disahkan, sehingga masih menunggu dokumen untuk segera disahkan.

Pada tahun 2021, dari 762,03 km Jalan Provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 598,44 km dalam kondisi baik (78,53 persen), kemudian 120,99 km dalam kondisi sedang (15,88 persen), 15,83 km dalam kondisi rusak ringan (2,08 persen) dan 26,27 km dalam kondisi rusak berat (3,51 persen). Hal ini menunjukkan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,6 persen. Sedangkan persentase jalan provinsi yang memenuhi standar teknis pada tahun 2021 mengalami kenaikan 3,21 persen. Sementara itu, persentase jalan dan jembatan provinsi yang memenuhi standar teknis (minimal perkerasan 7 m) mengalami kenaikan sebesar 17,12 persen.

Tabel 2. 15
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan Tahun 2013-2021 (Km)

KONDISI JALAN	PANJANG JALAN PROVINSI MENURUT KONDISI JALAN								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baik	229,65	384,79	384,79	432,13	432,13	549,41	598,44	598,44	614,41
Sedang	380,21	194,32	194,32	170,69	170,69	147,13	120,99	120,99	132,42
Rusak	174,39	60,31	60,31	75,58	75,58	43,19	15,83	15,83	6,14
Rusak Berat	68,64	213,47	213,47	83,62	83,62	22,30	26,77	26,77	9,06
JUMLAH	852,89	852,89	852,89	762,03	762,03	762,03	762,03	762,03	762,03

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realisasi yang dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2020-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 16
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	JUMLAH ABSOLUT	CAPAIAN (%)	TARGET	JUMLAH ABSOLUT	CAPAIAN (%)
1	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	800 l/dtk	100,00	100%	400 l/dtk	100,00
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota						
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%	2000 jiwa	0%	100%	2000 jiwa	100%

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

- Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota dialokasikan untuk wilayah layanan pembangunan WTP Sindang Heula (800 lt/detik) yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon;
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas Kabupaten/Kota, melalui pembangunan IPAL komunal.

c. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Banten menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator luasan kawasan kumuh yang diperbaiki dan penanganan rumah layak huni yang diperbaiki. Dimana terjadi peningkatan kawasan kumuh yang ditangani, meningkat signifikan dari 71,4 Ha menjadi 292 Ha. Hal lain adalah persentase rumah layak huni yang realisasinya semakin menurun dari 86,34 persen menjadi 70,71persen yang perlu perhatian serius.

Tabel 2. 17
Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
1	Luasan Kawasan Kumuh yang Ditangani (Ha)	58,22	101,16	71,4	292,04
2	Persentase Rumah Layak Huni (%)	97,01	93,13	86,34	70,71
3	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (%)	36	39	75	88
4	Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah (%)	0	0	5	10

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak menjadi salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari- hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah karena belum 100 persen terakses sumber air minum layak. Tercatat, dari tahun 2018 sampai tahun 2021 terjadi kenaikan persentase rumah tangga dengan air minum layak dan sanitasi layak setiap tahunnya. Secara rata-rata pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak baru mencapai 66,11 persen dan terus meningkat setiap tahunnya, dan pada akhir tahun 2021 sudah mencapai 93,51 persen.

Tabel 2. 18
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2017-2021 (Persen)

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Pandeglang	39,50	41,93	45,96	75,83	82,01
2	Kab. Lebak	35,58	44,09	37,97	73,49	73,72
3	Kab. Tangerang	73,20	80,95	80,26	98,48	97,97
4	Kab. Serang	59,20	65,73	68,34	89,95	92,33
5	Kota Tangerang	78,93	88,64	89,60	98,37	98,00
6	Kota Cilegon	80,85	83,23	88,85	94,98	98,72
7	Kota Serang	70,92	71,97	80,96	99,10	98,38
8	Kota Tangerang Selatan	77,46	81,85	78,33	99,08	99,22
PROVINSI BANTEN		66,11	72,83	73,17	92,87	93,51

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Untuk sumber air minum yang tersedia sebagian besar diperoleh dari air dalam kemasan lalu pompa, dimana setiap tahun pemanfaatan air dalam kemasan makin meningkat sebesar 3,71 persen dan penggunaan pompa semakin menurun sebesar 3,59 persen. Terlihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2. 19
Persentase Sumber Air Minum di Provinsi Banten Tahun 2018-2021
(Persen)

NO	JENIS SUMBER AIR MINUM	2018	2019	2020	2021
1	Leding	3,46	3,11	2,93	2,08
2	Pompa	26,09	26,87	30,16	26,57
3	Air dalam Kemasan	52,81	53,03	52,43	56,14
4	Sumur terlindung	8,20	7,65	6,15	6,38
5	Sumur Tak terlindung	3,59	3,31	2,66	1,77
6	Mata Air Terlindung	2,69	2,36	2,53	3,92
7	Mata Air Tidak Terlindung	2,49	2,81	2,11	2,17
8	Air Permukaan	0,40	0,70	0,57	0,57
9	Air Hujan	0,09	0,16	0,22	0,22
10	Lainnya	0,18	0,00	0,24	0,17
JUMLAH		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Kebutuhan rumah bagi penduduk dari waktu ke waktu bertambah sesuai dengan peningkatan jumlah KK, karena rumah merupakan kebutuhan pokok penduduk disamping kebutuhan pangan dan sandang. Derajat kesehatan penghuni rumah dapat ditentukan dari tingkat kualitas rumah. Rumah yang sehat dan baik maka akan dapat memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan sekaligus membentuk rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan rumah layak huni harus dipenuhi dengan beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain seperti luas lantai, jenis atap rumah, dinding dan atap yang digunakan, serta kelengkapan lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum dan fasilitas air minum, serta fasilitas sanitasi.

Tabel 2. 20
Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kondisi di Banten
Tahun 2018-2021 (Unit)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun (Satuan : Unit)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pandeglang	-	-	140,50	989.328
2	Kabupaten Lebak	293.902,00	293.902,00	296.776,00	1.078.946
3	Kabupaten Tangerang	1.922,00	-	835.328,00	2.958.251
4	Kabupaten Serang	-	-	147.090,00	1.468.840
5	Kota Tangerang	-	-	-	1.618.244
6	Kota Cilegon	91.046,00	91.046,00	91.046,00	392.195
7	Kota Serang	110.592,00	-	167.731,00	615.853
8	Kota Tangerang Selatan	328.037,00	327.902,00	328.114,00	1.161.039
Banten		825.499	712.850	1.866.225,5	10.282.696

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah rumah layak huni di Banten tahun 2021 meningkat dengan pesat dari 2020 sebesar 550,99 persen, dengan jumlah rumah layak huni terbanyak berada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 21
Jumlah Rumah Layak Tidak Huni Berdasarkan Kondisi di Banten
Tahun 2018-2021 (Unit)

NO	KABUPATEN / KOTA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Pandeglang	7.226,00	60.434,00	16.776,00	298.985
2	Kabupaten Lebak	47.701,00	45.927,00	42.888,00	328.910
3	Kabupaten Tangerang	19.387,00	11.469,00	19.992,00	335.281
4	Kabupaten Serang	3.336,00	-	3.336,00	178.949
5	Kota Tangerang	2.177,00	-	2.177,00	293.669
6	Kota Cilegon	524,00	524,00	545,00	49.565
7	Kota Serang	9.511,00	-	2.862,00	88.764
8	Kota Tangerang Selatan	2.736,00	17.248,00	2.869,00	204.648
PROVINSI BANTEN		92.598,00	135.602,00	91.445,00	1.778.771,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Jumlah rumah layak tidak huni di Banten tahun 2021 meningkat dengan pesat dari 2020, dengan jumlah rumah layak huni terbanyak berada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2. 22
Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Tahun 2018-2021 (unit)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	2	2	2	2
Kabupaten Lebak	38	38	38	38
Kabupaten Tangerang	35	35	35	35
Kabupaten Serang	172	172	178	172
Kota Tangerang	-	-	35	339
Kota Cilegon	204	204	204	204
Kota Serang	158	158	158	158
Kota Tangerang Selatan	51	51	51	51
PROVINSI BANTEN	660	660	701	999

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS) di Banten cenderung fluktuatif, mengalami penurunan jumlah pada tahun 2020, lalu meningkat kembali pada tahun 2021.

Tabel 2. 23
Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Tahun 2018-2021 (unit)

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Pandeglang	-	-	-	-
Kabupaten Lebak	2,00	2,00	-	-
Kabupaten Tangerang	30,00	30,00	30,00	-
Kabupaten Serang	-	-	3,00	-
Kota Tangerang	-	-	-	-
Kota Cilegon	7,00	7,00	7,00	-
Kota Serang	12,00	12,00	12,00	-
Kota Tangerang Selatan	1,00	1,00	1,00	16
PROVINSI BANTEN	52	52	51	16

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Banten pada tahun 2021 hanya ada di Kota Tangerang Selatan sejumlah 16 unit, sedangkan untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sejumlah 13 unit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Realisasi yang dapat dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2020-2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	483	68.41%	100 %	66	25.78%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak	100 %	0	0,00	100 %	0	0,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melaksanakan program pengembangan perumahan, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi, dengan sub kegiatan yang mendukung SPM ini adalah:

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dengan target 116 unit;
- Pembangunan rumah bagi korban bencana, dengan target 140 unit.

Namun target tidak tercapai dikarenakan:

- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak mencapai target, dikarenakan keterbatasan SDM dalam pemasangan struktur teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA);
- Pembangunan rumah bagi korban tidak dapat dilaksanakan, karena adanya kendala dalam proses perjanjian kerjasama pelaksanaan;
- Penanganan rumah bagi korban bencana terkendala kesiapan lahan relokasi oleh Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi pada Tahun 2021 tidak terlaksana karena terkendala *refocussing*. Selanjutnya tahun 2022 akan dilaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi relokasi korban program Pemerintah Daerah Provinsi.

d. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbib dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari indikator, rasio penegakan peraturan perundang-undangan daerah dengan realisasi 100 persen.

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Dari tahun 2015 hingga tahun 2020, terjadi penurunan kasus tidak pidana sebanyak 7.741 kasus, namun penyelesaian tindak pidana di Provinsi Banten juga mengalami penurunan. Setiap tahunnya, jumlah tindak pidana lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian tindak pidana. Hal ini menjadi cerminan untuk meningkatkan penegakkan hukum di Provinsi Banten.

Tabel 2. 25
Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Banten
Tahun 2017-2021 (Kasus)

NO	ITEM	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tindak Pidana	2.413	2.442	2.581	2.631	3.719
2	Penyelesaian Tindak Pidana	1.621	1.511	1.601	1.904	3.463

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

SPM Urusan Ketenteraan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarkat Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- Sub Urusan Kebakaran; dan
- Sub Urusan Bencana Daerah.

Sementara itu untuk jenis pelayanan dasar bagi Pemerintah Provinsi yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi, berikut hasil capaian terhadap SPM Trantibumlinmas.

Tabel 2. 26
Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarkat Tahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1	1	100	4	4	100
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	15	15	100	15	12	80
3	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	-	-	-	0	0	0

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

e. Bidang Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Penanganan PMKS, Provinsi Banten sejak Tahun 2016 terus meningkat untuk jumlah PMKS, tercatat pada tahun 2021 terdapat 201.538 orang. Walaupun terdapat penurunan PMKS dari tahun 2018 ke tahun 2019, tetapi karena Pandemi COVID-19 Tahun 2020 jumlah PMKS meningkat, dengan anggaran yang ada cakupan penanganannya hanya 2,68

persen, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah untuk menekan pertumbuhan dan mengurangi jumlah PMKS di Provinsi Banten.

Tabel 2. 27
Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2018-2021

INDIKATOR	PENANGANAN PMKS			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	4,8	6,46	6,41	2,68

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Jenis pelayanan dasar bidang sosial meliputi: (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti, (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti, (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. Terkait 5 (lima) hal tersebut berikut capaian SPM bidang sosial.

Tabel 2. 28
Capaian SPM Bidang SosialTahun 2020-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR/INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	20	20	100	30	30	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti	15	15	100	20	20	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti	60	60	100	60	60	100
4	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	10	10	100	40	25	62,50
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korbanbencana provinsi	1.300	Bencana banjir bandang: 4.195	100	1.300	1.630	125,38

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi; dan
- Pemerintah Provinsi Banten baru memiliki 2 (dua) UPTD yang melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yakni UPTD Perlindungan Sosial dan UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial.

Tindak lanjut antara lain:

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah, panti sosial milik masyarakat yang menangani PMKS terlantar;
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif panti sosial milik masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan permasalahan sosial; dan
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar menjadi bagian dalam urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan namun tidak termasuk pelayanan dasar di masyarakat. Lebih lanjut yang menjadi bagian dalam Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar ini meliputi 18 bidang urusan:

- Tenaga Kerja;
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pangan;
- Pertanahan;
- Lingkungan Hidup;
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Pengendalian Penduduk dan KB;
- Perhubungan;

- Komunikasi Informatika;
- Koperasi;
- Penanaman Modal;
- Kepemudaan dan olahraga;
- Statistik;
- Persandian;
- Kebudayaan;
- Perpustakaan; dan
- Kearsipan.

a. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pada urusan tenaga kerja merupakan hal yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Selama periode tahun 2018-2021 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan ini hasilnya sangat fluktuatif, terlihat dari capaian Tahun 2021 yang menurun dibandingkan dari tahun 2020, digambarkan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2021 (Nilai)				
INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	60,27	60,39	64,9	52,84

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Selain itu terlihat bahwa penduduk bekerja menurut Pendidikan yang paling besar adalah penduduk berpendidikan SD, dimana ini mangalami fluktuasi, tahun 2020 tercatat 1.863.695 orang atau 30,49 persen dan di tahun 2021 sebesar 1.850.000 atau tercatat 32,40 persen, rincian seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 30 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tahun 2018-2021 (Jiwa)					
NO	KABUPATEN/KOTA	BEKERJA			
		2018	2019	2020	2021
1	SD Ke Bawah	1.897.372	1.845.005	1.863.695	1.850.000
2	SMP	925.425	1.016.856	1.008.633	999.000
3	SMA/SMK	1.735.174	1.916.651	1.930.268	1.270.000
4	Universitas	774.525	784.334	744.576	789.000
TOTAL		5.332.496	5.562.846	4.877.172	4.908.000

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

b. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah 91,67, angka ini meningkat menjadi 91,83 pada tahun 2021.

Tabel 2. 31
Capaian Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019-2021 (Nilai)

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN		
		2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	86.68	86.71	86.83
2	Kab Lebak	79.63	79.81	79.87
3	Kab Tangerang	90.97	90.98	91.08
4	Kab Serang	92.40	92.14	91.98
5	Kota Tangerang	94.89	95.06	94.72
6	Kota Cilegon	87.16	87.22	87.25
7	Kota Serang	91.96	92.28	92.47
8	Kota Tangerang Selatan	93.56	93.58	93.80
PROVINSI BANTEN		91.67	91.74	91.83

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah 68,83 menurun menjadi 68,76 tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 69,09. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa upaya pembangunan Gender di Provinsi Banten telah meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender, akan tetapi peningkatan kualitas ini belum diimbangi dengan pemberdayaan peran gender dalam aktivitas ekonomi dan politik.

Tabel 2. 32
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2021

NO	KABUPATEN/KOTA	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) MENURUT KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BANTEN		
		2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	61.58	63.52	63.16
2	Kab Lebak	60.36	58.68	58.24
3	Kab Tangerang	61.54	61.53	62.17
4	Kab Serang	58.87	59.48	59.93
5	Kota Tangerang	65.19	65.03	64.86
6	Kota Cilegon	52.86	52.32	52.81
7	Kota Serang	62.10	61.26	61.66
8	Kota Tangerang Selatan	74.00	73.85	73.08
PROVINSI BANTEN		68.83	68.76	69.09

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Selain itu pada tahun 2021, Provinsi Banten mendapatkan penghargaan PROVILA yaitu Provinsi pelopor Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini dikarenakan Provinsi Banten seluruh Kabupaten/Kota nya telah memperoleh peringkat dan penghargaan KLA. Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur Kabupaten/Kota menjadi layak anak yang pengelompokkannya mengacu pada 5 klaster Konvensi Hak Anak. Menurut peringkatnya dari yang tertinggi hingga terendah, KLA dikelompokkan sebagai berikut: 1) Utama; 2) Nindya; 3) Madya; 4) Pratama.

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

c. Bidang Urusan Pangan

Capaian indikator kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan yaitu Indeks Ketahanan Pangan Daerah yang di jabarkan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 33
Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2021 (Nilai)

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021
Nilai Indeks Ketahanan Pangan	83,29	81,93	73,48	82,69

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Secara umum, Indeks Ketahanan Pangan Banten mengalami penurunan nilai di tahun 2021 yaitu sebesar 73,48, namun seiring membaiknya produksi dan konsumsi pangan Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 naik menjadi 82,69.

Tabel 2. 34
Rata-Rata Kelompok Makanan Atas Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Tahun 2019-2021

NO	KELOMPOK MAKANAN	RATA-RATA KONSUMSI KALORI PER KAPITA SEHARI MENURUT KELOMPOK MAKANAN DAN KLASIFIKASI DAERAH DI PROVINSI BANTEN (KKAL)			RATA-RATA KONSUMSI PROTEIN PER KAPITA SEHARI MENURUT KELOMPOK MAKANAN DAN KLASIFIKASI DAERAH DI PROVINSI BANTEN (GRAM)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Padi-padian	828,63	839,87	885,34	19,5	19,76	20,83
2	Umbi-umbian	32,15	36,09	42,16	0,34	0,37	0,42
3	Ikan	53,64	53,78	55,80	9,58	9,68	9,91
4	Daging	78,74	80,09	85,26	5,05	5,12	5,41
5	Telur dan susu	71,23	71,23	70,18	3,92	4,11	3,90
6	Sayur-sayuran	37,8	37,75	39,92	2,07	2,05	2,13
7	Kacang-kacangan	55,84	56,85	58,13	5,40	5,52	5,67
8	Buah-buahan	44,78	41,65	40,00	0,51	0,48	0,41
9	Minyak dan Lemak	277,35	282,48	307,54	0,09	0,09	0,08
10	Bahan Minuman	77,51	78,00	82,62	0,72	0,78	0,77
11	Bumbu-bumbuan	12,79	14,40	14,31	0,51	0,56	0,57
12	Konsumsi lainnya	65,05	63,01	65,21	1,35	1,33	1,37
13	Makanan dan Minuman Jadi	613,15	591,81	512,60	18,03	17,54	15,22
Jumlah		2.248,65	2.250,36	2.259,08	67,07	67,39	66,69

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

d. Bidang Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini adalah penetapan lokasi dimana pada tahun 2021 terdapat 7 penetapan lokasi yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan.

Tabel 2. 35
Penetapan Lokasi Tahun 2021

KETERANGAN	LOKASI
Surat Keputusan Penetapan Lokasi	1. Jalan Palima-Pasar Baros
	2. Tol kamal-Teluk naga-Rajeg
	3. Pelebaran jalan Pakupatan-Palima
	4. Tanggul Sungai Ciujung
	5. Serpong-Cinere
Tukar menukar tanah kas Desa	6. Pembangunan Transmisi SUTT 150 KV Bayah Malingping PT. PLN (Persero) Unit Indul Interkoneksi Sumatera-Jawa
	7. Pembangunan PSN Jalan Tol Serang - Panimbang II di Desa Sukajaya, Cikulur, Kab. Lebak

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

e. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten masih terjaga kelestariannya, termasuk di kawasan lindung, seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir, dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktik pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, namun masih terdapat berbagai aktivitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah

kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktivitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai-sungai sebagai akibat aktivitas industri dan pemukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (up land) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai, dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun), abrasi pantai, hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung, eksploitasi sumber daya alam yang berlebih (*over exploitation*) dan bencana alam.

Tabel 2. 36
Capaian Berbagai Indeks Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2021 (Indeks)

NO	INDEKS	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	49,02	56,86	62,94	62,73
2	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,33	52,07	54,83	54,47
3	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	72,36	72,36	73,35	73,74
4	Indeks Tutupan Hutan (Indeks)	45,46	45,9	45,46	45,99

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa, terjadi peningkatan kualitas udara di Provinsi Banten. namun untuk realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Banten di tahun 2021 mengalami penurunan nilai sebesar 0,21, dari posisi 62,94 di tahun 2020 menjadi 62,73 di tahun 2021. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kualitas air dimana aspek tersebut nilainya paling kecil dibanding lainnya, artinya pencemaran air sungai dan air laut perlu penanganan lebih prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan angka jumlah pencemaran dan limbah di bawah ini.

Tabel 2. 37
Jumlah Lokasi Pencemaran dan Banyaknya Perusahaan Memiliki Pengolahan Limbah dari Tahun 2018-2020

NO	ITEM	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Jumlah Lokasi Pencemaran Air	Lokasi	9	8	8
2	Jumlah Lokasi Pencemaran Air	Lokasi	21	21	22
3	Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	0	250	250
4	Tidak Memiliki Pengolahan Limbah	Perusahaan	0	0	0

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel 2. 38
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (JUTA TON)	Ton	514.276	584.019	715.661
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	92,46	85,98	89
3	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Kasus	0	0	0
4	Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung	Dokumen	1	0	0
5	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup	Usaha	0	0	0
6	Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah (Juta ton)	Ton	0	2.336.076	2.236.441

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

f. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah persentase Capaian Tertib Administrasi Kependudukan yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 39
Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2021

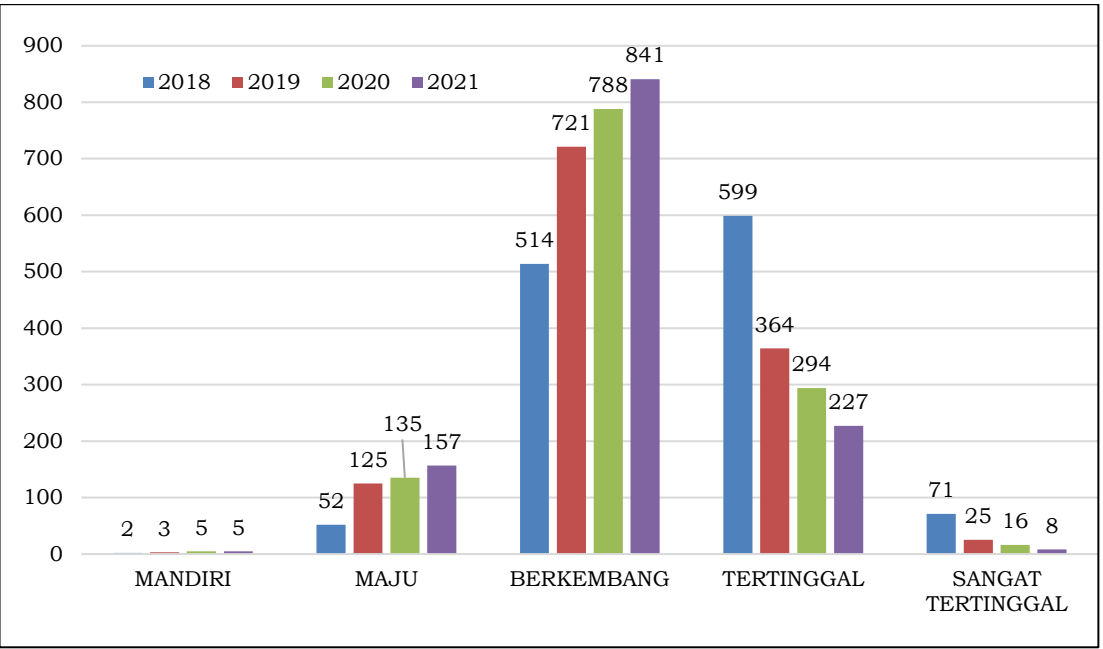
INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
Cakupan capaian Tertib Administrasi Kependudukan/Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100	100	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Capaian ini sejalan dengan cakupan pelayanan fasilitasi dalam penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-elektronik, akte kelahiran di Kabupaten/Kota yang sudah terlayani 100 persen oleh pemerintah provinsi.

g. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk mengukur tingkat kemajuan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mulai tahun 2014 melakukan Penghitungan Indeks Desa Membangun (IDM). Dalam penelitian ini data awal yang digunakan adalah data IDM mulai tahun 2018 yang merupakan hasil pendataan mandiri oleh Kementerian PPDT. Jumlah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal di Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami penurunan.



Gambar 2. 4
Perkembangan Status Desa Di Provinsi Banten Tahun 2018-2021 (Desa)
(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah desa sangat tertinggal di Provinsi Banten pada tahun 2021 berjumlah sebanyak 8 desa menurun 8 desa dibandingkan kondisi tahun 2020 yang mencapai 16 desa. Selain itu terjadi penurunan desa tertinggal dari semula berjumlah 294 desa (tahun 2020) menjadi 227 desa (tahun 2021). Meski demikian, jika dibandingkan penurunan tahun sebelumnya, jumlah penurunan tersebut kurang menggembarakan mengingat perubahan desa sangat tertinggal tahun 2018 (berjumlah 71 desa) menurun sebanyak 46 desa tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa

akselerasi penurunan desa tertinggal atau pun desa sangat tertinggal pada tahun 2021 mengalami perlambatan dibandingkan dengan kondisi tahun 2020.

Hal lainnya yang harus mendapat perhatian adalah tidak bertambahnya jumlah kategori desa Mandiri. Data tahun 2020 dan 2021 jumlah desa mandiri di Provinsi berjumlah tetap yakni lima desa. Penyebaran desa mandiri tersebar di empat kabupaten dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 40
Capaian Desa Mandiri Tahun 2018-2021

KABUPATEN	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Lebak	Desa Margaluyu Kecamatan Cimarga			
Pandeglang	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan	Desa Labuan Kecamatan Labuan
Serang		Desa Anyar Kecamatan Ayar, Desa Tambak Kecamatan Kibin	Desa Anyar Kecamatan Ayar, Desa Tambak Kecamatan Kibin, Desa Kragilan Kecamatan Kragilan	Desa Anyar Kecamatan Ayar, Desa Tambak Kecamatan Kibin, Desa Sindang Sari Kecamatan Pabuaran
Tangerang			Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua	Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua
Jumlah	Dua Desa	Tiga Desa	Lima Desa	Lima Desa

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pertumbuhan desa mandiri di wilayah Provinsi Banten sangatlah lambat. Selain masih banyaknya Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal, capaian nilai IDM Provinsi Banten Tahun 2021 sebesar 0,6445 menempatkan provinsi ini pada peringkat 23 dari 33 provinsi yang dilakukan penilaian. Hal ini menunjukkan capaian IDM Provinsi Banten berada di bawah rata-rata nasional dan terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali.

Tabel 2. 41
Capaian IDM Provinsi Banten Tahun 2020-2021 (Nilai)

NAMA PROVINSI	2019		2020		SELISIH	2021		SELISIH
	NILAI	PERINGKAT	NILAI	PERINGKAT		NILAI	PERINGKAT	
Bali	0,7641	1	0,7879	1	0,0238	0,8037	1	0,0158
Yogyakarta	0,7503	2	0,7684	2	0,0181	0,7837	2	0,0153
Jatim	0,679	5	0,7026	3	0,0236	0,7217	3	0,0191
Jabar	0,6764	6	0,6967	5	0,0203	0,7202	4	0,0235
Jateng	0,6682	7	0,682	8	0,0138	0,693	10	0,011
Banten	0,6273	15	0,6361	22	0,0088	0,6445	23	0,0084

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Gambaran penurunan peringkat nilai IDM Provinsi Banten secara nasional sebagaimana tersaji dalam tabel di atas seiring dengan rendahnya peningkatan nilai IDM Tahun 2021 di bandingkan nilai IDM Tahun 2020. Perubahan nilai IDM Provinsi Banten hanya mencapai 0,0084 jauh lebih rendah dibandingkan perubahan capaian IDM provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali. Kondisi ini tentu saja sangat perlu segera diantisipasi agar gap antara capaian IDM Provinsi Banten dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa-Bali tidak semakin membesar.

h. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan dengan menghitung indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dimana terjadi kenaikan sebesar 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk urusan ini terjadi perubahan indikator yang sebelumnya laju pertumbuhan penduduk menjadi Angka Kelahiran Total (TFR) dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. 42
Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	-	-	2,21	2,23
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,14	0,35	5,11	2,01

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

i. Bidang Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memperhatikan berbagai sarana dan transportasi baik transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa sarana dan prasarana transportasi tersebut pengelolaannya disesuaikan dengan kewenangannya, berikut capaian urusan perhubungan 2018-2021.

Tabel 2. 43
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara (%)	-	-	22,54	98.33
2	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas (%)	100	100	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Jumlah kendaraan di Provinsi Banten terus bertambah (mobil dan sepeda motor) sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 namun selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali bertambah pada tahun 2021 kecuali sepeda motor. Begitu juga jumlah penumpang kereta api, penumpang pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta, serta penyeberangan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Merak mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Salah satu penyebab utamanya adanya terjadinya Pandemi COVID-19 yang selain berpengaruh terhadap kesehatan juga berpengaruh terhadap perekonomian.

Tabel 2. 44
Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten
Tahun 2018-2021 (Unit)

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Mobil Penumpang	732.366	830.678	789.232	801.276
2	Bus	2.197	3.104	2.451	7.734
3	Truk	169.075	187.060	177.563	178.630
4	Sepeda Motor	4.111.154	4.495.518	4.145.180	4.051.244

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Secara keseluruhan infrastruktur terminal tipe A (amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah pusat) di Provinsi Banten (Terminal Pakupatan, Terminal Merak, Terminal Labuan, Terminal

Lebak) untuk mendukung operasional terminal telah memenuhi syarat selain dari masih adanya terminal dalam pembenahan infrastruktur seperti Terminal Terpadu Merak (Kota Cilegon). Untuk Terminal Tipe-B(amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah provinsi), menjadi tantangan tersendiri Dinas Perhubungan Provinsi Banten untuk membangunnya. Karena terminal tipe B yang ada di kabupaten / kota tidak diserahkan ke pemerintah provinsi. Terminal tipe – C (amanah UU. 23 / 2014 dikelola oleh pemerintah kabupaten / kota) diperlukan koordinasi lebih baik untuk penetapan lokasi di kabupaten/ kota antara pemerintah provinis dengan pemerintah kabupaten / kota.

Tabel 2. 45

Klasifikasi Terminal di Provinsi Banten Tahun 2020

LOKASI	NAMA TERMINAL	KLASIFIKASI
Kab. Pandeglang	Terminal Labuan	Tipe A
	Terminal Anten	Tipe C
	Terminal Lampe Labuan	Tipe C
Kab. Lebak	Terminal Kadu Agung	Tipe A
	Terminal Malingping	Tipe C
	Terminal Sunan Kalijaga	Tipe C
	Terminal Bayah	Tipe C
Kab. Tangerang	Terminal Binuangen	Tipe C
	Terminal Kp. Melayu	Tipe C
	Terminal Balaraja	Tipe C
Kab. Serang	Terminal Anyer	Tipe C
Kota Tangerang	Terminal Porisplawad	Tipe A
	Terminal Cimone	Tipe C
	Terminal Ciledug	Tipe C
	Terminal Cibodasari	Tipe C
Kota Cilegon	Terminal Pasar Baru	Tipe C
	Terminal Merak	Tipe A
	Terminal Seruni	Tipe C
Kota Serang	Terminal Pakupatan	Tipe A
	Terminal Cipocok	Tipe C
	Terminal Kepandean	Tipe C
Kota Tangsel	Terminal Pondok Cabe	Tipe C
	Terminal Bumi Serpong Damai	Tipe C

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020

Berdasarkan hasil survey lapangan diperoleh adanya potensi pergerakan penumpang yang tidak sesuai dengan fungsi terminal, seperti terminal tipe B yang seharusnya hanya melayani pergerakan

penumpang sampai antar kota dalam provinsi (AKDP) tetapi karena tingginya potensi pergerakan penumpang antar provinsi maka terminal tipe B tersebut harus melayani trayek AKAP yang seharusnya dilayani terminal tipe A. Selain itu adanya terminal yang kurang aktif serta ada terminal yang beralih fungsi menyebabkan beberapa terminal tidak berfungsi optimal. Untuk itu perlu dilakukan pengoptimalan fungsi terminal agar pergerakan penumpang dapat terlayani dengan baik, nyaman dan aman

Eksisting Terminal Tipe-A di Provinsi Banten : Terminal Pakupatan (Kota Serang), Terminal Terpadu Merak (Kota Cilegon), Terminal Labuan (Kab. Pandeglang), Terminal Lebak (Kab. Lebak). Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan terminal Tipe-A diambil alih oleh kementerian perhubungan melalui Badan Pengelolaan Transportasi Daerah Wil. VIII – Banten mulai tahun 2016.

Tabel 2. 46
Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Provinsi Tahun 2018-2020

NO	PERLENGKAPAN JALAN	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Marka Jalan	M	11.500	70.250	-
2	Guard Rail	M	1.120	1.430	136
3	RPPJ	Unit	-	9	10
4	RPPJ Gantry	Unit	-	-	-
5	<i>Traffic Light</i>	Unit	-	-	-
6	Rambu Standar	Unit	732	385	233
7	Rambu Standar Tiang F	Unit	-	-	-
8	Paku Jalan	Buah	398	778	480
9	<i>Warning Light</i>	Unit	8	8	-
10	<i>Traffic Cone</i>	Unit	398	-	300
11	<i>Canstin/ Road Barrier</i>	Buah	57	315	-
12	<i>Delinator</i>	Buah	300	315	100
13	<i>Water Block</i>	Buah	-	-	-
14	Cermin Tikungan	Unit	-	26	-
15	LPJU	Unit	514	305	332

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020

Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi Banten seperti marka, rambu-rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran

yang dimiliki dan masih adanya aksi pencurian dan perusakan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan pada ruas jalan selain faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan.

Tabel 2. 47

Kecelakaan pada Ruas Jalan di Banten Tahun 2017-2020 (Kejadian)

NO	Uraian	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Kecelakaan	1.713	1.447	1.484	1.264
2	Korban	4.278	3.575	3.386	2.107
3	Meninggal Dunia	794	754	695	633
4	Luka Berat	338	174	146	118
5	Luka Ringan	3.146	2.647	2.545	1.356

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020

j. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki empat tujuan, antara lain manajemen kinerja instansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas, kemudian mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

Pemerintah juga akan mempersiapkan aplikasi yang bersifat umum, agar bisa melayani masyarakat di ruang digital melalui satu sistem. Beberapa aplikasi yang dimaksud antara lain, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-payment*, hingga *e-money* selain itu, penting untuk memperhatikan evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya;
2. Kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya; dan
3. Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan data dari Kementerian PANRB, Banten menduduki predikat baik pada Tahun 2021, predikat ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai predikat cukup.

Tabel 2. 48
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2018-2021 (Nilai)

TAHUN	NILAI SPBE	PREDIKAT
2018	2,01	Cukup
2019	1,83	Cukup
2020	1,83	Cukup
2021	3,15	Baik

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

k. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Struktur ekonomi Provinsi Banten ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, - 62 - industri, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonorni dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonorni daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonorni daerah.

Tabel 2. 49
Kinerja Koperasi di Provinsi Banten Menurut Indikator Produksi
Tahun 2020-2021

Indikator	Satuan Unit	2020	2021
1. Koperasi	unit	7.792	8.076
a. Aktif	unit	3.999	4.225
b. Non Aktif	unit	3.793	3.851
2. Anggota	Orang	953.982	5.182
3. Manajer	Orang	396	7
4. Karyawan	Orang	7.249	31
5. Jumlah Asset	juta rupiah	-	-
6. Modal	juta rupiah	5 239 268	76.636.903.746
a. Modal Sendiri	juta rupiah	2 543 008	50.211.061.241
b. Modal Luar	juta rupiah	2 696 260	26.425.842.505
7. Volume Usaha	juta rupiah	4 805 326	60.430.622.675
8. Jumlah SHU	juta rupiah	329 066	7.202.801.477

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Penguatan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung

oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Tabel 2. 50
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi (%)	6	6	6	6
2	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil (%)	1	1	1	1

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Data koperasi aktif dan tidak aktif menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Pandeglang yang jumlah koperasi aktifnya lebih banyak dari koperasi tidak aktif, sisanya di Kabupaten/Kota lainnya jumlah koperasi tidak aktif lebih banyak. Ini perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Banten.

Tabel 2. 51
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota dan Status Aktivitas di
Provinsi Banten Tahun 2019-2021 (Unit)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		AKTIF	TIDAK	TOTAL	AKTIF	TIDAK	TOTAL	AKTIF	TIDAK	TOTAL
			Aktif			Aktif			Aktif	
1	Kab. Pandeglang	482	100	582	505	99	604	522	99	621
2	Kab. Lebak	528	322	850	530	322	852	538	321	859
3	Kab. Tangerang	1.126	433	1.559	588	1.003	1.591	556	1 021	1 577
4	Kab. Serang	532	814	1346	620	818	1.438	646	818	1 464
5	Kota Cilegon	289	676	965	290	873	1163	289	676	965
6	Kota Serang	298	257	555	301	257	558	285	297	582
7	Kota Tangerang	133	238	371	131	237	368	131	234	365
8	Kota Tangsel	332	303	635	388	301	689	360	300	660
	Binaan Provinsi Banten	-	-	-	329	62	391	412	61	473
	Binaan Nasional	-	-	-	367	21	388	486	24	510
	Jumlah/Total	3 172	2 711	5 309	4 049	3 993	8 042	4 225	3 851	8 076

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasakan belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan, masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil, berikut capaian indikator pada urusan koperasi dan usaha menengah kecil.

Tabel 2. 52
Jumlah Usaha Menengah dan Kecil di Provinsi Banten Tahun 2021 (UMK)

NO	KABUPATEN/KOTA	Usaha Menengah dan Kecil
1	Kabupaten Lebak	32
2	Kabupaten Lebak	59
3	Kabupaten Serang	55
4	Kabupaten Tangerang	72
5	Kota Cilegon	52
6	Kota Serang	94
7	Kota Tangerang	57
8	Kota Tangerang Selatan	84
Provinsi Banten		505

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

1. Bidang Urusan Penanaman Modal

Iklm investasi di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Banten yang strategis menempatkan Banten menjadi tujuan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Berikut capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2018 sampai 2021. Masih terjadi fluktuasi dalam realisasi investasi di Provinsi Banten, dimana di tahun 2021 jumlah nilai investasi menurun dibandingkan tahun 2020.

Tabel 2. 53
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2021 (Triliyun)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN) (Triliyun)	56,52	48,73	62,01	57,96

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Tabel di bawah menunjukkan realisasi PMA dan PMDN pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada Tahun 2020. Total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Banten Tahun 2020 mencapai Rp. 30,86 triliun dengan 4.397 proyek.

Tabel 2. 53
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	PROYEK	REALISASI INVESTASI (RP. JUTA)	REALISASI INVESTASI (US\$. RIBU)	TKI	TKA
1	Kota Cilegon	390	14.685.571,80	1.019.831,10	2.588	464
2	Kabupaten Tangerang	1.778	6.399.021,85	444.376,40	10.173	242
3	Kabupaten Serang	610	4.531.473,52	314.685,60	4.007	120
4	Kota Tangerang	944	2.323.894,26	161.381,50	6.003	57
5	Kota Serang	51	1.295.458,91	89.962,40	171	-
6	Kabupaten Lebak	59	945.832,63	65.682,80	54	-
7	Kota Tangerang Selatan	548	685.355,26	47.594,10	1.837	12
8	Kabupaten Pandeglang	17	652,32	45,30	-	-
JUMLAH		4.397	30.867.260,55	2.143.559,20	24.833	895

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Banten mencapai Rp. 31 triliyun dengan 5.929 proyek.

Tabel 2. 54
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	PROYEK	REALISASI INVESTASI (RP. JUTA)	REALISASI INVESTASI (US\$. RIBU)	TKI	TKA
1	Kabupaten Tangerang	2.173	12.101.112,10	840.354,20	14.718	18
2	Kota Tangerang	1.768	6.029.870,50	418.741,35	21.557	12
3	Kota Cilegon	233	3.458.264,50	240.157,19	830	2
4	Kabupaten Serang	458	3.375.259,30	234.392,98	6.689	1
5	Kota Tangerang Selatan	937	3.248.178,70	225.567,99	3.011	1
6	Kabupaten Lebak	141	2.295.834,20	159.432,70	1.557	-
7	Kabupaten Pandeglang	69	413.026,50	28.682,42	322	-
8	Kota Serang	150	224.116,10	15.563,62	146	-
JUMLAH		5.929	31.145.661,90	2.162.892,46	48.830	34

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Tabel 2. 55
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020

SEKTOR EKONOMI	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI	
		JUTA RP	RIBU US\$
1. Pertanian			
Perikanan	50	131.149,30	8 982,80
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Pernakan	59	458.462,40	31.401,44
2. Pertambangan dan Penggalan	41	339.051,40	23.222,62
3. Industri Pengolahan			
▪ Makanan	464	1.223.065,40	83.771,31
▪ Tekstil	97	14.009,40	959,54
▪ Kulit, Barang dari kulit dan sepatu	36	14.095,10	965,41
▪ Kayu	28	8.951,60	613,12
▪ Kertas, barang dari kertas dan percetakan	122	244.595,10	16.753,03
▪ Kimia dasar, barang kimia dan farmasi	387	279.319,40	19.131,40
▪ Alat angkutan dan transportasi lainnya	64	140.829,50	9.645,82
▪ Karet, barang dari karet dan plastik	254	331.370,70	22.696,54
▪ Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	276	2.392.769,50	163.887,76
▪ Mineral non logam	79	21.608,90	1.480,06
▪ Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	211	43.592,90	2.985,81
▪ Lainnya	149	69.952,30	4.791,24
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	70	499.463,20	34.209,69
5. Konstruksi	410	2.393.095,10	163.909,98
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran			
▪ Perdagangan dan reparasi	3.496	1.060.761,30	72.654,62
▪ Hotel dan restoran	890	434.441,50	29.756,16
7. Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	214	6.733.630,20	461.205,87
8. Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	889	6.940.189,60	475.353,72
9. Jasa lainnya	855	2.215.085,70	151.717,71
Jumlah	9.141	25.989.490	1.780.095,65

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

m. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu melalui pembangunan kepemudaan, upaya membangun sumberdaya manusia dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa juga dapat ditempuh melalui pembangunan keolahragaan. Gambaran Indikator kinerja pada urusan Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 56
Indikator Kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2021
(Indeks)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Kepemudaan (Indeks)	9,73	20,17	30,27	49,17
2	Indeks Pembangunan Olahraga (Indeks)	9,38	20,83	30	40

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Melalui olahraga, setiap individu dapat mengalami kesetaraan, kebebasan, disiplin, kekuatan mental, kesabaran, daya juang, serta sportivitas. Gambaran pembangunan olah raga di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 57
Data Jumlah Pemuda dan Olah Raga Provinsi Banten Tahun 2018-2020

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020
Jumlah Pemuda	Orang	3.264.000	3.242.140	3.301.320
Cabang Olahraga yang Medapatkan Pelayanan	Unit	30	30	24
Cabang Olahraga	Unit	43	43	43
Cabang Olahraga Berprestasi	Unit	10	10	10
Cabang Olahraga yang Diikuti	Unit	19	15	3
Atlet Berprestasi Di UPTD	Orang	28	13	1
Atlet yang Dibina Di UPTD	Orang	79	89	99
Atlet yang Ikut Kejuaraan	Orang	96	96	96

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Rendahnya partisipasi olahraga dan tujuan melakukan olahraga prestasi mengindikasikan bahwa atlit, klub, penggemar olahraga dan masyarakat Provinsi Banten memerlukan fasilitas yang representatif dan terpadu, yang mampu mewadahi aktivitas seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisik untuk menjaga kesehatan, maupun untuk rekreasi. Lebih daripada itu, ketersediaan fasilitas olahraga yang representatif dalam lokasi yang terpadu dan memenuhi standar nasional maupun internasional, memungkinkan Provinsi Banten untuk menjadi host multi event keolahragaan, yang akan mendorong perkembangan industri olahraga di Provinsi Banten.

Jumlah Atlet Tahun 2021 yaitu 3.241 juta, terdiri dari atlet Laki-Laki sebanyak 1.656 juta dan atlet perempuan sebanyak 1.585 juta, menurun dari jumlah atlet Tahun 2020 yaitu 3.301.320.

n. Bidang Urusan Statistik

Urusan statistik sektoral pada Provinsi Banten dilaksanakan bersama-sama dengan instansi vertikal lain seperti BPS, Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia. Pergub ini dibuat agar mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini ketercapaian pengisian data sektoral masih harus terus didorong seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 58
Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2020-2021 (Persen)

NO	JENIS DATA SEKTORAL	TAHUN	
		2020	2021
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat (%)	75	50
2	Aspek Daya Saing Daerah (%)	75	50
3	Aspek Pelayanan Umum (%)	75	50
RERATA (%)		75	50

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

o. Bidang Urusan Persandian

Penyelenggaraan Urusan persandian tersebut di Provinsi Banten diserahkan pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, Persandian. Dalam pelaksanaan operasionalnya persandian pada Pemerintah Provinsi Banten sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di instansi lingkup pemerintah, ini karena banyak keterbatasan terutama dalam hal infrastruktur teknologi informasi maupun sumber daya manusia ASN di Provinsi Banten belum ada yang secara khusus menangani hal ini. Indikator kinerja untuk urusan persandian sendiri adalah Persentase Sarana dan Prasarana Persandian yang capaiannya 51,52 persen tahun 2020 dan 100 persen tahun 2021.

p. Bidang Urusan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Banten ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Untuk mengukur pembangunan kebudayaan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penilaian berupa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai instrumen penilaian

capaian kinerja pembangunan kebudayaan baik ditingkat nasional maupun daerah. Pengukuran Indeks Kebudayaan mulai dilakukan tahun 2018 berdasarkan pada 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 dimensi yakni.

1. Dimensi Ekonomi Budaya;
2. Dimensi Pendidikan;
3. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya;
4. Dimensi Warisan Budaya;
5. Dimensi Ekspresi Budaya;
6. Dimensi Budaya Literasi; dan
7. Dimensi Kesetaraan Gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Berdasarkan data pada tabel di bawah terlihat bawa capaian IPK Provinsi Banten tahun 2019 sebesar 51,43 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 46,69. Meskipun demikian upaya percepatan peningkatan nilai IPK sangat diperlukan mengingat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional capaian IPK provinsi berada pada posisi 9 terbawah. Hasil pengukuran Indeks Pembangunan kebudayaan Provinsi tahun 2018 dan 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 59
Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Tahun 2018-2019 (Nilai)

NO	DIMENSI	TAHUN	
		2018	2019
1	Ekonomi Budaya	11,1	11,71
2	Pendidikan	68,38	71,65
3	Ketahanan Sosial Budaya	64,35	64,92
4	Warisan Budaya	44,07	45,02
5	Ekspresi Budaya	29	29,53
6	Budaya Literasi	54,93	60,27
7	Kesetaraan Gender	52,44	54,25
8	IPK	46,69	51,43

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2020

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah Cagar budaya di Provinsi Banten mengalami penurunan yang signifikan. Mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Perkembangan kondisi beban kerja serta adanya Kepmendagri 050 Tahun 2021 yang berimplikasi kepada pelaksanaan dua program

menuntut adanya penyesuaian desain organisasi UPTD ini. Dalam Kepmendagri 050 Tahun 2021 program Pengelolaan Museum terpisah dari program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Untuk kepentingan cascading dalam penetapan indikator kinerja hal ini menjadi suatu kendala. Berdasarkan hal tersebut perlu diinisiasi reorganisasi bentuk kelembagaan pengelolaan museum dan taman budaya.

Tabel 2. 60
Jenis Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2020 (Unit)

NO	JENIS KEBUDAYAAN	TAHUN	
		2019	2020
1	Cagar Budaya	1441	60
2	Desa Adat	8	99
3	Museum	7	7
4	Komunitas	0	20

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

q. Bidang Urusan Perpustakaan

Pada bidang urusan perpustakaan pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi dan akses literasi. Pemerintah Provinsi Banten berhasil menempati urutan ke-9 (sembilan) se-Indonesia dalam Indeks Kegemaran Membaca (IKM) berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2020, dengan perolehan angka 58,77. Indeks Kegemaran Membaca Nasional ada di angka 55,74, artinya Provinsi Banten berhasil memiliki Indeks Kegemaran Membaca di atas rata-rata nasional, untuk Indeks Pembangunan Literasi (IPL), Pemerintah Provinsi Banten berada di urutan 5 (lima) terbawah nasional dengan angka 8,90. Hal yang mempengaruhi rendahnya IPL tersebut yakni ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan berstandar nasional dan koleksi buku perpustakaan.

Tabel 2. 61
Data dan Informasi Perpustakaan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2018-2020

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan yang Menuju SPM Perpustakaan (Perpus)	80	125	152
2	Target yang Direncanakan (Perpus)	146	146	192
3	Capaian Pelayanan Perpustakaan Provinsi Banten (%)	75	80	83
4	Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (%)	100	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

r. Bidang Urusan Kearsipan

Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan nilai 74,89 dengan predikat (sangat baik) hasil pengawaaan/audit Kearsipan Nasional yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2020. Ke depan peningkatan kearsipan perlu dilaksanakan seluruh perangkat daerah. Adapun beberapa aspek yang menjadi penilaian pengawasan kearsipan dari ANRI meliputi kepatuhan terhadap regulasi kearsipan, sistem pengelolaan arsip sesuai standar yang berlaku, ketersediaan SDM, sarana dan prasarana kearsipan, program kerja dan anggaran kearsipan daerah. Berikut merupakan indiaktor kinerja urusan kearsipan yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2. 62
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan (%)	80	85	90	100
2	Jumlah Arsip yang Terdigitalisasi (Unit)	21.096	22.415	23.733	24.33
3	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Pada Depo Arsip (Unit)	26.370	26.370	26.370	27,70

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

2.2.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan pilihan menjadi bagian dalam urusan pemerintahan konkuren yang mana dalam pelaksanaannya wajib diselenggarakan oleh daerah namun dengan mempertimbangkan terhadap potensi yang dimiliki daerah tersebut. Lebih lanjut dalam aturan yang sama, diperjelas pada pasal 12 bahwa yang menjadi bagian dalam urusan pilihan ini meliputi:

- Kelautan dan perikanan;
- Pariwisata;
- Pertanian;
- Kehutanan;
- Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Perdagangan;
- Perindustrian; dan
- Transmigrasi.

a. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan dan perikanan, Provinsi Banten tersebar di lima Kabupaten/Kota dengan 61 buah pulau-pulau kecil yaitu di Kota Cilegon sebanyak 5 pulau, Kabupaten Pandeglang sebanyak 33 pulau, Kabupaten Serang sebanyak 17 pulau, Kabupaten Tangerang sebanyak 1 pulau, dan Kabupaten Lebak sebanyak 5 pulau. Di samping itu Banten memiliki garis pantai 499,62 km, terbagi atas garis pantai yang menghadap Samudra Indonesia 138,62 km, menghadap Laut Jawa 127,10 km dan menghadap Selat Sunda 233,90 km. Kondisi geografis semacam ini menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk didalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil dan kegiatan pendayagunaan benda-benda berharga (*the sunken treasures*).

Pola ruang di Provinsi Banten telah mengatur kawasan peruntukan perikanan yang diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan ikan lebih kurang seluas 1.620,02 Ha juga telah dikonsepskan dibentuknya kawasan minapolitan yang berada di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang (Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten). Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan Tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tabel 2. 63
Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2021
(Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)	2,93	2,63	-	-
2	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)	-	-	4,13	2,5

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Jika berbicara terhadap produksi perikanan laut di Provinsi Banten, pada tahun 2020 produksi perikanan laut mencapai

6.194.568 kg dengan nilai produksi sebesar 95 miliar rupiah. Produksi tertinggi terdapat di Kota Serang dengan jumlah sebesar 2.602.781 kg dan mempunyai persentase terhadap produksi di Provinsi Banten sebesar 42,02 persen. Sedangkan, Kabupaten Serang merupakan Kabupaten yang memiliki produksi ikan terendah yaitu sebesar 268.895 kg dengan persentase terhadap produksi di Provinsi Banten sebesar 4,34 persen. Pada tahun 2020, produksi perikanan laut yang dijual di setiap TPI di Provinsi Banten rata-rata sebesar 166.221 kg per Tempat Pelelangan Ikan (TPI) setiap triwulannya.

Rata-rata penjualan ikan terbesar terjadi pada triwulan IV yaitu mencapai 198.322 kg. Dilihat berdasarkan tingkat penjualan per TPI menurut Kabupaten/Kota, rata-rata penjualan tertinggi terjadi di Kota Serang yaitu sebesar 686.247 kg per triwulan per TPI, diikuti Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak dengan rata-rata penjualan sebesar 72.520 kg dan 44.116 kg ikan per triwulan per TPI. Adapun rata-rata penjualan terendah terdapat di Kabupaten Serang dengan rata-rata penjualan sebesar 6.722 kg per triwulan per TPI.

Di bidang Perikanan Budidaya, terdapat peluang untuk dikembangkan usaha perikanan budidaya air tawar, perairan pedalaman, air payau serta budidaya laut, yang keseluruhannya mencapai luas 27.562 Ha.

Provinsi Banten memiliki perairan umum yang cukup potensial dikembangkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yaitu sekitar 4.928 Ha, yang terdiri dari cekdam/waduk 621 Ha, situ 320 Ha, rawa 3.416 Ha dan bekas galian pasir 572 Ha.

Pengembangan perluasan areal lahan usaha budidaya air payau masih terbuka terutama di pesisir Pantai Barat dan Pantai Selatan Banten, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove mengingat karakteristik lahannya yang khas. Secara umum, prospek pengembangan ke depan masih terbuka luas, mengingat sampai saat ini, pemanfaatan secara keseluruhan baru mencapai sekitar 66,80 persen.

Untuk kondisi perikanan tangkap sepanjang Pantai Utara merupakan konsentrasi dan pemukiman nelayan, bila dibandingkan Pantai Barat dan Pantai Selatan. Tercatat jumlah nelayan di Banten

pada tahun 2015 mencapai 30.791 orang yang mendiami 61 Desa di Pesisir Utara, 48 Desa di pesisir Barat dan 20 Desa di Pesisir Selatan. Jumlah armada perikanan tangkap tercatat pada tahun 2015 sebanyak 7.185 buah, didominasi oleh jenis armada kapal motor yang jumlahnya mencapai 6.200 unit.

Tabel 2. 64
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut yang Dijual di TPI menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	PRODUKSI (KG)	PERSENTASE TERHADAP BANTEN (%)	NILAI PRODUKSI (RIBU RUPIAH)	PERSENTASE TERHADAP BANTEN (%)
1	Kab Pandeglang	27.665.965	39,84	458.48.873.971	44,34
2	Kab Lebak	6.740.003	10,01	77.589.955.409	7,50
3	Kab Tangerang	21.088.031	30,01	224.320.334.391	21,69
4	Kab Serang	7.782.031	11,28	123.132.562.361	11,91
5	Kota Serang	5.821.478	8,38	58.955.318.904	5,70
PROVINSI BANTEN		69.097.508	100,00	942.494.806.420	100,00

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Pada tahun 2017, di Provinsi Banten terdapat 9.235 rumah tangga perikanan tangkap, dimana 8.676 rumah tangga atau 93,95 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di perairan umum. Total produksi perikanan tangkap selama tahun 2017 sebesar 107,36 ribu ton, dimana 106,54 ribu ton atau 99,24 persen diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut. Selanjutnya mengenai data produksi perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 65
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Sub Sektor di Provinsi Banten Tahun 2019-2021 (Ton)

NO	KAB/KOTA	PERIKANAN LAUT			PERAIRAN UMUM			JUMLAH		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	130.324	27.496,41	27.665	-	-	-	130.324	27.496,42	27.665
2	Kab Lebak	11.285	9.922,12	6.740	259	260,58	209,91	11.545	10.182,71	6.949
3	Kab Tangerang	20.383	20.784,34	21.088	208	87,93	88,34	20.591	20.872,27	21.176,37
4	Kab Serang	7.542	6.705,98	7.782	1.258	114,33	53,77	8.800	6.820,30	7.835,8
5	Kota Tangerang	-	-	-	1.530	1.533,83	215,58	1.530	1.533,83	215,58
6	Kota Cilegon	5.320	224,51	238,50	1.233	-	-	6.553	224,51	238,5
7	Kota Seraang	5.200	3.120,39	5.821,47	-	-	-	5.200	3.120,39	5.821,4
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	1.560	461,82	671,464	1.560	461,82	671,46
PROVINSI BANTEN		180.054	68.253,76	69.097,51	6.048	2.458,49	1.239.075	186.102	70.712,25	70.575,08

Sumber : SIPD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

b. Bidang Urusan Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa bagi Provinsi Banten adalah sektor Pariwisata. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan

daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Provinsi Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Seperti contohnya Kawasan Pariwisata Pantai Barat dan KEK Tanjung Lesung, Pantai Utara dan Pantai Selatan, Kawasan Pariwisata Budaya Banten Lama dan Permukiman Baduy, Kawasan Pariwisata Wisata Alam Ujung Kulon, Geopark, dan lain-lain.

Perkembangan pariwisata di Provinsi Banten ini memiliki kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel bahwa adanya peningkatan nilai PDRB yang lebih tinggi daripada tahun 2020, hal ini dimungkinkan karena sektor pariwisata di Provinsi Banten berangsur-angsur telah beradaptasi dimasa Pandemi COVID-19, sebagaimana diketahui bahwa pada sektor pariwisata telah digaungkan penerapan protokol kesehatan dengan istilah CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability*) yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tabel 2. 66
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	2,88	2,89	-	-
2	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata (%)	-	-	2,91	2,94

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

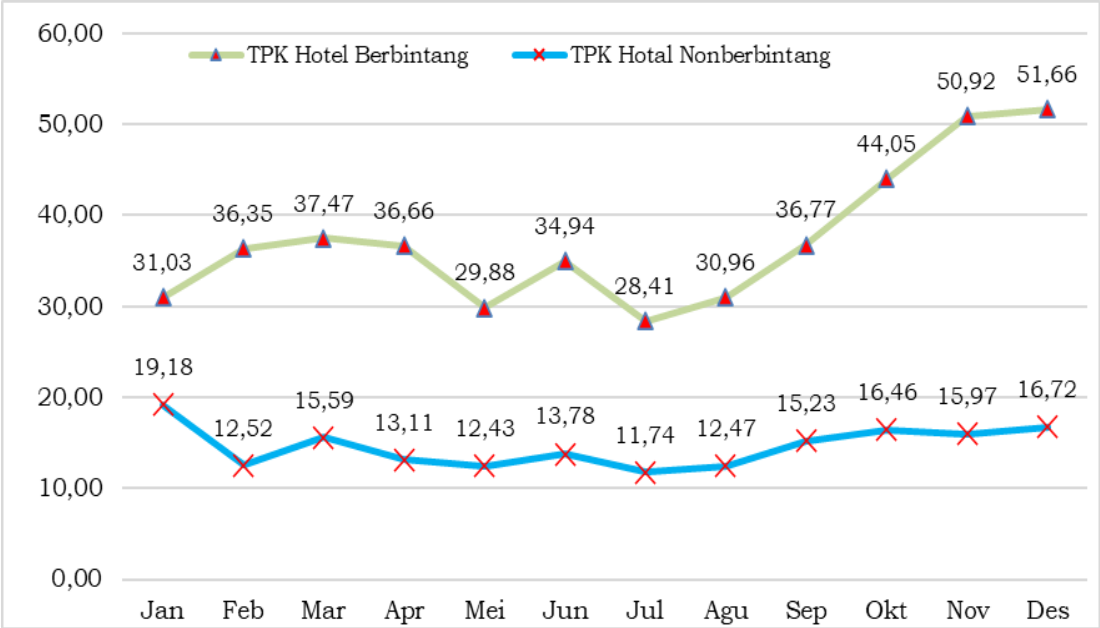
Pada tahun 2021 terdapat 453 hotel (berbintang dan nonbintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 19.139 kamar dan 27.791 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 1,24 hari untuk tamu asing dan 1,42 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2021 adalah 37,43 persen untuk hotel berbintang dan 14,60 persen untuk hotel non bintang.

Tabel 2. 67
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Banten
Tahun 2016-2021 (Jiwa)

TAHUN	WISATAWAN	
	MANCANEGARA	DOMESTIK
2016	176.928	18.418.984
2017	405.198	22.487.256
2018	327.003	17.982.140
2019	311.131	19.353.727
2020	37.926	18.507.170
2021	161.597	10.310.361

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2021 terdapat 10,47 juta wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 10,31 juta wisatawan domestik dan 0,16 juta wisatawan mancanegara.



Gambar 2. 5
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut
Bulan di Provinsi Banten (Hari) Tahun 2021 (Persen)
 (Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Sebagaimana yang telah disampaikan diawal bahwa secara geografis Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek.

Tabel 2. 68
Jumlah Objek Wisata Tirta Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten 2021 (Unit)

NO	KABUPATEN/KOTA	WISATA TIRTA					JUMLAH
		SITU/ DANAU	AIR PANAS	AIR TERJUN	ARUNG JERAM	KOLAM RENANG	
1	Kab Pandeglang	6	6	37	1	14	64
2	Kab Lebak	3	4	69	5	5	86
3	Kab Tangerang	5	-	-	-	10	15
4	Kab Serang	2	2	2	1	5	12
5	Kota Tangerang	3	-	-	-	4	7
6	Kota Cilegon	2	-	-	-	3	5
7	Kota Serang	1	-	-	-	3	4
8	Kota Tangerang Selatan	24	-	-	-	8	32
PROVINSI BANTEN		46	12	108	7	52	225

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa dominasi destinasi tertinggi wisatawan khususnya kelompok wisata tirta banyak disinggahi pada obyek air terjun yang terletak di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sejalan dengan hal tersebut pada obyek pantai menjadi tempat favorit dibandingkan obyek wisata lainnya sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 69
Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Wisata di
Provinsi Banten Tahun 2021 (Unit)

NO	KAB/KOTA	WISATAWAN	WISATA	SUAKA	OBJEK	JUMLAH
		MARINA PANTAI	SEJARAH	ALAM	WISATA LAINNYA	
1	Kab Pandeglang	84	3	1	58	146
2	Kab Lebak	34	-	-	-	34
3	Kab Tangerang	3	5	2	3	13
4	Kab Serang	21	4	12	11	48
5	Kota Tangerang	-	16	-	27	43
6	Kota Cilegon	-	-	-	-	0
7	Kota Seraang	1	60	1	16	78
8	Kota Tangerang Selatan	-	4	-	27	31
PROVINSI BANTEN		143	92	16	142	403

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Sementara pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah restoran terbanyak terdapat di Kabupaten Tangerang, secara keseluruhan jumlah restoran di Provinsi Banten pada tahun 2021 berjumlah 2.033.

Tabel 2. 70
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten Tahun 2018-2021 (Unit)

NO	KAB/KOTA	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Kab Pandeglang	118	124	116	116
2	Kab Lebak	56	57	56	56
3	Kab Tangerang	810	878	907	907
4	Kab Serang	18	18	16	16
5	Kota Tangerang	406	418	426	426
6	Kota Cilegon	2	10	2	2
7	Kota Seraang	51	51	46	46
8	Kota Tangerang Selatan	314	477	477	477
PROVINSI BANTEN		1.615	1.775	2.033	2.033

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

c. Bidang Urusan Pertanian

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota. Sektor pertanian di Provinsi Banten ini berkontribusi terhadap sumber pangan, penyerapan tenaga kerja bahkan pendorong bergeraknya sektor ekonomi lainnya. Sebagaimana pada Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten terdapat kawasan peruntukan pertanian sebesar 196.000,10 Ha yang terbagi menjadi lebih kurang sebesar 124.263,54 Ha kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering dengan luas lebih kurang sebesar 71.736,56 Ha. Sementara itu seluas 196.012,28 Ha sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terbagi menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan di daerah. Luasan kawasan tersebut dalam rangka mendukung Kawasan Sistem Pertanian Terpadu.

Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan pertanian Tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Kinerja pertanian ini mengalami penurunan pertumbuhan karena beberapa sektor produksi tahun 2021 yang naik signifikan seperti konstruksi dan perindustrian, sehingga di tahun 2020 pertumbuhan sektor

pertanian yang sudah tercatat 3,55% namun di tahun 2021 mengalami pelambatan menjadi 0,56%.

Tabel 2. 71						
Indikator Kinerja Urusan PertanianTahun 2018-2021 (Persen)						
NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	
1	Pertumbuhan Sektor Pertanian (%)	3,58	2,21	-	-	
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal (%)	-	-	3,55	0,56	

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi Tahun 2016-2020 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA), luas panen padi di Provinsi Banten periode Januari-Desember 2020 mencapai 325,33 ribu Ha. Luas panen tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 80,73 ribu Ha, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Januari dengan luas panen sebesar 2,99 ribu Ha.

Tabel 2. 72					
Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (Ton)					
JENIS TANAMAN PANGAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi					
Padi Sawah	2.300.595	2.369.731,00	1.643.046	1.470.503,35	1.643.469,03
Padi Ladang	57.607	43.747,00			
Palawija					
Jagung	19.882	63.518,00	331.865,38	119.206	111.903
Kedelai	4.020	2.126,00	18.093,56	1.202	895
Kacang Tanah	8.419	5.726,67	4.174	3.942	4.544
Kacang Hijau	432	220,7	281,18	736	348
Ubi Kayu	90.629	75.486,00	82.641,95	70.915	60.038
Ubi Jalar	24.255	20.724,00	16.470,53	12.788	15.284

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Bila dilihat dari distribusi luas panen padi di Banten, maka luas panen terbesar di Kabupaten Serang dengan luas panen sebesar 82,39 ribu Ha diikuti Kabupaten Lebak sebesar 81,41 ribu Ha, dan Kabupaten Pandeglang sebesar 82,11 ribu Ha. Luas panen terendah di Kota Tangerang Selatan sebesar 1 Ha. Sekitar 94,96 persen luas

panen padi di Provinsi Banten dihasilkan oleh 4 (empat) Kabupaten sentra komoditas padi yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang. Produksi Padi di Banten dari Januari hingga Desember 2020 sebesar 1,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Produksi tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 429,75 ribu ton, sementara produksi terendah pada bulan Desember yaitu sebesar 15,83 ribu ton. Produksi padi di Provinsi Banten Tahun 2020 jika dikonversikan menjadi beras dengan angka konversi GKG ke beras Tahun 2020 setara dengan 937,82 ribu ton beras.

Tabel 2. 73
Penggunaan Irigasi Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 (Hektar)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		IRIGASI	NON IRIGASI	JUMLAH	IRIGASI	NON IRIGASI	JUMLAH	IRIGASI	NON IRIGASI	JUMLAH
1	Kab. Pandeglang	22.746	32.022	54.768	22.746	32.022	54.768	20.491	32.149	52.640
2	Kab. Lebak	22.747	25.006	47.753	22.747	25.006	47.753	23.095	24.651	47.746
3	Kab. Tangerang	23.744	12.487	36.231	23.744	12.487	36.231	23.745	12.350	36.095
4	Kab. Serang	23 887	23 687	47 574	23 887	23 687	47 574	26.154	21.419	47.573
5	Kota Tangerang	316	147	463	316	147	463	237	115	351
6	Kota Cilegon	-	1.503	1.503	-	1.503	1.503	-	1.445	1.445
7	Kota Serang	4.787	3.152	7.939	4.787	3.152	7.939	4.787	3.152	7.939
8	Kota Tangerang Selatan	-	54	54	-	54	54	-	21	21
PROVINSI BANTEN		98.228	98.058	196.285	98.227	98.058	196.285	98.508	95.302	193.810

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Penambahan luas tanam dan panen harus diusahakan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi tersier, pembuatan embung dan pompanisasi secara merata di semua sentra produksi. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel di atas terlihat bahwa sistem pengairan berupa irigasi dari tahun ke tahun menjadi paling diandalkan, walaupun perbedaan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Lebih lanjut penggunaan lahan tanaman pangan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan jumlah, dengan dominasi tertinggi penggunaan tegal/kebun sebesar 155.922 Ha di tahun 2020 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 74
Penggunaan Lahan Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 (Hektar)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN	TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN	TEGAL/ KEBUN	LADANG/ HUMA	SEMENTARA TIDAK DI USAHAKAN
1	Kab. Pandeglang	63.331	31.408	4.990	63.331	31.408	4.990	85.502	42.631	23.675
2	Kab. Lebak	19.062	28.131	2.772	19.062	28.131	2.772	31.753	28.266	42.390
3	Kab. Tangerang	9.241	-	1.202	9.241	-	1.202	9.498	-	1.366
4	Kab. Serang	19.266	7.296	631	19.266	7.296	631	19.335	5.901	2.291
5	Kota Tangerang	546	36	246	546	36	246	514	-	229
6	Kota Cilegon	2.715	1.871	1.133	2.715	1.871	1.133	2.678	1.859	1.883
7	Kota Serang	7.279	1.723	-	7.279	1.723	-	6.054	2.805	-
8	Kota Tangerang Selatan	478	375	23	478	375	23	588	137	340
JUMLAH		121.918	70.839	10.997	121.918	70.840	10.997	155.922	81.599	72.174

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Berikut Status Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021.

Tabel 2. 75
Status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2021 (Hektar)

NO	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Ha)	Perda LP2B Provinsi Banten	BPS	Perda RTRW Hasil Revisi	Keterangan	
			2014	2020	2020		
			Luas Pertanian (Ha)	Luas Pertanian (Ha)	Luas Pertanian (Ha)	Perda LP2B	Perda RTRW
1	Kab. Pandeglang	277.000	53.951	22.746	Diatur Perda tersendiri	Perda No. 2 Tahun 2014	
2	Kab. Lebak	330.507,20	4.017	22.747	Belum ada data	Perda No. 2 Tahun 2014	Perda No. 3 Tahun 2016
3	Kab. Tangerang	103.454	29.295	23.744	12.628	Perda Nomor 9 Tahun 2020	
4	Kab. Serang	147.214	41.098	23.887	28.084,29	Perda Nomor 5 Tahun 2020	
5	Kota Tangerang	17.835	93	316	-	Perda Nomor 6 Tahun 2019	
6	Kota Cilegon	16.259	1.736	-	Diatur Perda tersendiri	Perda Nomor 1 Tahun 2020	
7	Kota Serang	26.618	3.022	4.787	3.022	Perda Nomor 8 Tahun 2020	
8	Kota Tangerang Selatan	16.485,47	29.295	-	-	Perda Nomor 9 Tahun 2019	
Provinsi Banten		935.372,67	128.604	93.440	40.712,29		

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Jika mencermati pada tabel di bawah terlihat bahwa produksi jagung mengalami penurunan dari 111.903 ton di tahun 2019 menjadi 58.662 ton pada tahun 2020, hal ini berbanding lurus dengan luas panen yang mengalami penurunan lebih kurang sebesar 53 persen dari 16.676 Ha di tahun 2020 menjadi 8.891,90 Ha pada tahun 2021. Dari 2 (dua) tahun berturut-turut Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mengungguli Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Provinsi Banten lainnya.

Tabel 2. 76
Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2020-2021

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2020				TAHUN 2021			
		PADI		JAGUNG		PADI		JAGUNG	
		LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (TON)
1	Kab. Pandeglang	82.104,95	444.025,80	9.581	60.626	85.803,82	437.039,60	5.829,70	37.182
2	Kab. Lebak	81.413,36	402.870,63	5.763	42.560	75.274,36	381.865,96	1.310,90	9.792
3	Kab. Tangerang	63.037,16	328.825,23	72	471	65.604,63	344.358,35	61,8	415
4	Kab. Serang	82.397,42	391.973,23	1.227	8.027	79.139,26	388.165,31	1647	11.025
5	Kota Tangerang	822,73	4.747,24	-	-	594,57	3.501,39	-	-
6	Kota Cilegon	1.895,05	9.714,09	14	97	1.699,83	9.187,08	18	126
7	Kota Serang	13.662,57	73.013,87	15	93	11.441,96	65.530,58	21,5	100
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	4	28	-	-	3	21
PROVINSI BANTEN		325.333,24	1.655.170,09	16.676	111.903	319.558,43	1.629.648,27	8.891,90	58.662

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Hal demikianpun terjadi untuk produksi padi di wilayah Provinsi Banten. Sementara itu untuk jenis tanaman lainnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel bahwa produksi terhadap komoditas padi dan ubi jalar mengalami peningkatan di tahun 2020 dibandingkan komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu. Pada tahun 2020, padi masih menjadi tanaman pangan dengan produksi tertinggi sebesar 1.655.170 ton, diikuti dengan jagung dan ubi kayu berturut-turut sebesar 113.045 ton dan 59.543 ton.

Tabel 2. 77
Statistik Tanaman Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2020

JENIS TANAMAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
PADI				
Luas Panen (Ha)	415.687	334.839	303.732	325.333
Produksi (Ton)	2.369.731	1.643.046	1.470.503	1.655.170
Produktivitas (Kw/Ha)	56,31	49,07	48,41	50,88
JAGUNG				
Luas Panen (Ha)	16.018	66.356	22.346	16.676
Produksi (Ton)	63.518	331.865	119.206	113.045
KEDELAI				
Luas Panen (Ha)	1.646	23.594	1803	578
Produksi (Ton)	2.126	18.094	1202	911
KACANG TANAH				
Luas Panen (Ha)	5.423	4.174	3.399	3.757
Produksi (Ton)	5.727	5.042	3.941	4.528
KACANG HIJAU				
Luas Panen (Ha)	296	347	958	289
Produksi (Ton)	221	281	736	401
UBI KAYU				
Luas Panen (Ha)	3.694	3.187	3.165	2.172
Produksi (Ton)	75.486	82.642	70.916	59.543
UBI JALAR				
Luas Panen (Ha)	1.222	1.160	915	967
Produksi (Ton)	20.724	16.471	12.788	15.945

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Sedangkan komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang. Untuk produksi sayur-sayuran, buah-buahan dan jenis biofarmaka di Provinsi Banten menunjukkan peningkatan produksi dengan komoditas andalannya jamur, berbagai jenis cabai, berbagai ragam komoditas rimpang (jahe, kunyit, laos dan kencur) serta buah-buahan (rambutan, nangka, dll) sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 78
Produktivitas Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (Hektar)

NO	KAB/ KOTA	TAHUN 2019					TAHUN 2020				
		BAWANG	CABAI	KENTANG	KUBIS	PETAI	BAWANG	CABAI	KENTANG	KUBIS	PETAI
1	Kab. Pandeglang	44	473	1	3	73	15	491	-	-	73
2	Kab. Lebak	1	263	1	-	32	1	228	-	2	41
3	Kab. Tangerang	13	68	-	-	355	9	65	-	-	366
4	Kab. Serang	175	483	-	-	282	192	375	-	-	326
5	Kota Tangerang	-	2	-	-	215	-	-	-	-	199
6	Kota Cilegon	-	26	-	-	2	3	39	-	-	9
7	Kota Serang	3	45	-	-	-	3	26	-	-	1
8	Kota Tangerang Selatan	2	35	-	-	21	6	20	-	-	15
PROVINSI BANTEN		238	1.395	2	3	980	229	1.243	-	2	1.030

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Perbedaan potensi dan masalah komoditas pertanian unggulan di setiap wilayah mengakibatkan terbentuknya pola aliran komoditas (*commodity flows*) yang memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar wilayah. Dalam hal ini hubungan koleksi dan distribusi komoditas pertanian unggulan, di suatu wilayah ada yang menjadi daerah pemasaran dan sekaligus juga sebagai daerah produksi, ataupun salah satu diantaranya.

Tabel 2. 79
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021*	
		LUAS PANEN (HA)	PROUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PROUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)
1	Bawang Daun	78	4.138	43	2.744	49	2.584
2	Bawang Merah	238	15.446	229	14.041	357	11.896
3	Bawang Putih	-	-	-	-	4	6
4	Bayam	1.496	80.183	1.586	90.354	1.677	89.722
5	Blewah	-	-	1	20	-	-
6	Buncis	23	999	20	633	12	551
7	Cabai Besar	851	71.035	717	69.469	745	63.856
8	Cabai Rawit	544	50.194	528	58.610	456	39.931
9	Jamur	24.683	163.258	63.818	235.686	14.581	17.589
10	Kacang Merah	-	-	-	-	-	-
11	Kacang Panjang	1.188	119.475	1.386	160.558	1.142	143.659
12	Kangkung	1.729	107.011	1.976	132.435	1.918	123.883
13	Kembang Kol	1	10	3	44	5	870

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021*	
		LUAS PANEN (HA)	PROUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PROUKSI (KUINTAL)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI (KUINTAL)
14	Kentang	2	130	-	-	1	40
15	Ketimun	1.343	137.122	1.482	193.246	1.292	178.576
16	Kubis	3	206	2	25	6	510
17	Labu Siem	21	908	15	2.250	14	329
18	Lobak	-	-	-	-	-	-
19	Melon	47	3.683	76	5.162	24	1.692
20	Paprika	-	-	-	-	-	-
21	Petsai/Sawi	980	74.028	1.030	70.539	986	67.858
22	Semangka	91	13.595	172	34.376	124	8.374
23	Stroberi	-	-	-	-	1	64
24	Terung	535	50.422	592	70.211	484	53.866
25	Tomat	153	8.298	220	18.935	178	11.901
26	Wortel	37	3.001	17	1.242	16	2.156

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Hubungan keterkaitan aliran komoditas pertanian unggulan antar daerah/wilayah di Provinsi Banten, terjadi baik antar daerah internal maupun dengan daerah luar (*external region*). Interaksi antar wilayah ini terjadi karena adanya saling melengkapi kebutuhan. Pada satu daerah ada yang kelebihan produksi (*surplus*) suatu komoditas, sedangkan daerah lainnya kekurangan (*minus*) produksi komoditas tersebut.

Tabel 2. 80
Produksi Tanaman Buah buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN		
		2019	2020	2021*
1	Alpukat	20.468	20.192	14.444
2	Anggur	-	7	80
3	Apel	1	-	-
4	Belimbing	15.627	17.590	14.493
5	Duku	18.564	32.592	20.233
6	Durian	464.360	324.882	294.561
7	Jambu Air	28.062	72.785	48.573
8	Jambu Biji	40.675	66.893	51.637
9	Jengkol	63.565	122.021	86.051
10	Jeruk Besar	1.186	3.789	688
11	Jeruk Siam	.	.	.
12	Mangga	5.995	7.116	9.747
13	Manggis	385.710	287.191	227.133
14	Markisa	102.692	127.935	49.339
15	Melinjo	271	696	-
16	Nangka	545.292	495.665	476.802
17	Nenas	48.524	62.898	59.296

NO	JENIS TANAMAN	TAHUN		
		2019	2020	2021*
18	Pepaya	5.055	3.691	3.883
19	Petai	137.454	207.982	198.398
20	Pisang	107.406	119.965	106.575
21	Rambutan	2.573.421	2.902.658	2.846.834
22	Salak	172.180	223.209	313.960
23	Sawo	4.000	9.237	13.717
24	Sirsak	16.943	39.101	22.954
25	Sukun	31.368	48.232	39.477

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan suatu identifikasi pola ruang aliran komoditas pertanian unggulan di Provinsi Banten. Hal ini cepat atau lambat akan berdampak bagi kelangsungan perkembangan Provinsi Banten.

Tabel 2. 81
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

NO	JENIS TANAMAN	2019		2020		2021*	
		LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)	LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)	LUAS PANEN (M ²)	PRODUKSI (KG)
1	Dlingo	900	670	2.350	1.320	-	-
2	Jahe	401.218	847.959	613.898	1.176.816	1.112.030	1.926.635
3	Kapulaga	66.832	59.115	116.613	94.912	82.732	76.704
4	Keji Beling	8.272	22.262	8.602	9.439	-	-
5	Kencur	332.640	538.215	739.931	1.004.477	1.081.566	1.748.971
6	Kunyit	428.478	1.004.713	324.448	1.185.735	303.993	667.836
7	Laos	436.717	1.708.473	692.600	2.092.990	928.490	2.635.336
8	Lempuyang	8.219	9.281	32.772	133.957	28.349	37.451
9	Lidah Buaya	1.928	4.359	4.744	5.685	2.229	1.556
10	MahKota Dewa	5.058	124.577	2.687	63.169	2.205	64.578
11	Mengkudu	100.520	141.251	22.611	50.524	47.941	51 692
12	Sambiloto	1.275	4.585	20.960	9.040	1.833	3.549
13	Temuireng	5.201	5.724	3.117	6.033	6.597	7.329
14	Temukunci	10.218	5.980	22.688	86.247	18.795	60.235
15	Temulawak	2.131	3.975	36.261	52.058	22.846	24 867

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Salah satu parameter penting pada subsektor peternakan adalah parameter pemotongan ternak. Dengan parameter pemotongan ternak yang dikaitkan dengan jumlah ternak pada RPH/TPH, dapat diketahui berapa besar produksi daging hasil pemotongan di suatu wilayah. Jumlah unit pemotongan ternak atau RPH/TPH pada Tahun 2020 ada sebanyak 21 unit yang tersebar di Provinsi Banten.

Tabel 2. 82
Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
Provinsi Banten Tahun 2020-2021 (Kg)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2020			TAHUN 2021*		
		SAPI	KAMBING	DOMBA	SAPI	KAMBING	DOMBA
1	Kab. Pandeglang	265.170	26.819	14.766	276.725	29.229	15.857
2	Kab. Lebak	1.039.855	316.085	446.533	1.048.697	317.338	449.285
3	Kab. Tangerang	1.622.813	558.825	1.529.967	2.015.602	596.500	922.900
4	Kab. Serang	1.059.770	716.898	900.213	1.065.890	358.890	922.900
5	Kota Tangerang	8.610.379	1.177.849	77.876	8.634.868	589.795	79.286
6	Kota Cilegon	742.951	49.271	-	743.688	25.053	-
7	Kota Serang	2.324.133	96.081	60.525	2.334.182	98.124	61.667
8	Kota Tangerang Selatan	4.697.820	26.938	32.570	4.442.499	13.576	33.778
PROVINSI BANTEN		20.362.891	2.968.766	3.062.450	20.562.151	2.028.505	2.485.673

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Produksi daging ternak seperti sapi, kambing dan domba di Provinsi Banten masih menjadi 3 jenis hewan yang primadona bagi masyarakat. Terdata bahwa pada tahun 2021 adanya peningkatan produksi daging ternak sapi sebesar 199.260 kg, yaitu dari produksi sebesar 20.362.891 kg di tahun 2020 menjadi 20.562.151 kg pada tahun 2021. Sementara itu untuk tahun 2021 disusul oleh produksi daging jenis domba dan kambing, dengan besaran secara berturut-turut yaitu 2.485.673 kg dan 2.028.505 kg, walaupun jenis daging tersebut mengalami penurunan produksi dari tahun 2020 ke tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di atas.

Tabel 2. 83
Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (Kg)

KAB/KOTA	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK	AYAM KAMPUNG	AYAM PETELUR	AYAM PEDAGING	ITIK
Kab. Pandeglang	335.560	137.845	8.393.321	22.847	583.799	14.198	9.311.482	22.098
Kab. Lebak	1.734.384	23.888	8.174.694	24.565	1.714.448	24.082	8.174.694	24.565
Kab. Tangerang	826.904	2.317.883	31.079.980	73.886	890.031	2.363.032	30.956.563	81.325
Kab. Serang	387.929	195.848	20.959.292	686.830	179.001	138.258	13.243.606	854.574
Kota Tangerang	458.571	328.109	65.430.584	218.764	380.704	47.623	67.555.377	46.610
Kota Cilegon	114.113	-	404.387	1.590	257.718	-	2.284.673	7.801
Kota Serang	-	21.173	512.779	22.471	59.117	16.085	9.684.970	5.522
Kota Tangerang Selatan	69.513	61.562	24.046.786	145.015	144.962	88.343	17.752.520	283.046
PROV BANTEN	3.926.973	3.086.307	159.001.823	1.195.968	4.209.781	2.691.621	158.963.884	1.325.542

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Lebih lanjut di tabel di atas menginformasikan terhadap produksi daging dan telur yang dihasilkan dari hewan ternak jenis

unggas Tahun 2019-2020 di Provinsi Banten. menggambarkan produksi daging unggas di Provinsi Banten pada tahun 2020 jenis ayam pedaging mencatatkan produksi daging yang lebih besar daripada jenis ternak lainnya seperti ayam kampung, ayam petelur, dan itik. Besaran produksi ayam pedaging di tahun 2020 mengalami penurunan lebih kurang sekitar 37.939 kg yaitu dari 159.001.823 kg (tahun 2019) menjadi 158.963.884 kg (tahun 2020), walaupun demikian produksi daging unggas tahun 2020 tersebut lebih besar daripada tahun 2018 yang hanya menghasilkan produksi sebesar 124.529.829 kg. Sementara itu untuk komoditas telur di tahun 2020 produksi tertinggi tentunya dihasilkan dari jenis ternak ayam telur sebesar 59.356.052.541 kg dibandingkan ayam kampung dan itik, untuk lebih jelasnya dapat melihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 84
Produksi Telur Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (Kg)

NO	KAB/KOTA	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		AYAM KAMPUNG	AYAM TELUR	ITIK	AYAM KAMPUNG	AYAM TELUR	ITIK
1	Kab. Pandeglang	340.053.000	1.781.894.000	346.470.000	657.498.848	193.685.872	445.079.637
2	Kab. Lebak	781.890.000	1.196.331.000	560.194.000	816.410.000	1.045.629.000	640.594.000
3	Kab. Tangerang	4.170.155.000	35.867.704.000	3.251.991.000	4.128.453.450	35.509.026.960	3.219.758.859
4	Kab. Serang	1.560.000.000	13.878.274.000	7.673.486.000	2.329.877.000	15.472.188.000	7.772.529.000
5	Kota Tangerang	113.416.680	-	224.944.996	113.417.000	-	224.945.000
6	Kota Cilegon	100.498.000	5.834.000	76.451.000	5.373.266	261.803	4.104.320
7	Kota Serang	816.001.000	7.386.011.000	192.975.000	525.256.215	6.273.253.027	334.060.594
8	Kota Tangerang Selatan	59.177.000	887.545.000	16.490.000	82.399.000	862.007.879	16.401.963
PROVINSI BANTEN		7.941.190.680	61.003.593.000	12.343.001.996	8.658.684.779	59.356.052.541	12.657.473.373

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

d. Bidang Urusan Kehutanan

Berbicara urusan kehutanan di Provinsi Banten, sebagaimana dalam Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan RTRW Provinsi Banten terdapat kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pada pola ruang di Provinsi Banten terdapat kawasan hutan lindung yang memiliki luas lebih kurang sebesar 10.387,29 Ha yang tersebar berada di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Juga terdapat kawasan Taman Hutan Raya Banten dengan luas lebih kurang sebesar 1.595,90 Ha yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang (Gunung Asepun) dan Kawasan

Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita di wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dengan luas lebih kurang sebesar 1.505,65 Ha.

Tabel 2. 85
Capaian Terkait Kehutanan Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	1417,33	1431,23	1841
2	Pengembangan Perhutanan Sosial	Ha	0	0	0
3	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	1	1	1

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Lebih daripada itu pada pola ruang di Provinsi Banten dalam aturan yang sama juga terdapat kawasan dengan peruntukan hutan produksi lebih kurang 84.217,45 Ha yang terbagi menjadi 39.008,40 Ha hutan produksi terbatas dan 45.209,04 Ha sebagai hutan produksi tetap.

Tabel 2. 86
Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2018-2021 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Rasio Cakupan Tutupan Hutan (%)	32,41	39,53	45,46	45,99

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel di atas adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan kehutanan Tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal positif ditunjukkan dengan rasio cakupan tutupan hutan yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2. 87
Indikator Pelayanan Umum Bidang Urusan Kehutanan Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
1	Luas Sempadan Pantai	Ha	3.202,73	3.202,73	3.202,73
2	Luas Sempadan Sungai	Ha	27.195,73	27.195,73	27.195,73
3	Luas Kawasan SekitarDanau/ Waduk	Ha	493,31	493,31	493,31
4	Luas Kawasan Suaka Alam	Ha	5.095,05	5.095,05	5.095,05
5	Luas Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Ha	2.992,32	2.992,32	2.992,32
6	Luas Taman Nasional	Ha	137.708,46	137.708,46	137.708,46
7	Luas Taman Hutan Raya	Ha	1.595,90	1.595,90	1.595,90
8	Luas Taman Wisata Alam	Ha	1.248,15	1.248,15	1.248,15
9	Luas Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan	Ha	6.069,78	6.069,78	6.069,78
10	Luas Kawasan Hutan Suaka Alam	Ha	3.542,70	3.542,70	3.542,70

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN		
			2018	2019	2020
11	Luas Kawasan Hutan Pelestarian Alam	Ha	140.552,51	140.552,51	140.552,51
12	Luas Hutan Lindung	Ha	10.396,78	10.396,78	10.396,78
13	Luas Hutan Produksi	Ha	25.639,88	25.639,88	25.639,88
14	Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Ha	58.647,67	58.647,67	58.647,67
15	Luas Hutan Ulayat/Adat	Ha	5.587,00	5.587,00	5.587,00
16	Perusahaan yang Memiliki HPH	Perusahaan/Ha	1	1	1
17	Kawasan Hutan yang dikelola Rakyat	Kel/Ha	0	0	841/195.274,87
18	Kayu Dicuri	m3/Rp/Kasus	0	3,60 / 7.200.000 / 2	0
19	Luas Kerusakan Hutan Kawasan	Ha	0	100,30	0
20	Luas Kawasan Hutan Reklamasi	Ha	0	0	0
21	Luas Kawasan Hutan Reboisasi	Ha	234,76	100,35	329,50
22	Kebakaran Hutan	Ha/Org/Rp	0	100,30	0
23	Produksi Dan Nilai Hasil Hutan Kayu	Rp/m3	21.542,562	31.580,987	10.315,147
24	Produksi Dan Nilai Hasil Hutan Non Kayu	Rp/Batang /Kg/Ton	14.079.738.741	0	0

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Produksi hasil hutan yang berupa kayu di Provinsi Banten pada tahun 2021 berupa kayu bulat sebanyak 16,10 ribu m3 yang terdiri dari kayu jati dan kayu rimba. Produksi kayu jati pada tahun 2021 lebih kurang sebesar 6,36 ribu m³, dengan nilai produksi 11,09 miliar rupiah, sedangkan di tahun yang sama produksi kayu rimba sebesar 9,75 ribu m³ dengan nilai 2,13 miliar rupiah sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2. 88
Produksi Kayu Jati dan Kayu Rimba Tahun 2016-2021

TAHUN	KAYU JATI		KAYU RIMBA	
	PRODUKSI (m ³)	NILAI PRODUKSI (RP)	PRODUKSI (m ³)	NILAI PRODUKSI (RP)
2016	2.192,24	4.671,00	3.131,88	1.855,00
2017	11.694,52	27.886,79	5.865,35	1.951,57
2018	14.178,38	22.963,48	7.364,19	2.272,87
2019	17.033,71	26.438,44	13.711,34	3.772,52
2020	14.543,84	19.066,40	5.370,50	1.129,78
2021	6.357,37	11.098,87	9.751,19	2.128,87

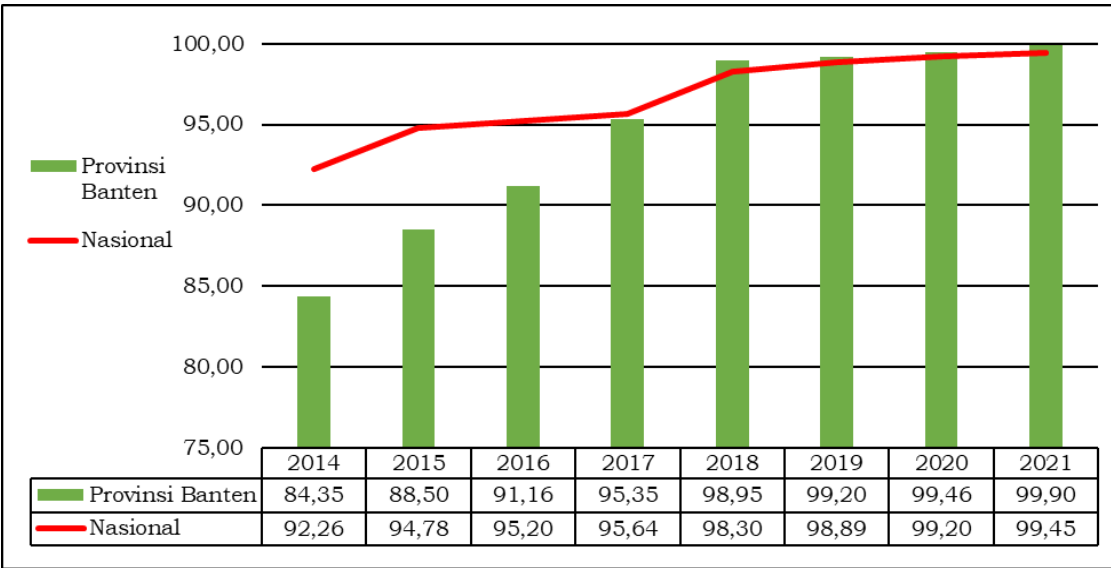
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

e. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk wilayah Provinsi Banten tapi juga untuk wilayah

Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Provinsi Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT. Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Provinsi Banten dilakukan oleh PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Gambar di bawah menunjukkan realisasi rasio elektrifikasi antara Provinsi Banten dengan Nasional, diketahui bahwa di Tahun 2021 Provinsi Banten telah mencatatkan realisasi rasio elektrifikasi lebih kurang sebesar 99,90 persen. Sementara itu dalam siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26.Pers/04/SJJI/2022 tanggal 18 januari 2022 menginformasikan bahwa realisasi rasio elektrifikasi nasional di tahun 2021 sebesar 99,45 persen. Meskipun capaian rasio elektrifikasi Provinsi Banten sudah tinggi, namun berdasarkan survey ulang di semua wilayah Kabupaten/Kota terhadap jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah dan belum mendapatkan akses energi listrik, dihasilkan bahwa data rasio elektrifikasi Provinsi Banten justru mengalami penurunan, sehingga capaian rasio elektrifikasi hanya sebesar 97,41 persen. Keberadaan data mutakhir baseline Rasio Elektrifikasi tahun 2021 tersebut membuat data-data hasil pengukuran di tahun 2018-2020 tidak digunakan lagi sebagai acuan.



Gambar 2. 2
Perkembangan Perbandingan Realisasi Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten dengan Nasional Tahun 2014-2021
(Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022)

Lebih lanjut di tahun 2021 sebagaimana data yang disajikan pada tabel di bawah distribusi penerangan rumah tangga antara listrik dan bukan listrik di wilayah Provinsi Banten belum merata, masih ada sebesar 0,45 persen rumah tangga belum teraliri listrik yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang. Kedepannya Pemerintah Provinsi Banten akan terus berupaya serta berakselerasi mengembangkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar, seperti energi biomasa, energi mikro hidro, energi gelombang, energi angin, dan energi surya, yang kesemuanya apabila dikembangkan sebagai energi primer untuk membangkitkan tenaga listrik juga dapat mendatangkan devisa serta hilir dari cita-cita tersebut membantu Pemerintah Pusat dalam Program Diversifikasi Energi.

Tabel 2. 89							
Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga Tahun 2020-2021 (Persen)							
NO	KABUPATEN/ KOTA	2020			2021		
		LISTRIK	BUKAN LISTRIK	JUMLAH	LISTRIK	BUKAN LISTRIK	JUMLAH
1	Kab. Pandeglang	100	0	100	100	0	100
2	Kab. Lebak	98,54	1,46	100	99,55	0,45	100
3	Kab. Tangerang	100	0	100	100	0	100
4	Kab. Serang	99,75	0,25	100	100	0	100
5	Kota Tangerang	100	0	100	100	0	100
6	Kota Cilegon	100	0	100	100	0	100
7	Kota Serang	100	0	100	100	0	100
8	Kota Tangerang Selatan	100	0	100	100	0	100
PROVINSI BANTEN		99,82	0,18	100	99,55	0,45	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Tabel di bawah adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan energi dan sumber daya mineral tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pada tahun 2021 indikator Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB mengalami penurunan realisasi sebesar 0,07 persen dari 0,68 persen (tahun 2020) menjadi 0,61 persen, hal ini dimungkinkan terjadi akibat ketidakpastian hukum terkait kewenangan provinsi di sub sektor mineral dan batubara pasca terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang menghapus semua kewenangan provinsi dalam pengelolaan mineral

dan batubara, hal tersebut berdampak kepada tidak dapat dilaksanakannya pelaksanaan program dan kegiatan terkait mineral dan batubara di tahun 2021.

Tabel 2. 90
Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral (%)	12,50	18,43	-	-
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	-	-	0,68	0,61

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Pada Tahun 2020, jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Banten sebanyak 182 perusahaan, dimana yang terbanyak adalah perusahaan pertambangan andesit (65 perusahaan), pasir darat (48 perusahaan), dan pasir kuarsa (18 perusahaan). Dilihat dari luas wilayah penambangannya, bahan tambang jenis pasir laut memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 26,88 ribu Ha. Sementara itu, dari jumlah produksinya, andesit memiliki produksi terbesar yaitu 2,04 juta m³.

Tabel 2. 91
Luas Wilayah Pertambangan Menurut Jenis Bahan Tambang di Provinsi Banten Tahun 2018-2020 (Hektar)

NO	JENIS BAHAN TAMBANG	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	Batu Bara	5.611,00	5.611,00	5.616,00
2	Emas	12.672,20	12.672,20	12.673,20
3	Perak	-	-	-
4	Andesit	1.860,15	2.243,74	2.530,03
5	Zeolit	101,2	101,2	101,2
6	Galena	518	518	518
7	Pasir Darat	313,4	323,4	399,24
8	Pasir Kuarsa	805,4	854,8	1.066,16
9	Pasir Kali (sungai)	-	-	-
		56,8	56,8	66,8
10	Bentonit	237,9	237,9	237,9
11	Tanah Liat	0,9	5,9	5,9
12	Tanah Urug	6.994,20	6.994,20	6.994,20
13	Batu Gamping	384	384	428
14	Tras	10	10	10
15	Pasir Besi	24.013,59	24.013,59	26.886,99
16	Pasir Laut	-	-	-
17	Makadam	5	5	5
18	Feidspar	-	-	-
19	Brekxi Tufaan	-	-	-
20	Seng/Zn	-	-	-
21	Mangan	272	272	272

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Pada tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh pontensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis- jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

Tabel 2. 92
Realisasi Penjualan Gas Kota Triwulanan Pada Tahun 2015-2020
(Meter Kubik)

TAHUN	TRIWULAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
2015	410.337.224	386.537.692	403.030.991	419.104.492	1.619.010.401
2016	394.256.619	385.010.685	339.414.335	347.059.780	1.465.741.419
2017	332.449.891	349.581.054	351.726.889	358.445.347	1.329.203.181
2018	386.633.999	397.717.618	466.648.379	490.462.732	1.741.462.728
2019	384.822.277	353.683.006	408.897.530	388.269.863	1.535.672.677
2020	400.751.805	374.815.046	400.653.703	373.870.877	1.550.091.430

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

f. Bidang Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor potensial besar untuk dikembangkan dikemudian hari dan tentunya dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi bagi wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tabel di bawah menunjukkan realisasi indikator kinerja urusan perdagangan tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Tabel 2. 93
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2021 (Persen)

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	LPE Sektor Perdagangan (%)	10,90	11,27	-2,86	1,84
2	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis (%)	4,00	2,47	-	-
3	Tingkat Inflasi Bahan Pokok (%)	-	-	-2,86	2,43

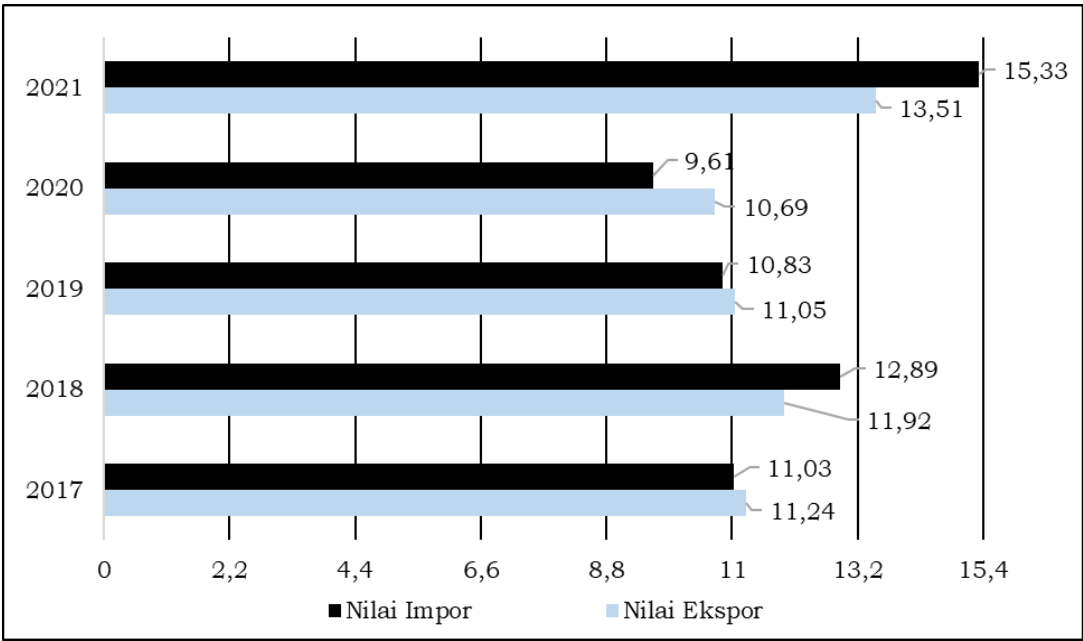
Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022

Nilai ekspor Provinsi Banten Tahun 2021 sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah yaitu lebih kurang sebesar US\$ 13,51 miliar, naik 26,44 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 10,69 miliar. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$ 1.285,36 Juta (99,29 persen), sementara sisanya berasal dari sektor pertanian US\$ 8,12 juta (0,63 persen), migas US\$ 0,87 juta (0,07 persen), serta pertambangan dan lainnya US\$ 0,12 juta (0,01 persen).

Tabel 2. 94
Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Banten
Tahun 2017-2021 (US\$)

TAHUN	NILAI EKSPOR	NILAI IMPOR	EKSPOR NETO
2017	11.238.385.909,72	11.025.951.471,00	212.434.438,72
2018	11.920.744.392,20	12.893.944.591,00	-973.200.198,81
2019	11.045.600.314,12	10.828.507.370,00	217.092.944,12
2020	10.687.431.834,75	9.608.770.455,00	1.078.661.379,74
2021	13.511.511.921,74	15.326.297.768,00	-1.814.785.846,26

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021



Gambar 2. 7
Nilai Ekspor (FOB) dan Nilai Impor (CIF) Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (miliar US\$)
 (Sumber : SIPD Provinsi Banten 2022)

Nilai impor Provinsi Banten tahun 2021 sebesar US\$ 15,33 miliar, naik 59,50 persen dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 9,61 miliar. Sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan bahan penolong sebesar US\$ 1.484,35 Juta (97,39 persen), sedangkan sisanya berupa barang modal US\$ 286,57 juta (1,87 persen) dan barang konsumsi US\$ 113,24 juta (0,74 persen).

Perkembangan nilai ekspor Provinsi Banten pada Bulan November 2021 naik lebih kurang sebesar 19,33 persen dibanding Bulan Oktober 2021, yaitu dari sebelumnya sebesar US\$ 1.117,69 juta menjadi US\$ 1.333,70 juta. Ekspor nonmigas Bulan November 2021 mengalami peningkatan 19,63 persen menjadi US\$ 1.331,78 juta dibanding bulan sebelumnya, berasal dari golongan barang alas kaki (HS 64) yaitu mencapai US\$ 257,73 juta dengan Negara Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor dengan nilai ekspor US\$ 237,25 juta. Selain itu ekspor nonmigas dibulan yang sama juga terjadi peningkatan pada sektor pertanian, sektor industri, serta sektor pertambangan dan lainnya bila dibandingkan bulan sebelumnya dengan nilai ekspor Provinsi Banten di Bulan November 2021 tertinggi melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang mencapai US\$ 1.074,12 juta.

Tabel 2. 95
Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Jenis Produk
Tahun 2018-2021 (US\$)

NO	JENIS PRODUK	NILAI EKSPOR			
		2018	2019	2020	2021
1	Migas	56,38	8,61	2,73	15,45
2	Pertanian	22,55	33,35	71,21	74,36
3	Industri Pengolahan	11.841,25	11.003,04	10.602,49	13.420,15
4	Pertambangan dan lainnya	0,57	0,59	11	15

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Lebih lanjut untuk perkembangan impor di Provinsi Banten pada Bulan November 2021 naik lebih kurang sebesar 21,26 persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari US\$ 1.281,70 juta menjadi US\$ 1.554,24 juta. Di bulan yang sama impor migas naik sebesar 66,16 persen dari US\$ 464,60 juta pada bulan sebelumnya menjadi US\$ 771,97 juta di Bulan November 2021. Sedangkan, pada komoditi nonmigas penurunan nilai impor sebesar 4,26 persen menjadi US\$

782,27 juta, dibanding bulan sebelumnya yakni US\$ 817,10 juta. Sebagai informasi tambahan bahwa nilai impor nonmigas terbesar berasal dari golongan bahan kimia organik (HS 29) yang mencapai US\$ 264,27 juta. Dilihat dari pelabuhan bongkar, nilai impor terbesar berasal dari Pelabuhan Merak yang mencapai US\$ 875,76 juta.

Tabel 2. 96
Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Jenis Produk Barang
Tahun 2018-2021 (juta US\$)

NO	JENIS PRODUK	NILAI IMPOR			
		2018	2019	2020	2021
1	Barang Konsumsi	311,19	208,18	186,80	286,56
2	Bahan Baku dan Bahan Penolong	11.870,45	10.334,75	9.173,30	14.926,49
3	Barang Modal	712,30	285,60	248,50	113,23
JUMLAH TOTAL		12.893,64	10.828,51	9.608,77	15.326,97

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

g. Bidang Urusan Perindustrian

Sektor urusan perindustrian merupakan bagian penting yang memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian bagi wilayah Provinsi Banten, yaitu berada pada kawasan di wilayah utara Provinsi Banten. Sebagaimana yang tertuang dalam pola ruang Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan RTRW, lebih kurang sebesar 54.459,93 Ha diperuntukan sebagai kawasan industri yang tersebar 8 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.

Tabel 2. 97
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2021 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018*	2019*	2020**	2021**
LPE Sektor Perindustrian (%)	6,63	6,02	-4,67	4,93

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Tabel di atas adalah realisasi terhadap indikator kinerja urusan perdagangan tahun 2018-2021 selama masa pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Terinformasikan bahwa LPE Sektor Perindustrian mengalami penurunan di tahun 2019 hingga Tahun 2020 pun demikian hal ini berbanding lurus dengan LPE Sektor Perdagangan yang juga mengalami penurunan di tahun 2020. Penurunan ini dimungkinkan akibat masih berlanjutnya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas sektor perindustrian dan dunia usaha lainnya yang berdampak kepada

terganggunya pencapaian indikator makro Provinsi Banten. Namun demikian di tahun 2021 mulai adanya pertumbuhan positif pada sektor perindustrian yang berimplikasi kepada meningkatnya presentase LPE Sektor Peindustrian.

Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Banten pada tahun 2021 sebanyak 3.429 perusahaan, jumlah terbanyak berlokasi di Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak 1.860 perusahaan (46,22 persen), kemudian di Kota Tangerang sebanyak 824 perusahaan (32,15 persen), dan Kabupaten Serang sebanyak 381 perusahaan (10,56 persen), Kota Tangerang Selatan 196 perusahaan (4,95 persen), Kota Cilegon sebanyak 127 perusahaan (3,52 persen). Sedangkan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Serang masing-masing hanya terdapat 6 perusahaan, 28 perusahaan dan 7 perusahaan.

Tabel 2. 98
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Seding Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	PERUSAHAAN (Unit)	TENAGA KERJA (Jiwa)	NILAI PRODUKSI (RIBU RUPIAH)
1	Kab Pandeglang	6	201	376.377.911
2	Kab Lebak	28	6.236	7.321.353.453
3	Kab Tangerang	1.860	339.615	246.285.358.501
4	Kab Serang	381	295.310	112.628.890.875
5	Kota Tangerang	824	176.598	166.019.743.150
6	Kota Cilegon	127	31.380	134.939.619.394
7	Kota Serang	7	273	786.280.915
8	Kota Tangerang Selatan	196	44.153	30.152.414.467
PROVINSI BANTEN		3.429	893.766	698.510.038.666

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

h. Bidang Urusan Transmigrasi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan transmigrasi merupakan salah satu pada urusan pemerintahan pilihan yang dapat dilaksanakan sesuai potensi daerah. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, menyatakan bahwa transmigrasi adalah perpindahan

penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah, singkatnya adalah perpindahan penduduk dari wilayah padat kepada wilayah yang masih jarang sehingga diperolehnya pemerataan penduduk. Namun demikian sebagai informasi bahwa Provinsi Banten adalah daerah yang bukan termasuk kepada tujuan transmigrasi.

2.2.4 Urusan Penunjang Pemerintahan

Urusan Penunjang Pemerintahan menjadi bagian dalam urusan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

- Perencanaan;
- Keuangan;
- Kepegawaian
- Pendidikan dan pelatihan;
- Penelitian dan pengembangan; dan
- Pengelolaan Penghubung

a. Bidang Urusan Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dimana untuk Bappeda selama beberapa tahun terakhir menyusun dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah yaitu: a) Dokumen Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025; b) Dokumen Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022; c) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022.

Bappeda juga setiap tahunnya menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan pengesahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Setiap tahunnya Bappeda konsisten mengikuti Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas dan juga sekaligus menjadi indikator kinerja Bappeda.

Tabel 2. 99
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (%)	54.17	58.33	83.33	70,83
2	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja (Nilai)	B	B	B	B

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Pada tahun 2020 Provinsi Banten berhasil masuk dalam 10 besar nominasi dari Bappenas untuk Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan mendapatkan Dana Insentif Daerah. Untuk selanjutnya terjadi penurunan kesesuaian kriteria yang disebabkan kualitas dokumen perencanaan yang masih perlu banyak perbaikan.

b. Bidang Urusan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga maupun di level pemerintah daerah. Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten telah meraih opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat dianalisa sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 100					
Indikator Kinerja Urusan Keuangan pada BPKAD Tahun 2016-2020					
URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2021

Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem aplikasi terpadu antara e-planning, e-budgeting dan e-monev. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sasaran pada Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya pendapatan daerah yang optimal dengan Indikator kinerja rasio PAD terhadap pendapatan daerah, yang pada tabel di bawah menunjukan bahwa di tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat Covid19 dan pada tahun 2021 rasio PAD sudah di angka 62,69 persen namun sebenarnya masih belum mencapai target tahunan yang menargetkan 63,19 persen.

Tabel 2. 101				
Indiaktor Kinerja Urusan Keuangan pada Bapenda Tahun 2018-2021 (Persen)				
INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	61,25	62,65	56,67	62,69

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

c. Bidang Urusan Kepegawaian

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai menjadi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota dipindahkan ke provinsi. Dengan demikian berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten,

ASN tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK dan sederajat dari Kabupaten/Kota pindah status ke Provinsi sejumlah 5.909 Orang. Pemerintah Provinsi Banten mempunyai jumlah ASN yang cukup memadai, yakni 9.588. Hal ini merupakan potensi human capital yang strategis dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

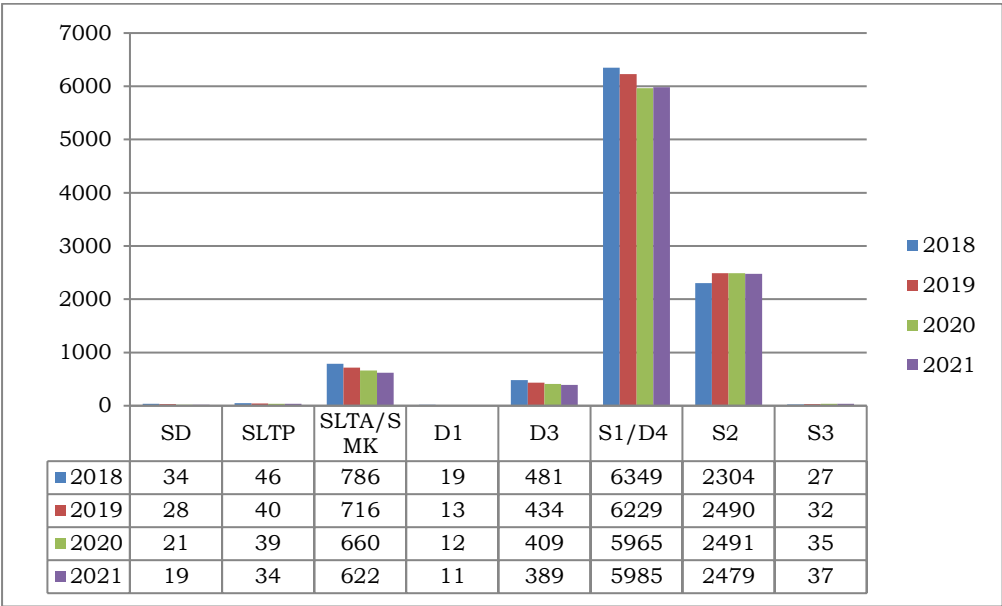
Tabel 2. 102

Jumlah PNS menurut Tingkat Kepangkatan Tahun 2018-2021

NO	GOLONGAN/JABATAN	SATUAN	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
1	Golongan IV	Jiwa	2.563	2.632	2.670	2.846
2	Golongan III	Jiwa	6.652	6.558	6.208	5.990
3	Golongan II	Jiwa	794	735	697	685
4	Golongan I	Jiwa	73	74	71	67
5	Fungsional Umum	Jiwa	3.077	2.839	2.805	2.496
6	Fungsional Tertentu	Jiwa	7.005	6.335	6.070	6.163
7	Struktural	Jiwa	883	825	771	929
8	Eselon II	Jiwa	1	1	1	0
9	Eselon III	Jiwa	41	41	37	41
10	Eselon IV	Jiwa	221	200	198	232
JUMLAH			21.310	20.240	19.528	19.449

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Berdasarkan tabel di atas Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Banten terbesar pada fungsional tertentu, hal ini diperlukan strategi yang tepat sehingga potensi tersebut dapat optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.



Gambar 2.6

ASN Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2018-2020 (Jiwa)

(Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022)

Lebih lanjut tabel dibawah, Tingkat pendidikan ASN Banten jumlahnya besar pada tingkat S1 dan S2, hal ini merupakan potensi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan ASN yang sesuai dengan bidangnya. Pemerintah Provinsi belum menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN atau *Human Capital Development Plan* (HCDP), yang mana hal tersebut diperlukan untuk mengoptimalisasikan kualitas kompetensi ASN Provinsi Banten sehingga dapat mendukung secara signifikan dalam mewujudkan *good governance*.

Tabel 2. 103
Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN			
			2018	2019	2020	2021
1	SD	Jiwa	34	28	21	19
2	SLTP	Jiwa	46	40	39	34
3	SLTA/SMK	Jiwa	786	716	660	622
4	D1	Jiwa	19	13	12	11
5	D3	Jiwa	481	434	409	389
6	S1/D4	Jiwa	6349	6229	5965	5985
7	S2	Jiwa	2304	2490	2491	2479
8	S3	Jiwa	27	32	35	37
Jumlah		Jiwa	10.046	9.982	9.632	9.576

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Pengukuran profesionalitas ASN diukur dari Indeks Profesionalitas ASN yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), tercatat nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 30,77 kategori rendah dimana komponen terendah adalah kinerja, seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2. 104
Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Banten Tahun 2021

INDIKATOR	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI TOTAL
Nilai Indeks Profesionalitas ASN	15,29	9,23	1,28	4,98	30,77 (Rendah)

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

Dari capaian indikator kinerja kepegawaian, masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu peta jalan pengembangan ASN yang belum tersusun. Hal ini digunakan dalam merencanakan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya, memetakan pola pengembangan kapasitas ASN dan merencanakan promosi ASN secara tersistem.

Tabel 2. 105
Indikator Kinerja Bidang Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah ASN Yang Profesional (orang)	950	3000	6400	7816
2	Jumlah ASN Yang Dibutuhkan Berdasarkan Anjab ABK (orang)	289	21368	28190	28866
3	Jumlah ASN Yang Tidak Melanggar Disiplin Dan Kode Etik (orang)	10055	9843	9593	9570
4	Jumlah ASN Provinsi Banten (orang)	10082	9999	9646	9588
5	Jumlah ASN Yang Update Database (orang)	10082	9999	9500	9588
6	Jumlah Nilai Capaian SKP Tahunan Dengan Kategori Baik (%)	90,64	90,00	95,38	92,75
7	Jumlah Capaian Tingkat Pendidikan ASN (%)	79,82	92,16	87,41	88,05
8	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	44	75	4242	8662
9	Jumlah ASN Yang Wajib Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	10082	9999	9646	9588

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2021

d. Bidang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten telah menyelenggarakan diklat struktural dan diklat prajabatan bagi ASN Provinsi Banten sesuai dengan analisis kebutuhan diklat. Dengan diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, BPSDM Provinsi Banten dalam menyelenggarakan diklat harus berdasarkan pada analisis peningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan kelas jabatannya.

Tabel 2. 106
Rekapitulasi Diklat Provinsi Banten pada Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Tahun 2018-2020 (Jiwa)

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA DIKLAT		
		2018	2019	2020
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi Pratama	0	52	0
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Administrator	81	0	0
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pengawas I	313	0	156
4	Diklat Prajabatan Gol III	837	1410	0
5	Diklat Prajabatan Gol II	0	294	0
6	Diklat Teknis Penatausahaan	0	0	0
7	Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja	0	0	0
8	Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	0	0	0
9	Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Daerah	0	0	0
10	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	40	155	193

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH PESERTA DIKLAT		
		2018	2019	2020
11	Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	110	142	255
12	Diklat Pengembangan Kompetensi Fungsional	104	60	0
13	Diklat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	2936	3775	2020
14	Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen	102	139	373
15	Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintah	130	536	124

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

Pada tabel di bawah menunjukan bahwa ASN Provinsi Banten yang sudah mengikuti pengembangan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi atau STTPL mengalami kenaikan dari sebelumnya 1095 orang di tahun 2020 pada 2021 meningkat menjadi 2616. Namun dari total jumlah 9588 ASN angka ini masih belum mencapai setengah dari jumlah ASN Provinsi Banten.

Tabel 2. 107

Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Dan Atau STTPL Tahun 2017-2021 (Jiwa)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah peserta pengembangan kompetensi yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	2.026	1.717	2.788	1.095	2.616
2	Jumlah ASN Provinsi Banten	10.082	10.082	10.001	9.644	9.588

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2022

Berikut ini tabel capaian indikator BPSDM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Namun masih perlu fokus untuk mengejar kenaikan maksimal pada Indeks Profesionalitas ASN komponen kompetensi.

Tabel 2. 108

Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2021 (Persen)

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	17,3	27,88	11,35	24,69

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2021

e. Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator Kinerja fungsi Penelitian dan Pengembangan menunjukan pengembangan. Bidang penelitian dan Pengembangan

di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengampu indikator sasaran daerah Indeks Daya Saing Daerah yang menunjukkan peningkatan dalam hasilnya seperti tabel berikut:.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diikuti mulai tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 yang dinilai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah menunjukkan kenaikan baik nilai maupun leveling. Hal ini akan terus dipertahankan dan dinaikan baik dari segi nilai maupun peringkat nasional.

Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk meningkatnya inovasi daerah, dimana Indeks Inovasi daerah ini dihitung oleh Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan sejak tahun 2019.

Tabel 2. 109
Indeks daya Saing Daerah di Provinsi Banten Tahun 2019-2021

URAIAN	TAHUN		
	2019	2020	2021
Peringkat IDSD	17	5	5
Nilai IDSD	4.0032	3.4263	3.4610
Level	Rendah	Tinggi	Tinggi

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Tercatat pada tahun 2020 nilai indeks inovasi daerah sebesar 8.191 dan di 2021 sebesar 6.052, hal ini menunjukkan penurunan nilai walaupun masih dalam kategori level Inovasi sangat tinggi.

Tabel 2. 110
Peringkat dan Nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Banten Tahun 2019-2021

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Peringkat Inovasi Daerah	6	5	8
Nilai Indeks Inovasi	14.230	8.191	6.052
Jumlah Inovasi yang diajukan	70	173	182
Level	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

f. Bidang Urusan Pengelolaan Penghubung

Indikator kinerja Badan Penghubung diantaranya adalah Capaian Pelayanan Publik Badan Penghubung dalam rangka mengukur kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Badan

Penghubung daerah yang pada Tahun 2017 sampai 2021 mencapai realisasi sebesar 100 persen.

2.2.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Bidang Urusan Sekretaris Daerah

Hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap kualitas SAKIP Provinsi Banten menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Berikut ini data terkait capaian SAKIP Provinsi Banten yang saat ini masih tercatat B atau 65,88.

Tabel 2. 111
Capaian SAKIP Provinsi Banten 2018 - 2021

KOMPONEN SAKIP	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Perencanaan Kinerja	18,56	19,97	20,19	20,29
Pengukuran Kinerja	14,09	15,4	15,92	16,07
Pelaporan Kinerja	9,54	9,76	9,87	9,88
Evaluasi Kinerja	6,33	6,48	7,18	7,34
Capaian Kinerja	11,69	13,95	12,72	12,87
Total	60,2	65,56	65,88	66,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2022

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai 66,45 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Capaian SAKIP dari Tahun 2018-2021 walaupun menunjukkan perbaikan, namun hal ini belum mencapai target RPJMD Provinsi Banten. Dalam dokumen Perubahan RPJMD Banten Tahun 2017-2022 target SAKIP pada tahun 2020 adalah BB.

Hal lainnya terkait Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang

dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dari aspek manajemen pemerintahan, dalam hal ini Provinsi Banten terus mengalami perbaikan. Pada Tahun 2016 capaiannya adalah 2,83 dengan status tinggi dan pada peringkat 16. Adapun pada tahun 2017 capaiannya adalah 2,86 dengan status tinggi dan berada pada peringkat 13. Sedangkan pada tahun 2018 mendapatkan nilai 3,05 dengan status sangat tinggi.

2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 s.d. TW II

Belanja Daerah pada APBD TA 2022 sebesar Rp.11.223.180.236.231,00 Pada triwulan II penyerapan anggaran sebesar Rp.4.054.094.467.706,00 atau mencapai 36,12 persen. Adapun rekapitulasi penyerapan anggaran berdasarkan urusan sampai dengan Triwulan II, sebagai berikut:

Tabel 2. 112
Rekapitulasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Urusan

URUUSAN/BIDANG	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	Persen
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		2.860.290.442.400,00	718.814.567.038,00	25,13
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		2.860.290.442.400,00	718.814.567.038,00	25,13
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.860.290.442.400,00	718.814.567.038,00	25,13
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		1.178.360.505.919,00	486.616.620.805,00	41,30
	Dinas kesehatan	1.178.360.505.919,00	486.616.620.805,00	41,30
Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		1.432.143.845.000,00	369.674.481.228,00	25,81
	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	960.198.845.000,00	102.664.150.392,00	10,69
Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman		444.095.161.000,00	23.788.618.694,00	5,36
	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	444.095.161.000,00	23.788.618.694,00	5,36
Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		62.022.769.000,00	28.094.804.655,00	45,30
	Satuan polisi pamong praja	35.537.925.000,00	17.933.249.012,00	50,46
	Badan penanggulangan bencana daerah	26.484.844.000,00	10.161.555.643,00	38,37
Urusan pemerintahan bidang sosial		89.288.365.000,00	20.080.308.197,00	22,49
	Dinas sosial	89.288.365.000,00	20.080.308.197,00	22,49

URUSAN/BIDANG	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	Persen
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		58.906.826.000,00	28.484.754.080,00	48,36
Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja		58.906.826.000,00	28.484.754.080,00	48,36
	Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi	58.906.826.000,00	28.484.754.080,00	48,36
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		27.533.742.000,00	11.320.896.131,00	41,12
	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana	27.533.742.000,00	11.320.896.131,00	41,12
Urusan pemerintahan bidang pangan		17.770.368.000,00	9.328.279.186,00	52,49
	Dinas ketahanan pangan	17.770.368.000,00	9.328.279.186,00	52,49
Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup		44.821.528.800,00	24.050.808.714,00	53,66
	Dinas lingkungan hidup dan kehutanan	44.821.528.800,00	24.050.808.714,00	53,66
Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		463.278.000,00	85.876.000,00	18,54
	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana	463.278.000,00	85.876.000,00	18,54
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa		18.834.163.000,00	7.966.291.071,00	42,30
	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	18.834.163.000,00	7.966.291.071,00	42,30
Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		1.250.000.000,00	109.385.100,00	8,75
	Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana	1.250.000.000,00	109.385.100,00	8,75
Urusan pemerintahan bidang perhubungan		54.297.231.000,00	24.709.242.835,00	45,51
	Dinas perhubungan	54.297.231.000,00	24.709.242.835,00	45,51
Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika		40.256.440.000,00	20.206.179.987,00	50,19
	Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian	40.256.440.000,00	20.206.179.987,00	50,19
Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah		24.847.260.000,00	10.138.515.061,00	40,80
	Dinas koperasi, usaha kecil dan	24.847.260.000,00	10.138.515.061,00	40,80

URUSAN/BIDANG	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	Persen
	menengah			
Urusan pemerintahan bidang penanaman modal		23.031.508.000,00	10.377.418.388,00	45,06
	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	23.031.508.000,00	10.377.418.388,00	45,06
Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga		61.137.954.000,00	22.402.605.780,00	36,64
	Dinas kepemudaan dan olahraga	61.137.954.000,00	22.402.605.780,00	36,64
Urusan pemerintahan bidang statistik		468.668.000,00	98.518.000,00	21,02
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	468.668.000,00	98.518.000,00	21,02
Urusan pemerintahan bidang persandian		1.461.204.938,00	873.006.000,00	59,75
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	1.461.204.938,00	873.006.000,00	59,75
Urusan pemerintahan bidang kebudayaan		4.828.965.600,00	312.921.500,00	6,48
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.828.965.600,00	312.921.500,00	6,48
Urusan pemerintahan bidang perpustakaan		20.541.225.000,00	9.528.874.967,00	46,39
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	20.541.225.000,00	9.528.874.967,00	46,39
Urusan pemerintahan bidang kearsipan		1.399.000.000,00	105.136.000,00	7,52
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.399.000.000,00	105.136.000,00	7,52
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		78.285.837.000,00	18.405.195.252,00	23,51
Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan		78.285.837.000,00	18.405.195.252,00	23,51
	Dinas Kelautan Dan Perikanan	78.285.837.000,00	18.405.195.252,00	23,51
Urusan pemerintahan bidang pariwisata		52.303.870.000,00	11.082.780.159,00	21,19
	Dinas Pariwisata	52.303.870.000,00	11.082.780.159,00	21,19
Urusan pemerintahan bidang pertanian		88.698.801.000,00	42.034.810.922,00	47,39
	Dinas Pertanian	88.698.801.000,00	42.034.810.922,00	47,39
Urusan pemerintahan bidang kehutanan		5.925.642.200,00	715.815.070,00	12,08
	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	5.925.642.200,00	715.815.070,00	12,08
Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral		39.354.218.000,00	15.560.634.893,00	39,54
	Dinas energi dan sumber daya mineral	39.354.218.000,00	15.560.634.893,00	39,54
Urusan pemerintahan bidang perdagangan		6.480.000.000,00	1.519.441.300,00	23,45
	Dinas perindustrian dan perdagangan	6.480.000.000,00	1.519.441.300,00	23,45
Urusan pemerintahan bidang perindustrian		77.582.234.000,00	16.097.184.397,00	20,75
	Dinas Perindustrian	77.582.234.000,00	16.097.184.397,00	20,75

URUUSAN/BIDANG	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	Persen
	Dan Perdagangan			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		286.475.249.931,00	93.535.135.930,00	32,65
	Sekretariat Daerah	286.475.249.931,00	93.535.135.930,00	32,65
	Sekretariat DPRD	477.786.813.000,00	178.794.099.899,00	37,42
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		45.644.266.000,00	17.995.717.813,00	39,43
Perencanaan		45.644.266.000,00	17.995.717.813,00	39,43
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45.644.266.000,00	17.995.717.813,00	39,43
Keuangan		3.362.725.130.443,00	1.744.103.417.826,00	51,87
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.040.643.516.443,00	1.630.331.789.524,00	53,62
	Badan Pendapatan Daerah	322.081.614.000,00	113.771.628.302,00	35,32
Kepegawaian		39.905.019.000,00	12.771.216.515,00	32,00
	Badan Kepegawaian Daerah	39.905.019.000,00	12.771.216.515,00	32,00
Pendidikan dan pelatihan		57.289.068.000,00	22.442.394.228,00	39,17
	Badan pengembangan sumber daya manusia	57.289.068.000,00	22.442.394.228,00	39,17
Penelitian dan pengembangan		1.735.329.000,00	27.668.000,00	1,59
	Badan perencanaan pembangunan daerah	1.735.329.000,00	27.668.000,00	1,59
Pengelolaan penghubung		8.237.678.000,00	3.655.770.482,00	44,38
	Badan penghubung	8.237.678.000,00	3.655.770.482,00	44,38
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		59.927.967.000,00	30.889.294.442,00	51,54
Inspektorat daerah		59.927.967.000,00	30.889.294.442,00	51,54
	Inspektorat	59.927.967.000,00	30.889.294.442,00	51,54
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		66.772.663.000,00	17.295.781.161,00	25,90
Kesatuan bangsa dan politik		66.772.663.000,00	17.295.781.161,00	25,90
	Badan kesatuan bangsa dan politik	66.772.663.000,00	17.295.781.161,00	25,90
Total		11.223.180.236.231,00	4.054.094.467.706,00	36,12

Sumber: Hasil Olahan Bappeda

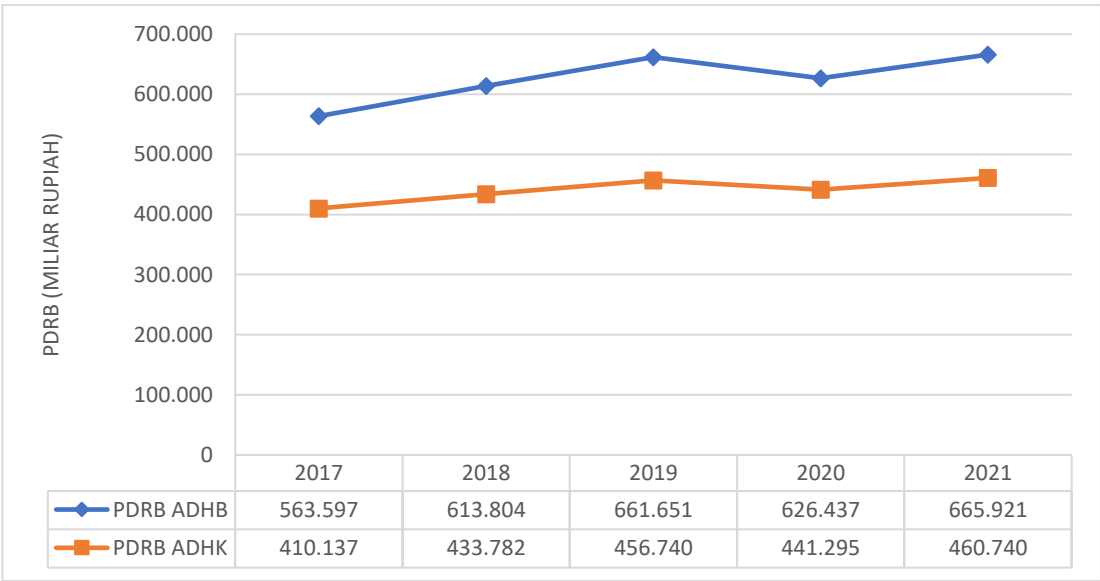
Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2022 pada triwulan II untuk pembangunan fisik, dalam pelaksanaannya sebagian mengalami keterlambatan seiring dengan penyediaan lahan yang masih dalam tahap persiapan. Selain itu, penyelenggaraan Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar diupayakan agar pencapaian target kinerja dan penerapannya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

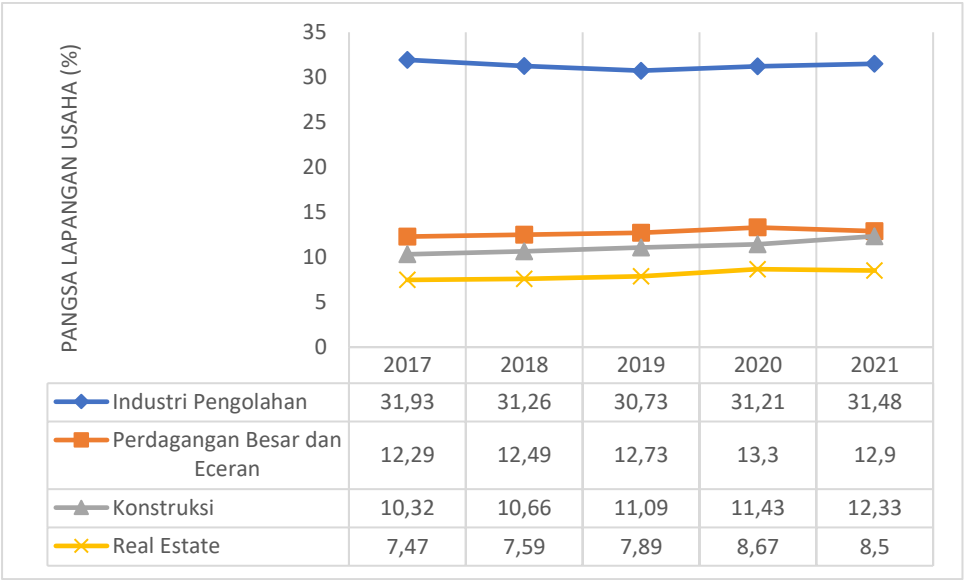
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi Periode 2017-2021

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), perekonomian Banten selalu tumbuh dari tahun ke tahun terkecuali pada tahun 2020 di mana Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Banten tidak tumbuh bahkan mengalami perlambatan atau kontraksi. Kontraksi tersebut berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat sejak diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta terhambatnya kegiatan ekspor impor ke berbagai negara tujuan yang menutup arus barang dan jasa. Akan tetapi, tahun 2021 menandai kebangkitan atau *recovery* perekonomian Banten terlihat dari nilai PDRB yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 atau meningkat 4,4% dan kembali lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,69%. Momentum ini diharapkan terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.



Gambar 3.1
PDRB ADHB dan ADHK (Miliar Rupiah) , 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

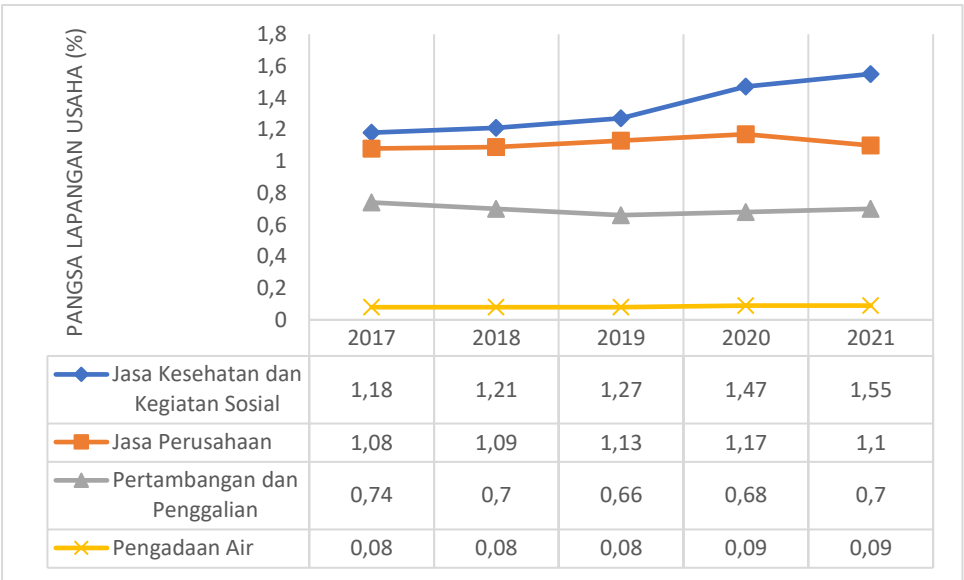
Ada empat sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi perekonomian Banten pada tahun 2021 yaitu industri pengolahan (31,48%), perdagangan (12,9%), konstruksi (12,33%), dan *real estate* (8,5%). Dari tahun ke tahun empat sektor ini secara konsisten memberikan kontribusi terhadap perekonomian Banten. Diharapkan sektor-sektor tersebut dapat terus tumbuh dan meningkatkan perekonomian Banten. Pada tahun 2020, salah satu penyebab dalamnya kontraksi ekonomi di Provinsi Banten salah satunya adalah karena industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Banten terpukul karena industri pengolahan di Banten mayoritas berorientasi ekspor sedangkan di saat yang sama negara-negara tujuan menutup laju barang dan jasa atau pun terbatasnya bahan baku industri yang berasal dari impor.



Gambar 3.2
Kontribusi Empat Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Banten di Tahun 2021 menurut sektor (%) Tahun 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Empat sektor yang memiliki kontribusi terendah bagi perekonomian Banten pada tahun 2021 yaitu jasa kesehatan (1,55%), jasa perusahaan (1,1%), pertambangan (0,7%) dan pengadaan air (0,09%). Empat sektor tersebut diharapkan kedepannya mampu tumbuh sehingga memiliki kontribusi lebih signifikan bagi perekonomian Banten. Jasa kesehatan mempunyai peluang untuk tumbuh lebih pesat mengingat dampak Pandemi Covid-19 yang membuat banyak orang yang lebih memberikan perhatian terhadap

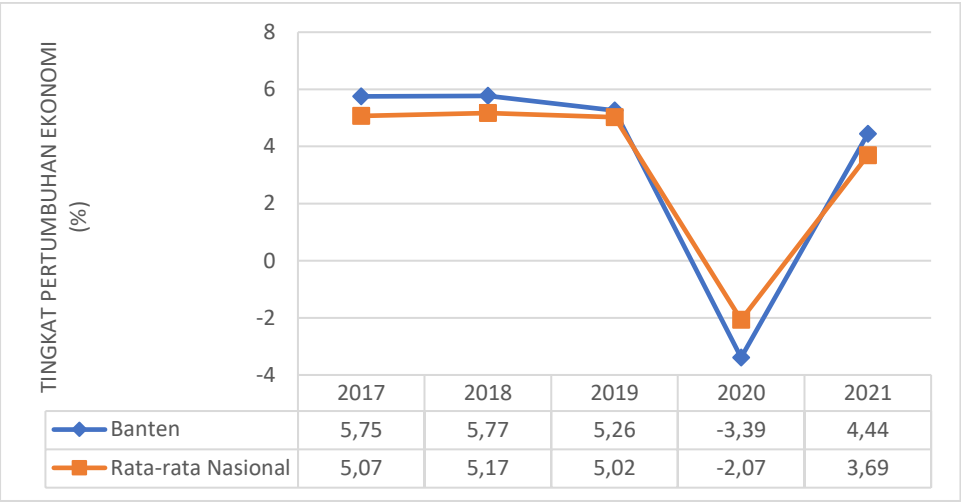
kesehatan. Selain itu kemajuan teknologi pun memungkinkan adanya berbagai inovasi antara kesehatan dan teknologi.



Gambar 3.3
Kontribusi Empat Sektor Terendah terhadap PDRB ADHB Banten
Tahun 2021 menurut sektor (%), 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

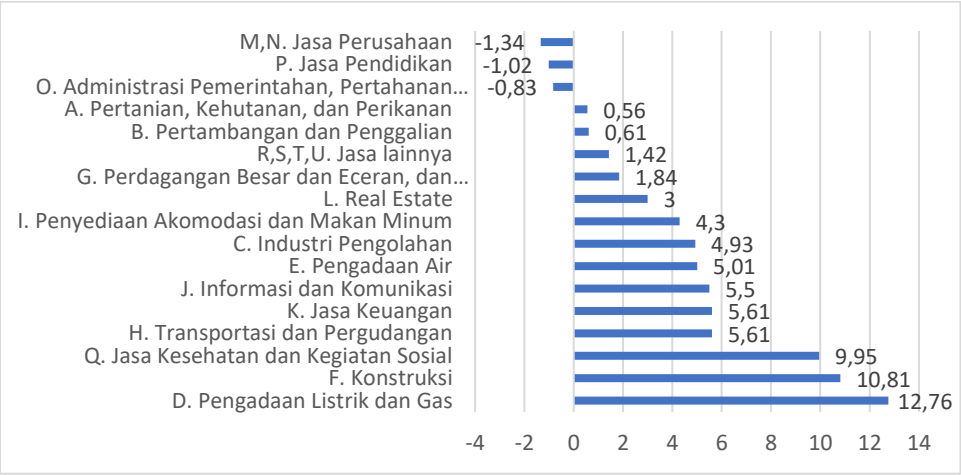
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, LPE Provinsi Banten selalu di atas rata-rata nasional terkecuali pada tahun 2020. Catatan tersebut cukup menggembirakan mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu cara untuk keluar dari *middle-income trap*. Pertumbuhan ekonomi Banten yang selalu di atas rata-rata nasional juga mengindikasikan daya saing Provinsi Banten yang cukup baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Akan tetapi, ada catatan khusus dimana pada tahun 2020 LPE Banten tidak hanya berkontraksi melainkan juga berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini sedikit banyaknya menunjukkan bagaimana ketahanan ekonomi Banten pada saat Pandemi Covid-19 berada di bawah rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah karena Banten sangat bergantung pada industri pengolahan dan industri pengolahan di Banten berorientasi ekspor atau pun bahan baku industri yang berasal dari negara lain sehingga pada saat pandemi sangat terdampak.



Gambar 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Banten, 2017-2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Jika dilihat berdasarkan Lapangan Usaha (LU), maka sektor pengadaan listrik dan gas (12,7%), konstruksi (10,81%), dan jasa kesehatan (9,95%) adalah tiga sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021. Pertumbuhan yang tinggi tersebut merupakan sinyal yang sangat positif mengingat Pandemi Covid-19 belum juga usai. Diharapkan perangkat daerah di Provinsi Banten mampu melihat momentum pertumbuhan tersebut sehingga kedepannya Banten tidak hanya bergantung terhadap sektor industri pengolahan yang secara pertumbuhan memang sangat sulit untuk bisa diatas 5%. Banten perlu sektor-sektor lain yang mampu tumbuh secara akseleratif sehingga diversifikasi sektorpun tercipta di Provinsi Banten guna meningkatkan ketahanan ekonomi Banten.



Gambar 3.5
Pertumbuhan Sektor dalam PDRB menurut Sektor (%), 2021
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Melihat perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan wilayah sekitar, nampaknya pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Banten (kecuali DI Yogyakarta) pasca covid-19 relatif lebih cepat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten tahun 2021 dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa menempati peringkat kedua setelah provinsi DI Yogyakarta.

Tabel 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sekitar

Provinsi	Triw IV-2021 Terhadap Triw III-2021 (<i>q-to-q</i>)	Triw IV-2021 Terhadap Triw IV-2020 (<i>y-on-y</i>)	Laju Pertumbuhan 2021
DKI Jakarta	3,76	3,64	3,56
Jawa Barat	2,76	6,21	3,74
Jawa Tengah	0,67	5,42	3,32
DI Yogyakarta	3,68	2,82	5,53
Jawa Timur	0,14	4,59	3,57
Banten	3,68	5,19	4,44
Pulau Jawa	2,13	4,82	3,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2022

3.1.3 Struktur Pengeluaran Dalam PDRB

Dilihat dari sisi pengeluaran, maka PDRB ADHB Provinsi Banten selalu didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Hal ini menunjukkan besarnya peran masyarakat di dalam menumbuhkan ekonomi di Provinsi Banten juga peran investor baik dalam maupun luar negeri dalam menggerakkan roda perekonomian di Banten. Pemerintah Provinsi Banten harus menjaga daya beli masyarakat serta mendorong masyarakat untuk semakin aktif dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Perlu inovasi untuk mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah Provinsi Banten juga harus mampu menjamin iklim investasi yang baik sehingga investor dalam negeri maupun luar negeri terus masuk dan menanamkan modalnya di Provinsi Banten.

Tabel 3.2
PDRB ADHB Banten menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
Tahun 2017-2021

Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	294.423.894	321.788.260	348.161.125	345.389.383	358.092.732
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	2.541.389	2.803.268	3.063.810	2.922.919	3.015.585
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24.616.489	27.576.242	29.744.841	27.343.037	28.653.303
Pembentukan Modal Tetap Bruto	173.238.150	192.969.560	215.058.258	217.134.782	229.896.995
Perubahan Inventori	65.744	101.164	85.598	13.861	725
Total Ekspor Neto	68.712.034	68.565.920	65.207.708	33.175.363	46.262.577
A. Total Ekspor	422.952.763	449.403.062	449.088.586	413.564.342	477.272.877
B. Total Impor	354.240.729	380.837.142	383.880.878	380.388.979	431.010.300
Jumlah	563.597.700	613.804.414	661.321.341	625.979.345	665.921.915

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Meskipun total ekspor netto memiliki kontribusi yang tidak sebesar pengeluaran konsumsi rumah tangga maupun PMTB, total ekspor dan total impor Provinsi Banten memiliki angka yang cukup besar. Besarnya angka tersebut menggambarkan betapa besarnya aktivitas ekspor impor di Provinsi Banten. Impor di Banten terutama untuk kebutuhan bahan baku industri pengolahan yang nantinya output atau produksi industri pengolahan tersebut akan diekspor dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Pemerintah Provinsi Banten harus memberikan perhatian terhadap kegiatan ekspor impor dengan mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan ekspor impor di Provinsi Banten juga mendorong sektor lain di luar industri pengolahan untuk terlibat dalam kegiatan ekspor impor karena pasar internasional masih sangat terbuka dengan berbagai peluangnya.

Tabel 3.3
Struktur PDRB Banten menurut Pengeluaran (%) Tahun 2017-2021

Pengeluaran	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Provinsi Banten				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	52,24	52,43	52,65	55,18	53,77
Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba	0,45	0,46	0,46	0,47	0,45
Pengeluaran konsumsi pemerintah	4,37	4,49	4,5	4,37	4,3
Pembentukan modal tetap bruto	30,74	31,44	32,52	34,69	34,52
Perubahan Inventori	0,01	0,02	0,01	0	0
Total Ekspor Neto	12,19	11,17	9,86	5,3	6,95
a. Total Ekspor	75,05	73,22	67,91	66,07	71,67
b. Total Impor	62,85	62,05	58,05	60,77	64,72

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

3.1.4 Kerangka Perubahan Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Provinsi Banten mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 dimana dampak pandemi membuat perekonomian Banten berkontraksi cukup dalam hingga ke angka -3,38%. Pada Tahun 2021, perekonomian Banten mampu *rebound* dan tumbuh hingga ke angka 4,44%. Hal ini tidak terlepas dari baiknya tingkat vaksin di Provinsi Banten serta relaksasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat aktivitas perekonomian berangsur pulih ke arah normal. Perbaikan ekonomi pada Tahun 2021 serta awal Tahun 2022 mempengaruhi proyeksi pada Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong:

- Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang Banten pada triwulan I-2022 menunjukkan pertumbuhan positif.
- Periode persebaran COVID-19 Varian Omicron pada awal tahun yang berhasil dikendalikan dengan baik dengan akselerasi mobilitas masyarakat.
- Beberapa sektor utama Banten (industri, perdagangan, konstruksi) sudah kembali ke level pra-pandemi.
- Kurva penambahan kasus harian baru sudah menunjukkan penurunan dari dampak varian omicron. Selain itu, mulai terkendalinya kasus covid-19 di Indonesia, khususnya di

Jawa-Bali, berdasarkan Inmendagri No.29 Tahun 2022 dalam rangka pengendalian covid-19, Banten menerapkan PPKM Level 1 di seluruh Kabupaten/Kota dengan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

- Didukung kenaikan keyakinan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi yang terus menunjukkan perbaikan. Indeks kondisi ekonomi saat ini pada Survei Konsumen (SK) juga sudah tercatat berada pada level optimis pertama kali selama pandemi.

B. Faktor Penahan:

- Pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra dagang Banten masih dibawah prakiraan sebelumnya karena disebabkan oleh dampak tensi geopolitik Rusi-Ukraina yang memperparah gangguan rantai pasokan, lonjakan inflasi, dan memperburuk prospek ekonomi.
- Ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina mempengaruhi perekonomian global melalui tiga jalur: perdagangan, komoditas, dan keuangan.
- Beberapa sektor seperti pertambangan, transportasi, dan jasa perusahaan masih mengalami pola pemulihan yang lebih lambat dan belum kembali ke tingkat pra-pandemi.
- Pergerakan masyarakat Banten telah meningkat sejak Triwulan II 2021, namun kembali menurun pada awal Triwulan III 2021 akibat kebijakan Pembatasan Pergerakan Masyarakat (PPKM) Darurat sejalan dengan peningkatan kasus yang terjadi.

Tabel 3.4
Proyeksi Indikator Makro RKPD dan PRKPD 2022

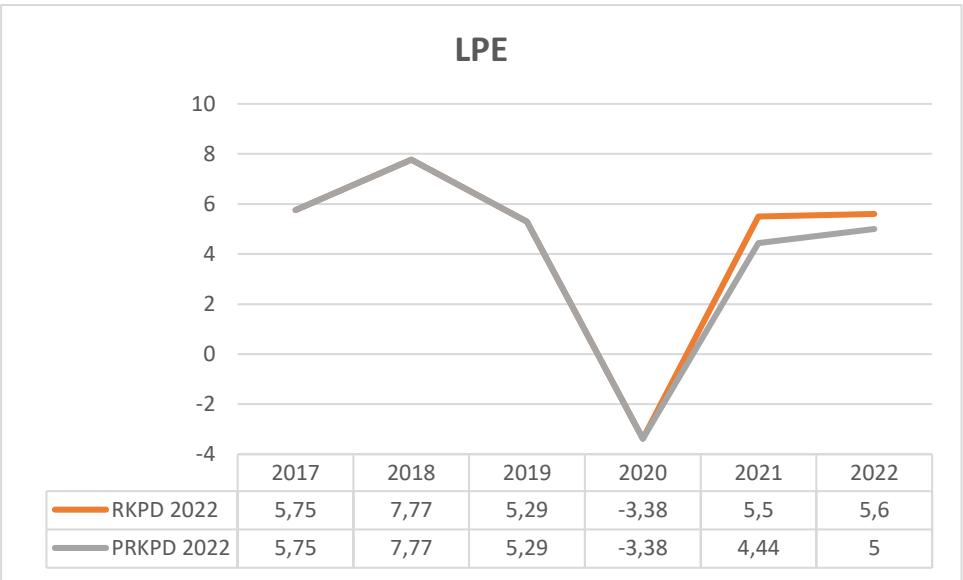
Indikator	Satuan	RKPD 2022		P RKPD 2022	
		2021	2022	2021	2022
1.Pertumbuhan Ekonomi					
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5	5,0-5,6	4,44	5,0-5,6
PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Miliar)			460.740	483.777
PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (Miliar)			665.921	699.2017
2. Inflasi	Persen	2,85 - 3,8	3,4 - 4	3,48	3,4 - 4
3.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,7–10,2	9,7-9,2	8,98	9,7-9,2
Jumlah Penganggur	Orang			562.310	551.063
4.Kemiskinan					
a. Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,06	4,99–5,4	6,50	4,99-5,4
b. Jumlah Penduduk Miskin	Orang			852.280	819.000
5.Indeks Pembangunan Manusia					
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,30	72,60-73,68	72,72	72,60-73,68
b. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun			70,02	70,20
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun			8,93	9,00
d. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun			13,02	13,50
e. Pengeluaran per Kapita	Rp			12.033.000	12.100.000
6.Ketimpangan					
a. Rasio Gini	Indeks	0,374	0,370	0,363	0,370
b. Indeks Ketimpangan Regional	Indeks			0,625	0,623

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada Perubahan RKPD Tahun 2022 memerlukan penyesuaian terutama terkait dengan gap yang terjadi antara proyeksi dengan realisasi untuk Tahun 2021 yang telah tertuang pada RKPD Tahun 2022. Pada RKPD Tahun 2022, LPE Banten diproyeksikan akan mencapai 5,5%, tetapi sayangnya berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS, pertumbuhan ekonomi Banten hanya mampu tumbuh 4,4%. Hal ini terjadi mengingat karakter perekonomian Provinsi Banten yang ditopang oleh industri pengolahan yang membutuhkan waktu untuk pulih. Selain itu, industri pengolahan di Banten mayoritas berorientasi ekspor sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pemulihan seiring belum pulihnya permintaan dunia. Proses

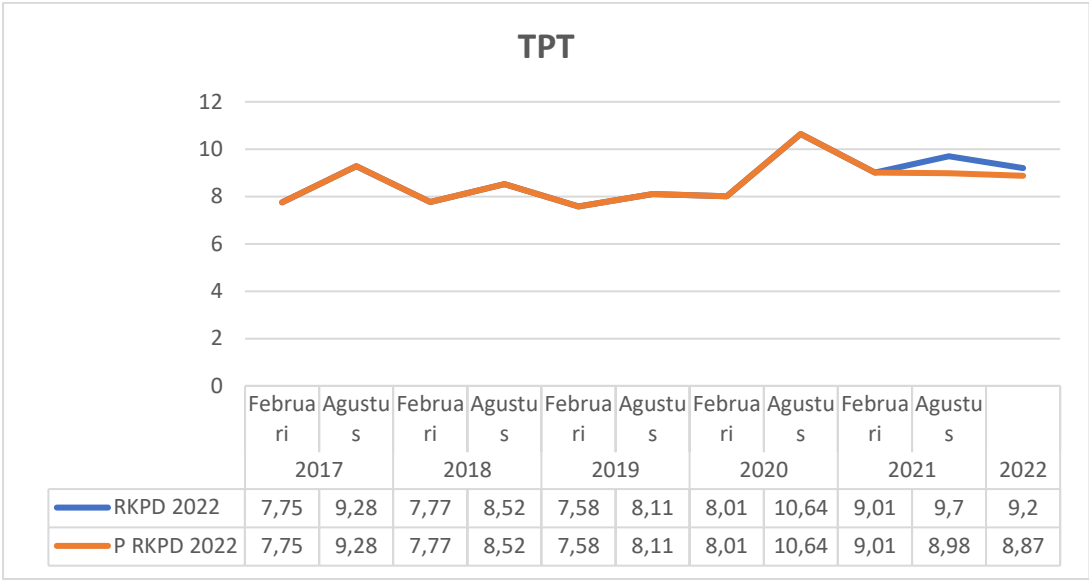
pemulihan permintaan dunia menghadapi hambatan signifikan dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina.



Gambar 3.6
Proyeksi LPE RKPD dan P RKPD 2022
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

1) Proyeksi TPT pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Berbeda dengan LPE, maka penyesuain yang dilakukan terhadap proyeksi TPT di Provinsi Banten dilakukan karena angka TPT realisasi pada Tahun 2021 lebih rendah dari pada angka proyeksinya. TPT di Banten mampu turun ke angka 8,98% lebih rendah dari proyeksi awal di angka 9,7. Hal ini terjadi karena aktivitas perekonomian berangsur pulih sehingga para pekerja yang sebelumnya dirumahkan dan masuk ke dalam kategori pengangguran terbuka bisa ditekan. TPT Banten diproyeksikan terus mengalami penurunan seiring semakin baiknya aktivitas perekonomian masyarakat.

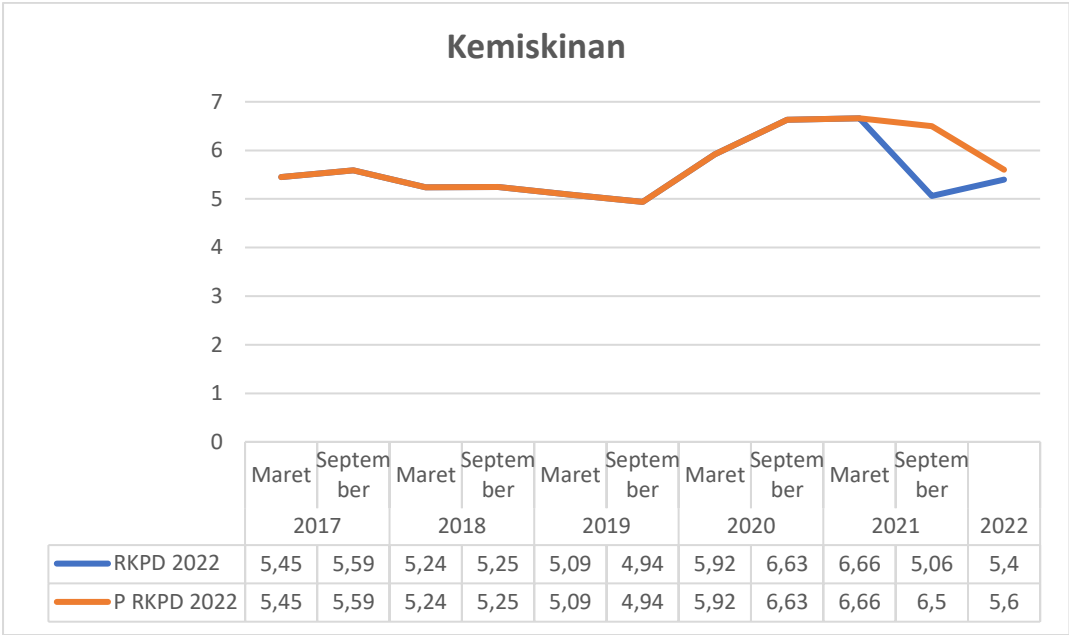


Gambar 3.7
Proyeksi TPT RKPD dan P RKPD 2022
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

2) Proyeksi kemiskinan pada Perubahan RKPD Tahun 2022

Persentase kemiskinan Banten jika dibandingkan dengan rata-rata nasional memang cukup baik dan berada dibawah rata-rata kemiskinan nasional. Akan tetapi, jika berkaca pada target pada RKPD Tahun 2022 maka kemiskinan Banten masih jauh dari target. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2022. Perubahan ini diperlukan mengingat dampak pandemi masih tersisa di tengah-tengah masyarakat yang oleh para pakar disebut dengan “*scarring effect*”.

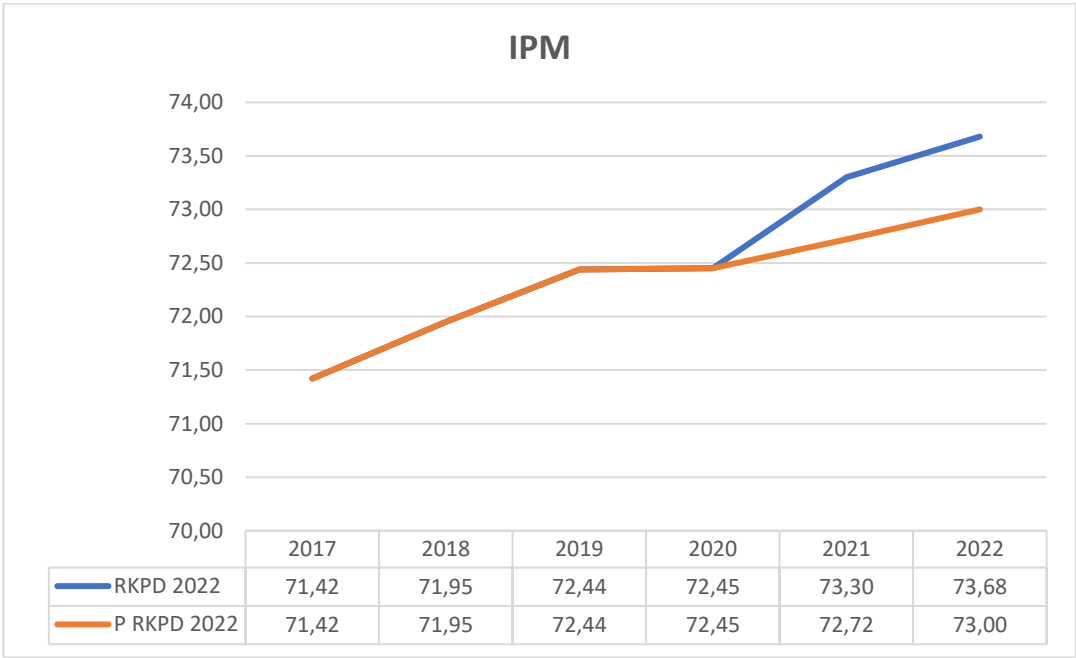
Keterpaduan dan sinergitas program, serta kerja sama antar Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah, mutlak dilakukan seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Target penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024 memerlukan kerja keras dan keterpaduan antar lembaga. Mengacu kepada data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021, di wilayah Provinsi Banten masih terdapat 344.867 jiwa atau 2,7% penduduk yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Untuk itu, langkah kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja yang terkait dalam pengentasan kemiskinan ekstrem perlu menyasar kelompok tersebut.



Gambar 3.8
Proyeksi Kemiskinan RKPD dan P RKPD 2022
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

3) Proyeksi IPM pada Perubahan RKPD Tahun 2022

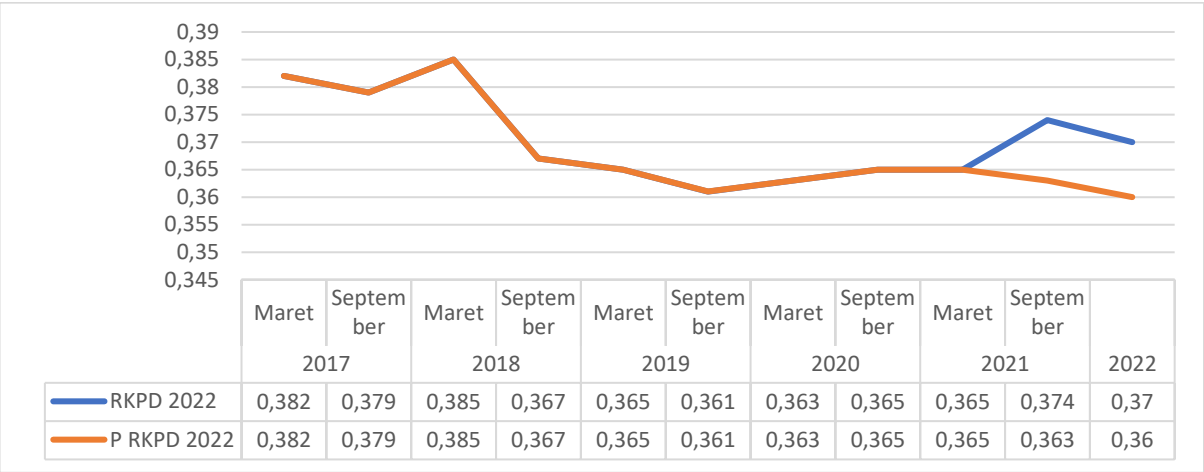
Proyeksi IPM pada perubahan RKPD Tahun 2022 disesuaikan menjadi 73,00 mengingat capaian IPM Tahun 2021 adalah 72,72 dibawah proyeksi awal yaitu 73,30. Kendati IPM Provinsi Banten selalu berada diatas rata-rata IPM nasional, tetapi pertumbuhan IPM Provinsi Banten tidak begitu menggembirakan.



Gambar 3.9
Proyeksi IPM RKPD dan P RKPD 2022
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

4) **Proyeksi ketimpangan pada Perubahan RKPD Tahun 2022**

Ketimpangan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 diproyeksikan lebih baik dibandingkan proyeksi pada RKPD Tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari capaian gini ratio pada Tahun 2021 yang lebih baik dari proyeksi.



Gambar 3.10
Proyeksi Gin Ratio RKPD dan P RKPD 2022
Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2022

3.2 Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

a. **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain:

- 1) Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;

- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 7) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 8) Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- 9) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
- 10) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 11) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 12) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Asumsi yang digunakan dalam penghitungan pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, dipengaruhi oleh tingkat perekonomian Provinsi Banten;
- 2) Perekonomian diasumsikan kembali mulai beranjak normal pada tahun 2023;

- 3) Pertumbuhan Pendapatan Transfer Pemerintah didasarkan atas asumsi konservatif karena sifatnya yang sulit dikontrol oleh Pemerintah Provinsi Banten; dan
- 4) Lain-lain pendapatan yang sah juga didasarkan atas proyeksi konservatif, mengalami pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya perekonomian.

b. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer-perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer yaitu:

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Intensifikasi dan optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;

- 3) Penguatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Provinsi Banten sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten;
- 4) Peningkatan komitmen Perangkat Daerah untuk mempersiapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) bagi program dan Kegiatan yang dapat didanai skema pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, terutama untuk pemenuhan Urusan Standar Pelayanan Minimal, dan
- 5) Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/Lembaga.

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. Rata-rata pertumbuhan belanja tak terduga mengalami penurunan, hal ini sejalan dengan optimisme prediksi Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten dalam pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi COVID-19 dalam 4 (empat) tahun ke depan;

- c. Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;
- d. Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya.

Kebijakan arah belanja daerah dalam APBD Perubahan tahun 2022 juga memperhatikan ketercapaian berbagai indikator pembangunan dan kondisi kekinian yang terjadi di masyarakat. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar bagi perwujudan indonesia emas tahun 2045 menjadi alasan bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan akselerasi peningkatan capaian tingkat partisipasi sekolah melalui skema pendidikan khusus dalam bentuk sekolah terbuka. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi kemacetan kendaraan yang kerap terjadi pada hari raya keagamaan, Pemerintah Daerah menganggap perlu mencari solusi dalam bentuk penyediaan rest area khusus sebagai kantung parkir sementara sebelum masuk ke terminal pelabuhan.

Antisipasi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024. Untuk mensukseskan berbagai tahapan Pemilu tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana cadangan sehingga pada saatnya nanti (tahun anggaran 2024) kebutuhan dana yang harus disediakan pemerintah daerah dapat tercukupi.

Kondisi lingkungan eksternal lainnya yang mempengaruhi kebijakan belanja daerah adalah antisipasi pemindahan Ibu Kota Baru Nusantara (IKN) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Mengacu kepada lampiran 2 Undang-Undang tersebut (Rencana Induk IKN), pembangunan kawasan kota akan dilakukan pada Tahap 2 (2024-2029) yang meliputi Kawasan IKN Barat dan Kawasan IKN Timur. Untuk itu, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan Badan Penghubung Provinsi Banten pada lokasi IKN, berpotensi besar untuk tidak bisa dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2023 sehingga dana tersebut akan di simpan pada dana cadangan pemilu.

3.2.3. Pembiayaan (Form 3_SIPD)

KODE	URAIAN	APBD 2022	RANCANGAN AKHIR P-RKPD 2022	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5=(4-3)
4	PENDAPATAN DAERAH	10.645.880.236.231	11.064.725.925.264	418.845.689.033
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.793.645.595.231	8.213.170.309.264	419.524.714.033
4.1.01	Pajak Daerah	7.284.405.500.000	7.662.945.500.000	378.540.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	20.284.560.000	20.284.560.000	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.966.089.040	53.266.089.040	300.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	435.989.446.191	476.674.160.224	40.684.714.033
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.846.034.641.000	2.845.355.616.000	(679.025.000)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.846.034.641.000	2.845.355.616.000	(679.025.000)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.200.000.000	6.200.000.000	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.200.000.000	6.200.000.000	0
				0
5	BELANJA DAERAH	11.223.180.236.231	11.584.331.245.985	361.151.009.754
5.1	BELANJA OPERASI	6.160.141.031.644	6.545.662.935.556	385.521.903.912
5.1.01	Belanja Pegawai	2.158.805.972.832	2.384.866.242.192	226.060.269.360
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.432.136.006.882	3.535.356.333.434	103.220.326.552
5.1.03	Belanja Bunga	1.575.777.845	1.575.777.845	0
5.1.05	Belanja Hibah	512.547.649.085	568.788.957.085	56.241.308.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	55.075.625.000	55.075.625.000	0
5.2	BELANJA MODAL	2.078.237.758.015	1.796.075.750.859	(282.162.007.156)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	434.695.819.943	167.658.633.438	(267.037.186.505)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.828.217.619	265.828.217.619	28.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	976.552.428.753	878.001.204.652	(98.551.224.101)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	390.465.283.500	445.191.686.950	54.726.403.450
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.696.008.200	39.396.008.200	700.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	84.438.946.572	58.000.391.600	(26.438.554.972)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	84.438.946.572	58.000.391.600	(26.438.554.972)
5.4	BELANJA TRANSFER	2.900.362.500.000	3.184.592.167.970	284.229.667.970
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.771.792.500.000	3.056.022.167.970	284.229.667.970
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	128.570.000.000	128.570.000.000	0
				0
	Total Surplus/(Defisit)	(577.300.000.000)	(519.605.320.721)	57.694.679.279
				0
6	PEMBIAYAAN	577.300.000.000	519.605.320.721	(57.694.679.279)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	632.800.000.000	570.105.320.721	(62.694.679.279)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	632.800.000.000	570.105.320.721	(62.694.679.279)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	55.500.000.000	50.500.000.000	(5.000.000.000)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	10.000.000.000	10.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	5.000.000.000	(15.000.000.000)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.500.000.000	35.500.000.000	0
				0
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

RKPD, sebagai penjabaran dari RPJMD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Tahun 2022 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJMD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017–2022, adalah ***“Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”***. Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017–2022, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- Visi dan Misi tersebut menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah, serta dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Sebagai pelaksanaan RPJMD, RKPD Tahun 2022 merupakan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD untuk tahun berkenaan. Dalam menyusun prioritas pembangunan, RKPD Tahun 2022 berpedoman pada Sasaran tahunan RPJMD untuk Tahun 2022. Sasaran RKPD digunakan untuk

memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan. Selain itu, sasaran tahunan RKPD juga menjadi dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Banten.

Hasil penelaahan terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Sasaran RPJMD, untuk Tahun 2022, dijabarkan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Sasaran RPJMD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,5	3,5
			Meningkatnya Penyelenggaraa n Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai		A
				Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	A
				Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	A	A
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100
			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100	100
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	100	WTP

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
			Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	4	4
				Capaian Kapabilitas APIP	Level	4	4
		Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas		Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	80	80
				Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	85	A
		Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas		Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	100	100
		Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik		Maturitas SIPD	%	80	80
		Terwujudnya Kompetensi Aparatur		Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	30	30
		Terwujudnya Profesionalisme aparatur		Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	95	95
		Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal		Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	64,44	64.44
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif		Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	85	85
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI		Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	80	80
				Penanganan konflik masyarakat	%	100	100
		Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif		Indeks Resiko Bencana	Nilai	110	110
		Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
			Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraa n adminstrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	100	100
				Capaian Laporan Penyelenggara an Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	100	100
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	100	100
			Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	%	100	100
			Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umumyang Prima	%	100	100
			Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100
			Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	100	100
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakata n Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Keluraha n	Capaian Lembaga Kemasyarakata n Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Keluraha n di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	%	25	25
			Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90	90
				Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	100	100
			Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Database Statistik Sektoral	Nilai		100
			Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	100	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
			Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggara kan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	100	100
2.	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah		Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	100	100
			Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	90	90
			Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	100	100
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	100	100
			Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	42,42	42.42
				Luasan layanan irigasi	Ha	20.888,19	20.888,19
				Persentase penyediaan prasarana air baku	%	100	100
			Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	92,5	92,5
			Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375,29	375,29
				Persentase Rumah Layak Huni	%	88,66	88,66
				Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	80.00	80.00
			Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggara an bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	100	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
3.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	%	100	100
			Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	20	90
			Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi	%	100	100
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	4	4
			Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	100	100
				Indeks Pembangunan Manusia	%	73,40 - 74,16	72,60 - 73,68
				Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,370	0,370
				Kemiskinan	%	4,99 - 5,4	4,99 - 5,4
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,7 - 9,2	9,7 - 9,2
			Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	15	15
				Rata rata lama sekolah	Tahun	9,3	9,3
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya beli	%	100	100
			Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	100	100
			Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	92,79	92,79
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	80	80

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	65	65
				Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	100	100
			Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	100	100
			Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	45	45
				Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	45	45
			Meningkatnya Pengarustamaa n Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72,74	72,74
			Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	100
			Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Minat Baca Masyarakat	Nilai	50	50
			Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	2,08	2,08
			Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	5,74	5,74
4.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	%	70,96	70,96
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	285	285
				Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	26	26
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	227	227
				Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jumlah	1.129	1.129

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
			Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	100	100
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	%	80	80
				BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	75	75
			Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.26	2.26
			5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0 - 5,6	5,0 - 5,6
				Tingkat Inflasi	%	3,4-4	3,4-4
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	6,40	6,40
			Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	3	3
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	5	5
			Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	%	100	100
			Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun	53,9	53,9
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	85,97	85,97
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	%	4,7	4,7
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	%	6,9	6,9

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
				Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	4	4
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	6,20	6,20
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,93	4,93
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	85	85
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	3,09	3,09
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	18	18
			Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	3	3
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	52,79	52,79
			Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	33,21	33,21
			Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	100	100
			Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0,60	0,60
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	46,29	46,29

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten untuk Tahun 2022 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2022.

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Dalam menentukan prioritas pembangunan untuk periode berkenaan, penyusunan RKPD berpedoman pada Strategi RPJMD, yang merupakan prioritas pembangunan Daerah lima tahunan, yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, untuk Tahun 2022, adalah sebagaimana dituangkan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4. 2
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
1.01 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.01 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	
1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan	1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan	
1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	1.05 Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	
1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	1.06 Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian	1.07 Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan	
1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur	1.08 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur	
1.09 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur	1.09 Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur	
	1.10 Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur	
1.10 Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah	1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi	
1.11 Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	1.12 Penegak Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pemenuhan cakupan SPM	
1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	1.13 Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	
1.13 Meningkatkan keamanan dan stabiitas daerah	1.14 Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah
1.14 Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	1.15 Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan	
1.15 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1.16 Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Kependudukan	
1.16 Meningkatkan kinerja peneyelenggaraan pemerintah daerah	1.17 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
		pelaksanaan urusan pemerintahan
1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1.18 Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat	
1.18 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaaan perangkat daerah	1.19 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi	
1.19 Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah	1.20 Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Daerah melalui Perwujudan Pelayanan Prima	
1.20 Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	1.21 Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan
1.21 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan	1.22 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD
1.22 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.23 Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan	
1.23 Meningkatkan Aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	1.24 Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi	
1.24 Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan	1.25 Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan	
1.25 Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	1.26 Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi	
1.26 Meningkatkan Akurasi data dan Informasi	1.27 peningkatkan data dan informasi perencanaan pembangunan	
1.27 Meningkatkan Akurasi Data dan Statistik Sektor Sekara Elektronik	1.28 Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektor	
2.01 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah	2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
2.02 Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan	2.02 Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
2.03 Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi	2.03 Penigkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi	
2.04 Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	2.04 Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir
2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku
2.06 Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi	2.06 Pembangunan Bendung, empang dan situ	Pembangunan Bendung, empang dan situ
	2.07 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
2.07 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	2.08 Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
2.08 Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman	2.09 penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	
2.09 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu	2.10 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
2.10 Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	2.11 Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
2.11 Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana persampahan	2.12 Pembangunan TPST Regional	
2.12 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis provinsi	2.13 Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi
2.13 meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	2.14 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
2.14 Meningkatkan sarana dan prasarana kelengkapan jalan	2.15 Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan	Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan
2.15 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	2.16 Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
2.16 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	2.17 Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi
2.17 Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT	2.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan	
2.18 Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	2.19 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi	
2.19 Meningkatkan kualitas kebijakan Infrastruktur bagi masyarakat	2.20 Peningkatan kualitas kebijakan infrastruktur bagi masyarakat	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
3.01 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan
3.02 Mengembangkan jiwa kewirausahaan	3.02 Menciptakan dan mengembangkan wirausaha	
3.03 Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja	3.03 Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja	
3.04 Pengarusutamaan gender dalam Setiap Proses Pembangunan	3.04 Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	
3.05 Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Inklusivitas Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau	3.05 Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing	
	3.06 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah	
3.07 Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	3.07 Revitalisasi museum, dan peningkatan budaya banten	
3.08 Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	3.08 Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	
3.09 Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	3.09 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	
3.10 Meningkatkan pengarusutamaan gender pada semua sektor	3.10 Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga	

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
3.11 Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	3.11 Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	
3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah	3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah	
3.13 meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PMKS	3.13 Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan	
3.14 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan	
	3.15 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja	
4.01 Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	4.01 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	
4.02 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	4.02 Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	
	4.03 Peningkatan Sarana Prasaran Kesehatan	
	4.04 Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit	
4.03 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat	4.05 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	
4.04 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan	4.06 Peningkatan Kelas Pelayanan Rumah Sakit	
4.05 Meningkatkan Pengendalian Penduduk	4.07 Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk	
5.01 Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	5.01 Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan	
5.02 Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemanfaatan Layanan Keuangan	5.02 Peningkatan Aksesibilitas dan pemanfaatn Layanan Keuangan kepada Masyarakat	
5.03 Mewujudkan Keunggulan Kompetitif berbasis Potensi Daerah	5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetitif melalui Optimalisasi Potensi Daerah	
5.04 Mewujudkann Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	5.04 Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ramah Lingkungan	
5.05 Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi investasi	5.05 Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku
5.06 Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat	5.06 Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan
5.07 Mengembangkan Sektor Industri	5.07 Pengembangan perwilayahan Industri dan Konektifitas antara industri kecil, menengah dan besar	Pengembangan perwilayahan Industri melalui pembentukan sentra industri Kecil pada kawasan dan luar kawasan industri

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
5.08 Pengembangan Sumber Daya Industri		
	5.09 Pengembangan kualitas produk industri	Pengembangan kualitas produk industri kecil
5.08 Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan strategis	5.10 Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis	Peningkatan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis
	5.11 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	
5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah	5.12 Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkatkan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten	
5.10 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	
5.11 Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian	5.14 Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan	5.15 Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	
5.13 Meningkatkan Ketersediaan, Optimalisasi Sumber Daya Lokal, dan Perlindungan Pangan Daerah	5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah	
5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa Bidang Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	5.17 Peningkatan Penataan dan Pengembangan destinasi wisata	Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur
	5.18 Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
	5.19 Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata	Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata
	5.20 Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata	Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata
5.15 meningkatkan pengawasan, pemberdayaan, kelembagaan dan kemitraan koperasi serta optimalisasi teknologi informasi	5.21 Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan	Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat
	5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi Koperasi	Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif
5.16 Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha	5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM	Peningkatan tumbuhnyawirusaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
5.17 Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup	5.24 Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai	5.25 Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai	Peningkatan Konservasi Daerah Aliran Sungai

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung	5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan	Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
5.20 Meningkatkan akses perekonomian masyarakat	5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	
5.21 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	5.28 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba
5.22 meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	5.29 Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas
5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan	5.30 memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	

Strategi dan Arah Kebijakan tersebut ditujukan pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten sesuai dengan tahapan yang direncanakan untuk setiap tahun.

4.1.4 Tema RKPD Tahun 2022

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, masih tetap sama dengan tema RKPD 2022 yaitu “**Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**”. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2022 dengan Tema Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 disajikan dalam diagram berikut.



Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Isu Strategis Daerah Tahun 2022

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Provinsi Banten untuk RKPD Tahun 2022 merupakan sintesis dari Permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022, dan arah kebijakan RKP Tahun 2022. Isu strategis Provinsi Banten Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19;
- Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana; serta
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Tatakelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 Sebagaimana disajikan pada bab-bab sebelumnya, ekonomi Banten pada Triwulan IV-2020 secara *y on y* berkontraksi 3,92 persen.

Kontraksi ini merupakan yang paling dalam di antara provinsi yang ada di Pulau Jawa, yang secara rata-rata terkontraksi 2,60 persen, dan lebih dalam dari rata-rata Nasional yang terkontraksi 2,19 persen.

Namun demikian, pemulihan ekonomi Banten setiap triwulan menunjukkan tren perbaikan. Kontraksi 3,92 persen pada Triwulan IV-2020 tersebut, secara *y on y*, lebih baik dari Triwulan III-2020 yang terkontraksi sebesar 5,32 persen, dan Triwulan II-2020, yang terkontraksi hingga mencapai 7,27 persen. Artinya, secara *q to q*, ekonomi Banten pada Triwulan IV-2020 mampu tumbuh 3,01 persen, meskipun lebih lambat dibandingkan Triwulan II-2020 yang tumbuh mencapai 4,73 persen.

Pada Tahun 2022, LPE Provinsi Banten diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,6 persen. Untuk dapat mencapai proyeksi tersebut, diperlukan upaya mengoptimalkan sisi *demand* dan sisi *supply*. Pada sisi *demand*, perlu memacu komponen permintaan domestik dan permintaan luar negeri. Untuk meningkatkan permintaan domestik, dapat dilakukan peningkatan permintaan atau konsumsi rumah tangga dan serapan pengeluaran pemerintah, serta peningkatan investasi swasta. Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditopang oleh kenaikan pendapatan dan laju inflasi yang terjaga. Untuk permintaan luar negeri, perlu upaya memperbaiki neraca perdagangan dengan meningkatkan kinerja ekspor.

Pada sisi *supply*, lapangan usaha yang selama ini memberikan share besar terhadap struktur ekonomi Banten juga merupakan lapangan usaha yang memberikan sumbangan besar bagi kontraksi ekonomi Banten. Sebaliknya, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, meskipun share kecil, justru menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi, serta menjadi penahan dari semakin dalamnya kontraksi ekonomi Banten. Oleh karena itu, upaya mendorong pemulihan kontribusi lapangan usaha industri pengolahan, perlu diiringi dengan transformasi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain dalam rangka mendatangkan

nilai tambah ekonomi, juga dalam rangka perluasan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid- 19.

2. Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana Ketidakseimbangan pertumbuhan antara Wilayah Banten Selatan dengan Wilayah Banten Utara, serta kebencanaan, merupakan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Ketidakseimbangan pertumbuhan menjadi salah satu penyebab posisi daya saing Provinsi Banten yang tidak stabil. Study terakhir mengenai Analisis Daya Saing Provinsi-Provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh the Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS), menempatkan Provinsi Banten pada peringkat ke-5 dari 6 provinsi di wilayah yang sama.

Ketersediaan dan Keterjangkauan Sarana Umum merupakan salah satu dari 20% indikator terlemah yang dimiliki oleh Provinsi Banten. ACI merekomendasikan peningkatan kualitas infrastruktur fisik dan sarana umum untuk peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas infrastruktur fisik juga perlu untuk meningkatkan daya tarik investor. Selain kualitas infrastruktur fisik, ACI juga merekomendasikan peningkatan infrastruktur lunak seperti kualitas kesehatan dan Pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain ketidakseimbangan pertumbuhan, hasil-hasil pembangunan juga menunjukkan adanya ketidakeimbangan yang tercermin dari capaian indikator-indikator makro pembangunan. Oleh karenanya, perlu integrasi pembangunan antar wilayah untuk meningkatkan daya saing Provinsi Banten secara keseluruhan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM merupakan salah satu isu strategis dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Sampai dengan Tahun 2020, pembangunan SDM, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu indeks komposit yang didasarkan pada empat indikator: angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*), harapan lama sekolah (*expected years of*

schooling) dan rata-rata lama sekolah (*mean of years of schooling*), serta daya beli (*Purchasing Power Parity*) yang merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan daya beli, menunjukkan trend peningkatan. Capaian pembangunan manusia di Provinsi Banten juga memenuhi target RPJMD, dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun demikian, dilihat dari akselerasinya, angka pertumbuhan IPM Provinsi Banten mengalami perlambatan. Pada tahun 2020, IPM Provinsi Banten hanya tumbuh 0,01 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,68 persen. Selain perlambatan akselerasi pertumbuhan, Provinsi Banten juga masih stagnan pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), yang dicapai sejak tahun 2015. Perlambatan akselerasi dan stagnasi IPM mengindikasikan permasalahan pada pelaksanaan SPM, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan amanat prioritas, di mana Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM.

4. Tatakelola pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk mencapai maksud tersebut, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Banten, dari sisi kinerja, menunjukkan peningkatan, namun masih memerlukan perbaikan.

Hal ini tercermin dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja di Provinsi Banten, oleh Kementerian PAN-RB, yang pada tahun 2019 mencapai nilai 65,56 atau predikat B. Kementerian PAN-RB merekomendasikan peningkatan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui penyempurnaan perencanaan kinerja yang *result oriented*. Kementerian PAN-RB juga merekomendasikan keterpaduan perencanaan antar berbagai tingkatan dalam

struktur pemerintahan, melalui *cascading* kinerja yang komprehensif sesuai prioritas pembangunan daerah, untuk memberi manfaat lebih optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan.

Keterkaitan antara isu strategis daerah dengan permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022, serta arah kebijakan RKP Tahun 2022, disajikan dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3
Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD, Arah Kebijakan RPJMD

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD tahun sebelumnya	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Arah Kebijakan RKP Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi daerah masih belum optimal	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi 7,4% lebih dalam dibandingkan nasional	1. Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid- 19
	2. Lapangan Usaha sumber Pertumbuhan PDRB mengalami pergeseran	2. Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan		
1. Peningkatan daya saing daerah belum optimal. Posisi strategis Provinsi Banten dengan segala keunggulan komparatifnya belum menjadi keunggulan kompetitif.	1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir laut serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup	1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir laut serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup	1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana
2. Kesenjangan antar wilayah, ditunjukkan oleh capaian indikator kesejahteraan rakyat yang tidak merata	2. Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah	2. Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah	2. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomanian Daerah	2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD tahun sebelumnya	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Arah Kebijakan RKP Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022
3. Kurangnya konektivitas infrastruktur kewilayahan dan antar wilayah	3. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang cakap dalam Mitigasi Bencana, dan Kurangnya Koordinasi antar sector baik dengan tingkat pusat maupun Kabupaten/Kota	3. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang cakap dalam Mitigasi Bencana, dan Kurangnya Koordinasi antar sector baik dengan tingkat pusat maupun Kabupaten/Kota	3. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	3. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
4. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Provinsi Banten merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun manusia.			4. Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan	
1. Implementasi SPM belum optimal	1. Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar belum optimal	1. Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing	1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
2. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi	2. Hasil pembangunan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat belum optimal: Angka Kemiskinan meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat, Pertumbuhan IPM mengalami perlambatan	2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
3. Pembangunan berwawasan kependudukan belum optimal	3. Laju pertumbuhan dan Persebaran penduduk tidak merata	3. Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan		
		4. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan		
		5. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk		

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD tahun sebelumnya	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Arah Kebijakan RKP Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022
Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten belum optimal	1. Target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi belum tercapai	1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	Tatakelola pemerintahan yang baik
	2. Tata Laksana dan manajemen birokrasi yang belum optimal	2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi		
	3. Target kinerja RPJMD untuk implementasi SAKIP belum tercapai	3. Peningkatan koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan		

Dari hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022 dan memperhatikan permasalahan pembangunan dalam RPJMD, Isu strategis pada tahun 2022 adalah 1). Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19; 2). Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana; 3). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan 4). Tata kelola pemerintahan yang baik. Isu strategis tersebut, selanjutnya menjadi bahan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Berdasarkan isu strategis daerah yang telah dirumuskan, prioritas pembangunan daerah untuk RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
2. Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; serta
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah tersebut menjadi dasar pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, termasuk pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Provinsi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 menjadi acuan bagi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Oleh karenanya, sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan daerah merujuk pada permasalahan pembangunan dalam RPJMD serta berpedoman pada sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahunan Daerah dalam RPJMD. Keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah, dengan Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD, Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022, serta Isu Strategis Tahun 2022, disajikan dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DALAM RPJMD, ARAH KEBIJAKAN RPJMD TAHUN 2022, SERTA ISU STRATEGIS TAHUN 2022

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
Laju Pertumrah masih belum optimal Ekonomi dae	1. Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat; 2. Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan	Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid- 19	Pertumbuhan ekonomi inklusif
1. Peningkatan daya saing daerah belum optimal. Posisi strategis Provinsi Banten dengan segala keunggulan komparatifnya belum menjadi keunggulan kompetitif.	1. Peningkatan Keunggulan Kompetitif melalui Optimalisasi Potensi Daerah; 2. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah; 3. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis; 4. Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan	Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana	Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
1. Implementasi SPM belum optimal; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi; 3. Pembangunan berwawasan kependudukan belum optimal.	1. Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing; 2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; 3. Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan; 4. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan; 5. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk.		
Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten belum optimal	1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan; 2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi; 3. Peningkatan koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan.		

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai sasaran RPJMD. Sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, atau berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 mencakup pula janji tahunan Kepala Daerah untuk Tahun 2022. Janji Kepala Daerah Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam sasaran RPJMD untuk Tahun 2022, adalah menuntaskan ketersediaan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain memuat janji tahunan Kepala Daerah untuk Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan pandangan dan pertimbangan DPRD. Pandangan dan pertimbangan DPRD menggambarkan permasalahan pembangunan Daerah untuk diselaraskan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah sehingga dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah, yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional. Pandangan dan pertimbangan tersebut berupa saran dan pendapat, yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, disajikan dalam Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4. 5
Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Masyarakat Kesulitan Air Bersih
2	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah; 2. Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi
3	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	belum terpenuhinya sarana dan prasarana olah raga bagi masyarakat
4	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat berupa pos pelayanan terpadu (posyandu yang representatif)
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Belum optimalnya penanganan darurat bencana belum tersedianya / kurangnya alat pengangkut sampah (motor sampah) untuk tempat pembuangan sementara (TPSS) / bank sampah Kurangnya pengelolaan sampah rumah tangga
6	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	pembangunan dan pengelolaan TPST Regional bojong menteng
7	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	pembangunan Sarana prasarana wisata anyer belum tersedianya / perbaikan sarana infrastruktur jalan berupa

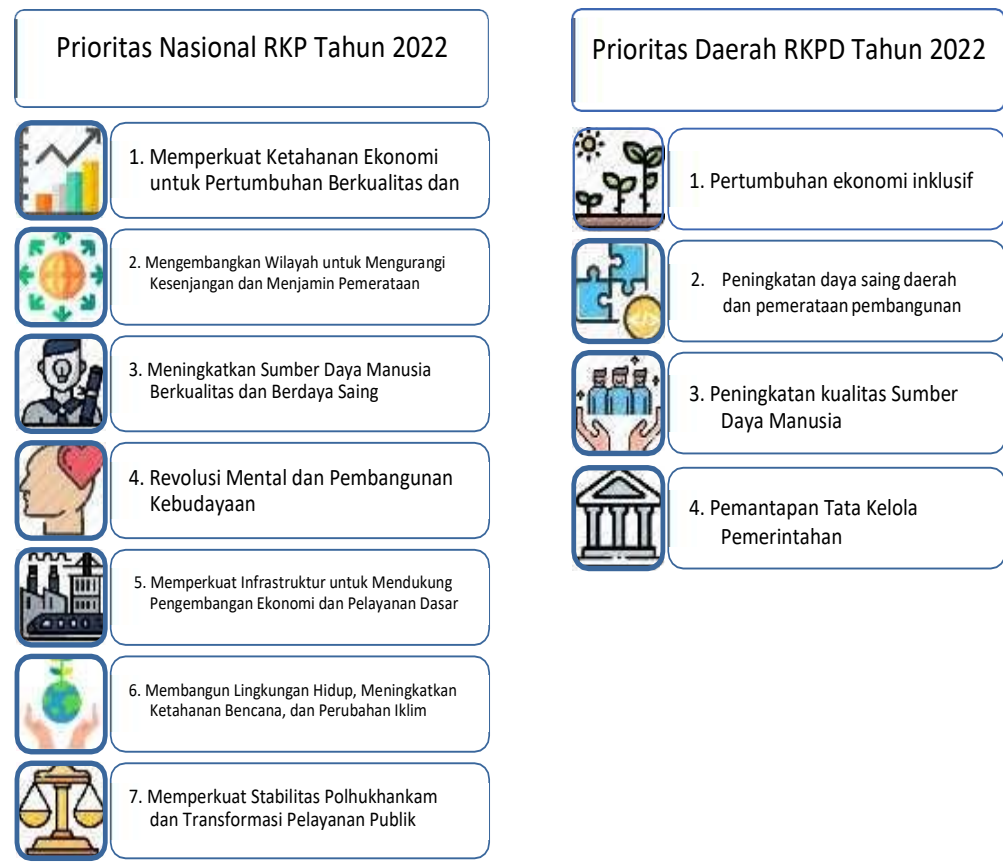
No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	hotmix / aspal masih adanya jalan rusak Masih adanya jalan yang rusak pembangunan jalan pabuaran-baros untuk mengurangi kemacetan perbaikan / rehabilitasi sarana infrastruktur jalan yang mengalami cekungan / kerusakan
9	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1. belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan - sarpras (infocus, cctv, dll) - meubelair - laboratorium (komputer, bahasa inggris, tehnik industri, tehnik sipil, tehnik bangunan, dll) - jaringan komputer - perpustakaan - sistem informasi (akademik, keuangan, SDM, dll); 2. belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) berupa ruang kelas baru (RKB); 3. belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan berupa alat praktikum dan teknologi laboratorium medik; 4. belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan asrama santriwati/putri; 5. belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan agama yang representatif; 6. belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang representatif
10	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1. belum terpenuhinya sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan masyarakat; 2. perbaikan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan masyarakat; 3. PJU sangat minim.

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
11	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi; 2. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha; 3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	1. belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan umum yang memadai di lingkungan masyarakat ; 2. pembangunan rutilahu yang tidak tepat sasaran; 3. Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani; 4. belum tersedianya / perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur jalan lingkungan yang baik.
12	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1. belum tersedianya / perbaikan sarana dan prasarana sistem saluran air (drainase); 2. belum tersedianya sarana dan prasarana sanitasi / mandi cuci kakus (MCK) yang baik; 3. belum tersedianya sarana dan prasarana sanitasi / mandi cuci kakus (MCK) yang baik; 4. memaksimalkan program perbaikan drainase, irigasi, air bersih, sanitasi; 5. Penerangan Jalan yang masih kurang di Malam Hari; 6. perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan lingkungan melalui program paving block; 7. Perbaikan Drainase yang sudah rusak; 8. Perbaikan Drainase/Saluran Air mengingat apabila turun hujan air tidak mengalir dengan baik.
13	Sosial	Dinas Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	pemberdayaan Masyarakat dengan program pelatihan dan pemagangan kerja atau usaha Desa

4.3.1 Prioritas Nasional RKP 2022

Perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu, dalam rangka menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, antara Pusat dan Daerah, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan RKPD untuk mengacu pada RKP. Demikian halnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang menentukan bahwa RKPD disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

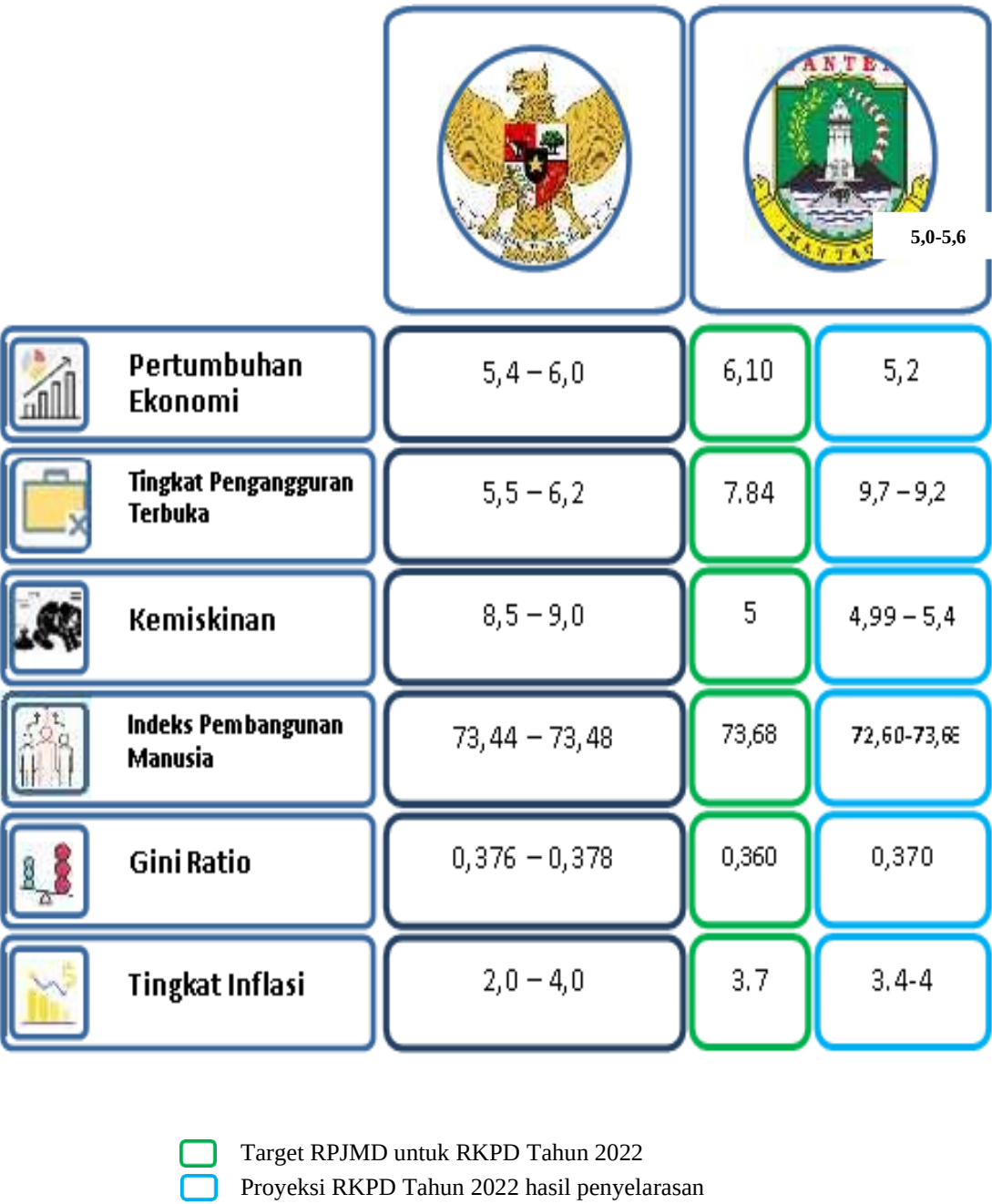
Keterkaitan antara Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2022, disajikan dalam diagram berikut:



Selain penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Daerah dengan prioritas pembangunan nasional,

mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD juga dilakukan melalui penyelarasan target pembangunan, dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

Hasil penyelarasan target pembangunan, antara sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022 dengan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2022, disajikan dalam diagram berikut:



Secara lebih rinci, keterkaitan antara indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2022 dengan indikator sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2022, disajikan dalam Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4. 6
Keterkaitan antara Indikator Sasaran Prioritas RKP Tahun 2020
dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2020

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Progarm dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)	
1	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif						
		a	Pengendalian inflasi daerah	Penguatan peran TPID	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	
				Menjamin kelancaran pasokan dan distribusi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting	
				Penguatan sistem logistik provinsi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	
				Diversifikasi pangan untuk mengendalikan volatilitas harga	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
		b	Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan ketahanan pangan	Pengembangan komoditas unggulan daerah dan perikanan budidaya	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
					Program Pembangunan Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	
					Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya	
				Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan jagung di KPPN Pandeglang (PN)	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
					Penguatan koordinasi stakeholder sektor unggulan daerah	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
					Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Program Keterjangkauan Pangan, Program Peningkatan Ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		c	Revitalisasi Industri dan Perdagangan	Peningkatan hubungan industrial antara pekerja, pemerintah dan pengusaha	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program hubungan industrial	
					Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program pengendalian izin usaha industri	
			Dukungan infrastruktur dan pasokan bahan baku	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program hubungan industrial		
				Program Peningkatan Daya Saing Industri	Program perencanaan dan pembangunan industri		
				Dukungan SDM tenaga kerja terampil	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	
			Program Peningkatan Mutu Pembelajaran		Program pengembangan kurikulum		

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Peningkatan stabilitas kamtibmas	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program pengawaasan ketenagakerjaan
					Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
		d	Peningkatan investasi daerah	Penyediaan data dan informasi peluang investasi	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	Program standarisasi dan perlindungan konsumen
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
				Penyederhanaan dan percepatan perizinan	Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal	Program pelayanan penanaman modal
					Program Pelayanan Perizinan Penaman Modal	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				Peningkatan ketersediaan infrastruktur investasi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program pengembangan permukiman
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program penyelenggaraan jalan
					Program Keciptakaryaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
				Keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal
					Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Program perencanaan dan pembangunan industri
				Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
				Kemudahan akses pasokan bahan baku	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
				Kemudahan akses tenaga kerja terampil	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
					Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program penempatan tenaga kerja
					Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Program pengembangan kurikulum
				Fasilitasi promosi	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Program promosi penanaman modal
					Program Pembangunan Kemitraan	Program Pelayanan Penghubung
				Peningkatan stabilitas kamtibmas	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
		e	Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif	Peningkatan dukungan kebijakan investasi	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	Program perekonomian dan Pembangunan
				Skema pembiayaan dan akses permodalan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM
					Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
				Fasilitasi start-up dan inkubasi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM
				Peningkatan informasi, promosi dan pemasaran	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM
					Program Pembangunan Kemitraan	Program Pelayanan Penghubung
				Peningkatan standar kualitas: perijinan dan sertifikasi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM
				Penjaminan supply and demand	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
				Kemitraan dan Link and match dengan e-commerce	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
				Inovasi, teknologi dan branding	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
					Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				Revitalisasi PLUT Banten untuk SDM UMKM	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
				Pengembangan kewirausahaan perempuan	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Pengembangan kewirausahaan pemuda	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas DayaSaing Kepemudaan
		f	Pengembangan pariwisata	Pengembangan destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Peningkatan dukungan infrastruktur destinasi wisata	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Progarm dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)	
					Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan UtilitasUmum (PSU)	
				Peningkatan promosi dan pemasaran	Program Pemasaran Produk Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
				Peningkatan SDM dan kelembagaan pariwisata	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
				Peningkatan jaminan keamanan dan 3K pada destinasi wisata	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan KetertibanUmum	
		g	Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Revitalisasi SMK, terutama pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan	Program Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan	
						Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum
						Program Pendidikan Menengah	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
					Revitalisasi BLKI, yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Program Pelatihan Kerja Dan ProduktivitasTenaga Kerja
					Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
Peningkatan kerjasama dengan BBLKI	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri				Program Pelatihan Kerja Dan ProduktivitasTenaga Kerja		
Kerjasama pemagangan dengan negara/daerah lain	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Program PelatihanKerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja					
		h	Adopsi dan Inovasi IPTEK, untuk memberikan nilai tambah ekonomi	Akselerasi Peran Iptek dalam diversifikasi Produk Olahan hasil Pertanian dan Perikanan	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
					Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Progarm dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Kolaborasi Akademisi, Bisnis dan Government dalam perwujudan Ekonomi Digital	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Penerapan Inovasi dan Iptek	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan					
		a	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Penuntasan pembangunan USB dan RKB	Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan
				Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Provinsi (pembangunan Rumah Sakit Cibaliung dan Ciligrang)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Perluasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Keciptakaryaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Pengelolaan sampah dan limbah	Program Keciptakaryaan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
				Dukungan pemulihan infrastruktur pasca bencana (Kawasan Pesisir Selat Sunda dan bencana lainnya)	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
				Penyediaan sarana tenaga listrik di perdesaan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		b	Pembangunan infrastruktur ekonomi	Dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
				Optimalisasi infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan usaha tani)		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
					Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
				Pengembangan pusat logistik pangan provinsi dan regional	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan	Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Dukungan penyelenggaraan SAUM SMA (Sistem Angkutan Umum Masal Serang metropolitan Area)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		c	Pengembangan kawasan	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
				Pengembangan pusat industri manufaktur, sektor industri kreatif dan jasa di KEK Tanjung Lesung (PN)	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Pengembangan Kawasan Perdesaan di daerah entas: Pandeglang dan Lebak (PN)	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Pandeglang (PN)	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Program Peningkatan Kerjasama Desa
				Pengembangan kawasan Serang metropolitan area	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Dukungan pembangunan Kota Baru Maja	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
		d	Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
					Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Pengelolaan dan konservasi hutan	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Program Pengelolaan Hutan
					Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
					Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
					Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
				Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana	Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dan zonasi	Program Penatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penatan Ruang
				Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
				Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kebencanaan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Pemenuhan logistik kebencanaan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Peningkatan koordinasi antar stakeholder lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		e	Peningkatan kolaborasi antar	Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi dengan universitas	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Penguatan Provinsi Banten di forum kerjasama Jabodetabekjur dan wilayah perbatasan lainnya	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Penguatan kerjasama dengan provinsi/daerah lain	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Penguatan kerjasama dengan negara asing	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Progarm dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Penguatan kerjasama dengan forum tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Penguatan kerjasama dengan komunitas	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Penguatan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
		a	Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kegiatan prioritas diarahkan pada:	Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, air minum, trantibum)	Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan
					Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
					Program Keciptakaryaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial
					Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
					Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	
				Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
				Penanganan anak tidak sekolah	Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus	Program pengelolaan pendidikan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial
				Penanganan stunting	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		b	Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan, kegiatan prioritas diarahkan pada:	Penerapan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
					Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
				Peningkatan kolaborasi stakeholder kependudukan	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pendaftaran penduduk
				Dukungan perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (PN)	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pencatatan sipil
				Dukungan perluasan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang (PN)	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pencatatan sipil
		c	Pengentasan kemiskinan	Penguatan basis data untuk integrasi bantuan sosial	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				Revitalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan Fakir Miskin	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
				Peningkatan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan (penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat pesisir dan hutan, penguatan wirausaha pemuda)	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
					Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
					Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
					Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
				Perluasan jenis dan penerima manfaat bantuan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
				Perluasan penerima manfaat Jamsosratu	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
		d	Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda	Penguatan sistem informasi data gender dan anak	Program Pemberdayaan Perempuan	Program pengelolaan sistem data gender dan anak
				Penguatan perlindungan perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan perempuan
					Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan khusus anak
				Pengembangan Provinsi Layak Anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan khusus anak
				Penguatan PUG-PPRG	Program Pemberdayaan Perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
				Peningkatan sinergitas penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
		e	Pembudayaan olahraga	Pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pelajar	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan
				Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan
				Optimalisasi fasilitas dan sarana olah raga milik Pemprov Banten	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan
		f	Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat	Peningkatan budaya literasi sekolah	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan
				Peningkatan budaya literasi masyarakat dan desa	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan
				Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
				Fasilitasi pelayanan hak atas kekayaan intelektual	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
		g	Revolusi Mental dan Pelestarian kebudayaan daerah	Penguatan kualitas dan peran keluarga dalam pembentukan karakter	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program peningkatan kualitas keluarga
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
				Peningkatan pelayanan kepemudaan	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Optimalisasi fungsi museum	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengelolaan permuseuman
				Pengelolaan cagar budaya	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
				Pembinaan lembaga adat	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
				Peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
				Pelestarian sejarah, tradisi dan budaya	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pembinaan sejarah
4	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan					
		a	Penguatan kelembagaan dan tatalaksana	Finalisasi penyederhanaan birokrasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program pengelolaan aplikasi informatika
				Peningkatan keterbukaan informasi publik	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Penataan Organisasi
				Peningkatan kualitas budaya kerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Penataan Organisasi
				Peningkatan penyelenggaraan kearsipan daerah	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip
				Peningkatan kualitas produk hukum daerah	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		b	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Penataan Organisasi
				Peningkatan kompetensi dan perilaku SDM pelayanan	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	
				Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	Program tata kelola pemerintahan (seluruh OPD)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
				Peningkatan zona integritas dan wilayah bebas korupsi	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan
					Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
				Peningkatan inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		c	Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	Program Kepegawaian Daerah
				Penataan Anjab, ABK, Standar Kompetensi	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Implementasi manajemen talenta (talent pool)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah
				Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan HCDP	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah
		d	Peningkatan tata kelola keuangan dan aset	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Peningkatan pengawasan pelaksanaan APBD	Program Penatausahaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Peningkatan pendapatan asli daerah	Program Peningkatan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
					Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	
		e	Penguatan penerapan SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan kekayaan dan kewajiban daerah	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan
				Penguatan <i>cross-cutting program dan kegiatan</i>	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Peningkatan kualitas pengukuran kinerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas pelaporan kinerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
				Peningkatan kualitas evaluasi kinerja	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Peningkatan kualitas capaian kinerja	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		f	Peningkatan riset dan inovasi daerah	Penguatan basis data pemerintahan daerah	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
				Optimalisasi hasil kelitbang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Peningkatan inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Peningkatan kolaborasi stakeholder kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		g	Peningkatan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan	Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Penataan Desa
				Peningkatan fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Peningkatan stabilitas politik, hukum dan keamanan	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Sumber: RKP Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

4.3.2 Program Prioritas Daerah Tahun 2022

Untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, dilakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

Daerah meliputi, salah satunya, pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 183 huruf a, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah mencakup kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 218 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD provinsi. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 218 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program prioritas, lokasi prioritas, dan kegiatan prioritas Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 222 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan program prioritas, lokasi prioritas, dan kegiatan prioritas dilakukan, salah satunya, dalam rangka menjamin pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

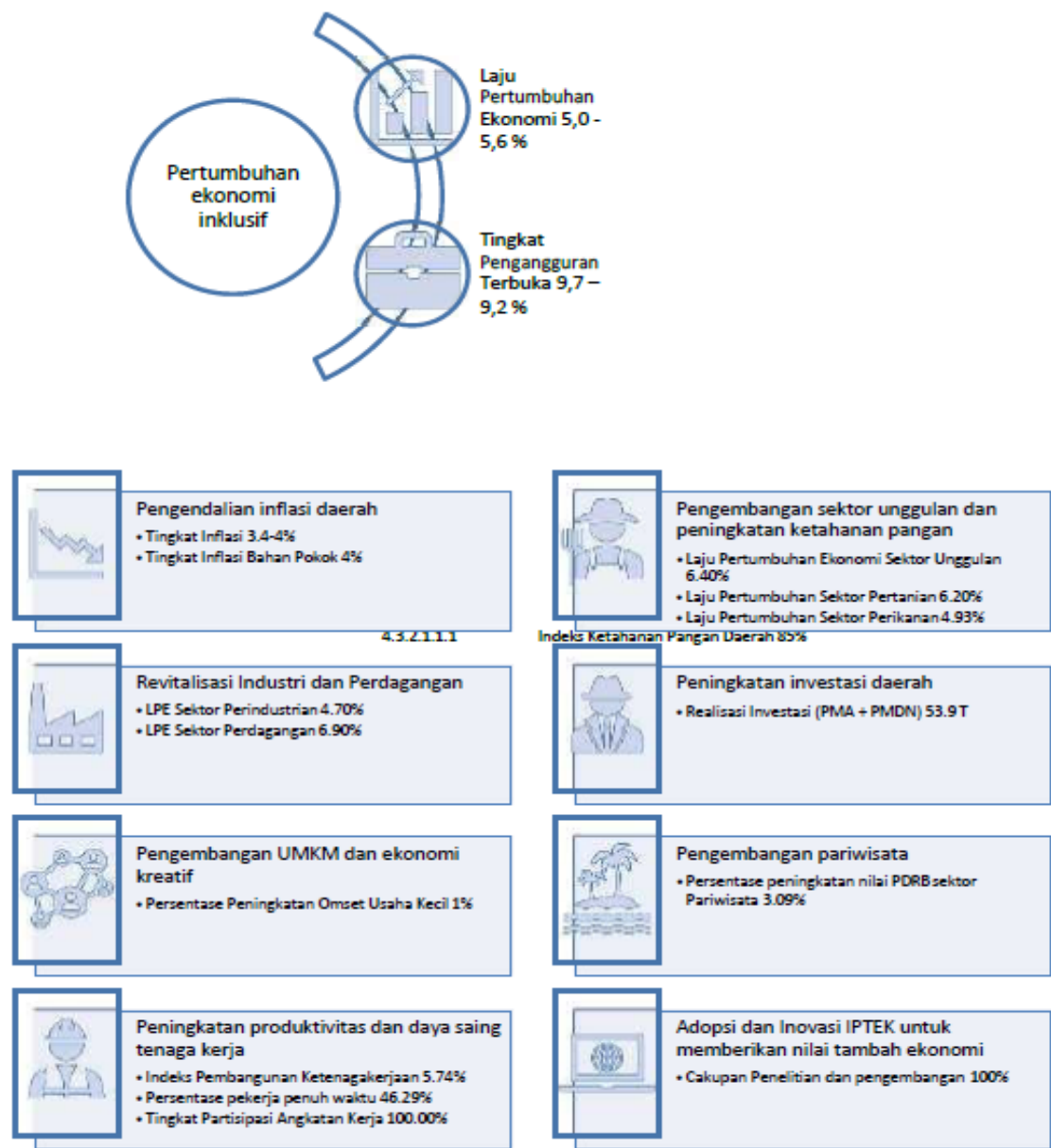
Dalam rangka menjamin pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 selanjutnya dijabarkan menjadi Program Prioritas, sebagai berikut:

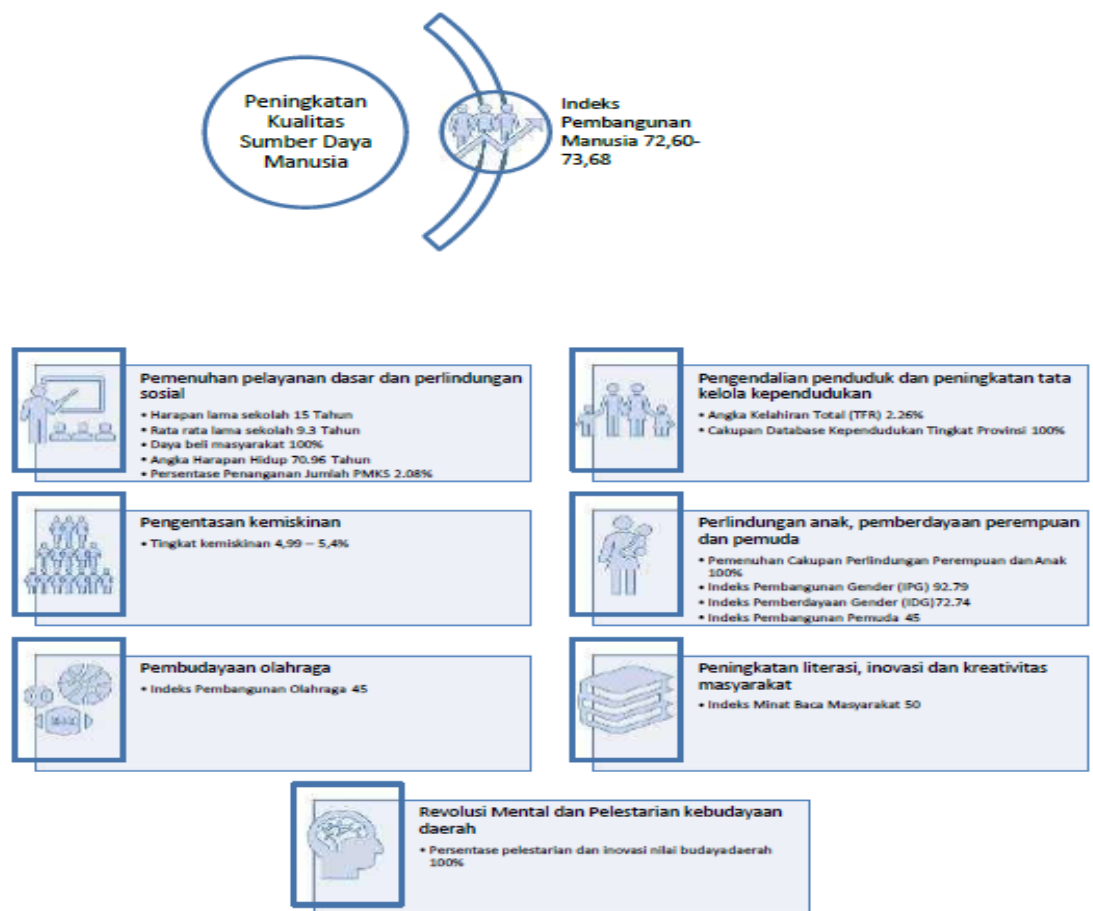
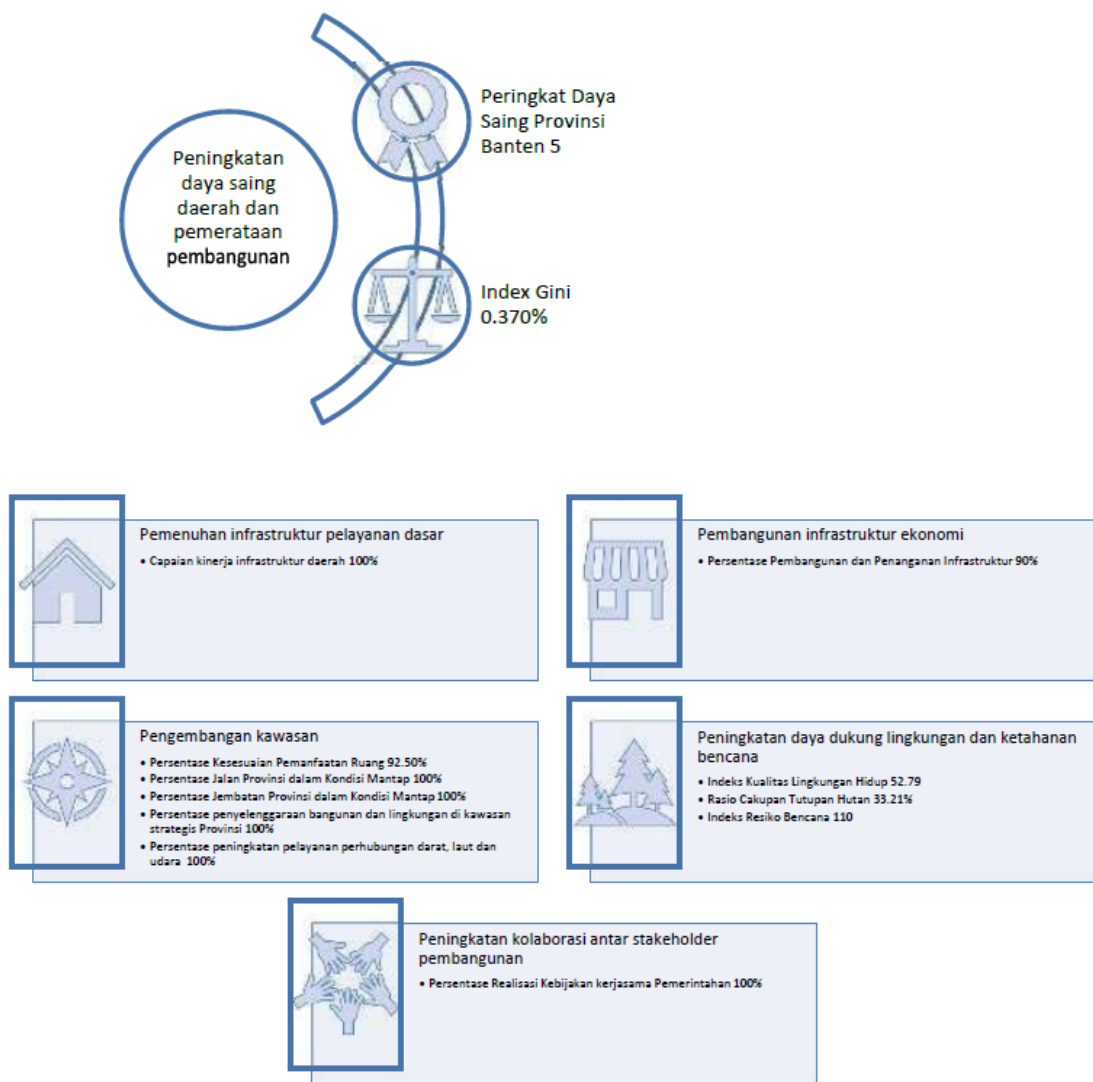
1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, program prioritas diarahkan pada:
 - a. Pengendalian inflasi daerah;
 - b. Pengembangan sector unggulan dan peningkatan ketahanan pangan;
 - c. Revitalisasi Industri dan Perdagangan;
 - d. Peningkatan investasi daerah;
 - e. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;
 - f. Pengembangan pariwisata;
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta;

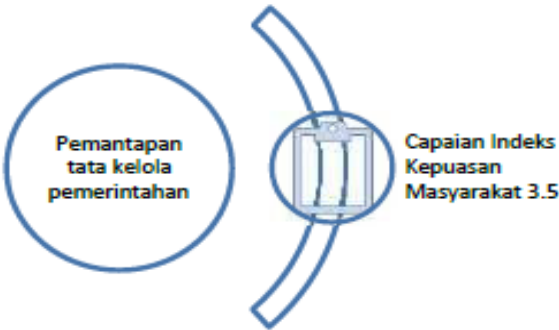
- h. Adopsi dan Inovasi IPTEK, untuk memberikan nilai tambah ekonomi.
2. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan, program prioritas diarahkan pada:
 - a. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan infrastruktur ekonomi;
 - c. Pengembangan kawasan;
 - d. Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana; serta
 - e. Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan.
 3. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, program prioritas ditujukan pada :
 - a. Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial;
 - b. Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan;
 - c. Pengentasan kemiskinan;
 - d. Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - e. Pembudayaan olahraga;
 - f. Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat; serta
 - g. Revolusi Mental dan Pelestarian kebudayaan daerah.
 4. Dalam rangka memantapkan tata kelola pemerintahan, program prioritas ditujukan pada:
 - a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan public;
 - c. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
 - d. Peningkatan tata kelola keuangan dan asset;
 - e. Penguatan penerapan SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - f. Peningkatan riset dan inovasi daerah; serta
 - g. Peningkatan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan.

Perumusan program prioritas, lokasi prioritas, dan kegiatan prioritas Daerah, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Rencana program prioritas dalam RKPD provinsi adalah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah provinsi untuk tahun yang berkenaan. Untuk itu, keterkaitan antara indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas, mengacu pada indikator dan target kinerja RPJMD Provinsi Banten untuk tahun 2022, disajikan dalam diagram berikut :







Berdasarkan diagram, program prioritas ditujukan dalam rangka mencapai prioritas pembangunan daerah. Indikator dan target kinerja program prioritas menunjang pencapaian indikator dan target kinerja sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah, program- program prioritas tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan prioritas dan lokasi prioritas, melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

4.3.3 Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Hal ini diatur pada Bab mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, telah ditetapkan empat prioritas pembangunan daerah, yaitu Pertumbuhan ekonomi

inklusif; Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan. Empat prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan menjadi program-program prioritas daerah, yang indikator dan target kinerjanya saling berkaitan, dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2022. Terhadap program- program prioritas tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas daerah. Penjabaran dari prioritas pembangunan daerah, menjadi program prioritas dan kegiatan prioritas, diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
 - a. Program Prioritas Pengendalian inflasi daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Penguatan peran TPID;
 - Menjamin kelancaran pasokan dan distribusi;
 - Penguatan sistem logistik provinsi;
 - Diversifikasi pangan untuk mengendalikan volatilitas harga.
 - b. Program Prioritas Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan ketahanan pangan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Pengembangan komoditas unggulan daerah dan perikanan budidaya;
 - Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan jagung di KPPN Pandeglang (PN);
 - Penguatan koordinasi stakeholder sektor unggulan daerah;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan.
 - c. Program Prioritas Revitalisasi Industri dan Perdagangan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Peningkatan hubungan industrial antara pekerja, pemerintah dan pengusaha;
 - Dukungan infrastruktur dan pasokan bahan baku;
 - Dukungan SDM tenaga kerja terampil;

- Peningkatan stabilitas kamtibmas.
- d. Program Prioritas Peningkatan investasi daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - Penyederhanaan dan percepatan perizinan;
 - Peningkatan ketersediaan infrastruktur investasi;
 - Keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - Kemudahan akses pasokan bahan baku;
 - Kemudahan akses tenaga kerja terampil;
 - Fasilitasi promosi;
 - Peningkatan stabilitas kamtibmas;
 - Peningkatan dukungan kebijakan investasi.
- e. Program Prioritas Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Skema pembiayaan dan akses permodalan;
 - Fasilitasi start-up dan inkubasi;
 - Peningkatan informasi, promosi dan pemasaran;
 - Peningkatan standar kualitas: perijinan dan sertifikasi;
 - Penjaminan supply and demand;
 - Kemitraan dan Link and match dengan e-commerce;
 - Inovasi, teknologi dan branding;
 - Revitalisasi PLUT Banten untuk SDM UMKM;
 - Pengembangan kewirausahaan perempuan;
 - Pengembangan kewirausahaan pemuda.
- f. Program Prioritas Pengembangan pariwisata, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Pengembangan destinasi wisata;
 - Peningkatan dukungan infrastruktur destinasi wisata;
 - Peningkatan promosi dan pemasaran;
 - Peningkatan SDM dan kelembagaan pariwisata;
 - Peningkatan jaminan keamanan dan 3K

pada destinasi wisata.

- g. Program Prioritas Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Revitalisasi SMK, terutama pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan;
 - Revitalisasi BLKI, yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas;
 - Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - Peningkatan kerjasama dengan BBLKI;
 - Kerjasama pemagangan dengan negara/daerah lain.
- h. Program Prioritas Adopsi dan Inovasi IPTEK, untuk memberikan nilai tambah ekonomi, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Akselerasi Peran Iptek dalam diversifikasi Produk Olahan hasil Pertanian dan Perikanan;
 - Kolaborasi Akademisi, Bisnis dan Government dalam perwujudan Ekonomi Digital;
 - Penerapan Inovasi dan Iptek.
2. Prioritas Daerah Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
 - a. Program Prioritas Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Penuntasan pembangunan USB dan RKB;
 - Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Provinsi (pembangunan Rumah Sakit Cibaliung dan Ciligrang);
 - Perluasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau;
 - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - Pengelolaan sampah dan limbah;
 - Dukungan pemulihan infrastruktur pasca bencana (Kawasan Pesisir Selat Sunda dan bencana lainnya);
 - Penyediaan sarana tenaga listrik di perdesaan.

- b. Program Prioritas Pembangunan infrastruktur ekonomi, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata;
 - Optimalisasi infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan usaha tani);
 - Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang;
 - Pengembangan pusat logistik pangan provinsi dan regional;
 - Peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan;
 - Dukungan penyelenggaraan SAUM SMA (Sistem Angkutan Umum Masal Serang metropolitan Area).
- c. Program Prioritas Pengembangan kawasan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
 - Pengembangan pusat industri manufaktur, sektor industri kreatif dan jasa di KEK Tanjung Lesung (PN);
 - Pengembangan Kawasan Perdesaan di daerah entas: Pandeglang dan Lebak (PN);
 - Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Pandeglang (PN);
 - Pengembangan kawasan Serang metropolitan area.
 - Dukungan pembangunan Kota Baru Maja
- d. Program Prioritas Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - Pengelolaan dan konservasi hutan;Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana;
 - Mitigasi struktural dan non structural untuk pengurangan risiko bencana;
 - Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dan zonasi;

- Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
 - Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kebencanaan;
 - Pemenuhan logistik kebencanaan;
 - Peningkatan koordinasi antar stakeholder lingkungan hidup.
- e. Program Prioritas Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi dengan universitas;
 - Penguatan Provinsi Banten di forum kerjasama Jabodetabekjur dan wilayah perbatasan lainnya;
 - Penguatan kerjasama dengan provinsi/daerah lain;
 - Penguatan kerjasama dengan negara asing;
 - Penguatan kerjasama dengan forum tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan;
 - Penguatan kerjasama dengan komunitas;
 - Penguatan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil.
- f. Prioritas Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- g. Program Prioritas Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, air minum, sanitasi);
 - Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
 - Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
 - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - Penanganan anak tidak sekolah;
 - Penanganan stunting.
- h. Program Prioritas Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penerapan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - Peningkatan kolaborasi stakeholder kependudukan;

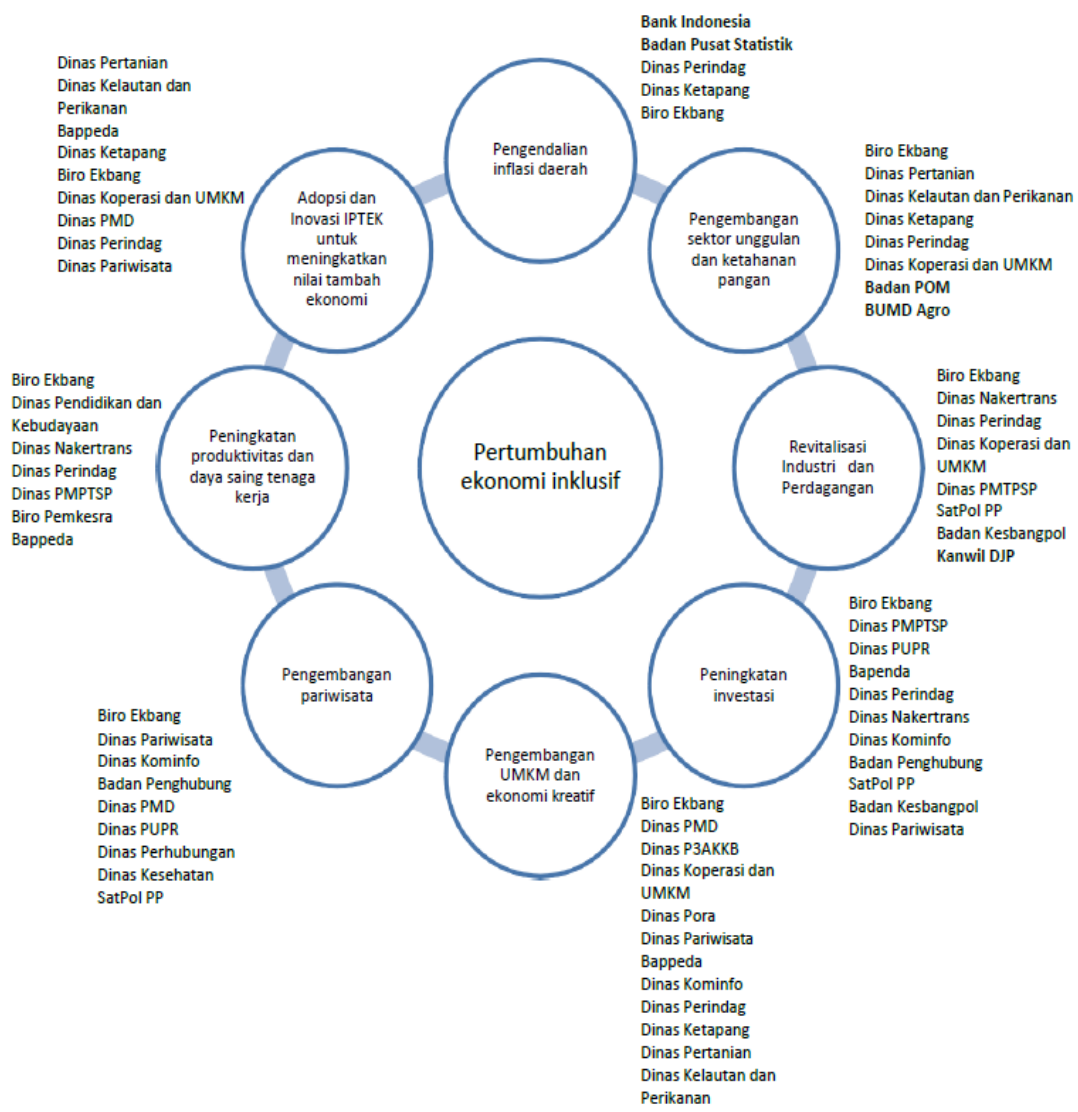
- Dukungan perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (PN);
 - Dukungan perluasan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang (PN).
- i. Program Prioritas Pengentasan kemiskinan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan basis data untuk integrasi bantuan social;
 - Revitalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan;
 - Peningkatan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan (penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat pesisir dan hutan, penguatan wirausaha pemuda);
 - Perluasan jenis dan penerima manfaat bantuan sosial;
 - Perluasan penerima manfaat Jamsosratu.
- j. Program Prioritas Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan sistem informasi data gender dan anak;
 - Penguatan perlindungan perempuan dan anak;
 - Pengembangan Provinsi Layak Anak;
 - Penguatan PUG-PPRG;
 - Peningkatan sinergitas penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- k. Program Prioritas Pembudayaan olahraga, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pelajar;
 - Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga;
 - Optimalisasi fasilitas dan sarana olah raga milik Pemprov Banten.
- l. Program Prioritas Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Peningkatan budaya literasi sekolah;

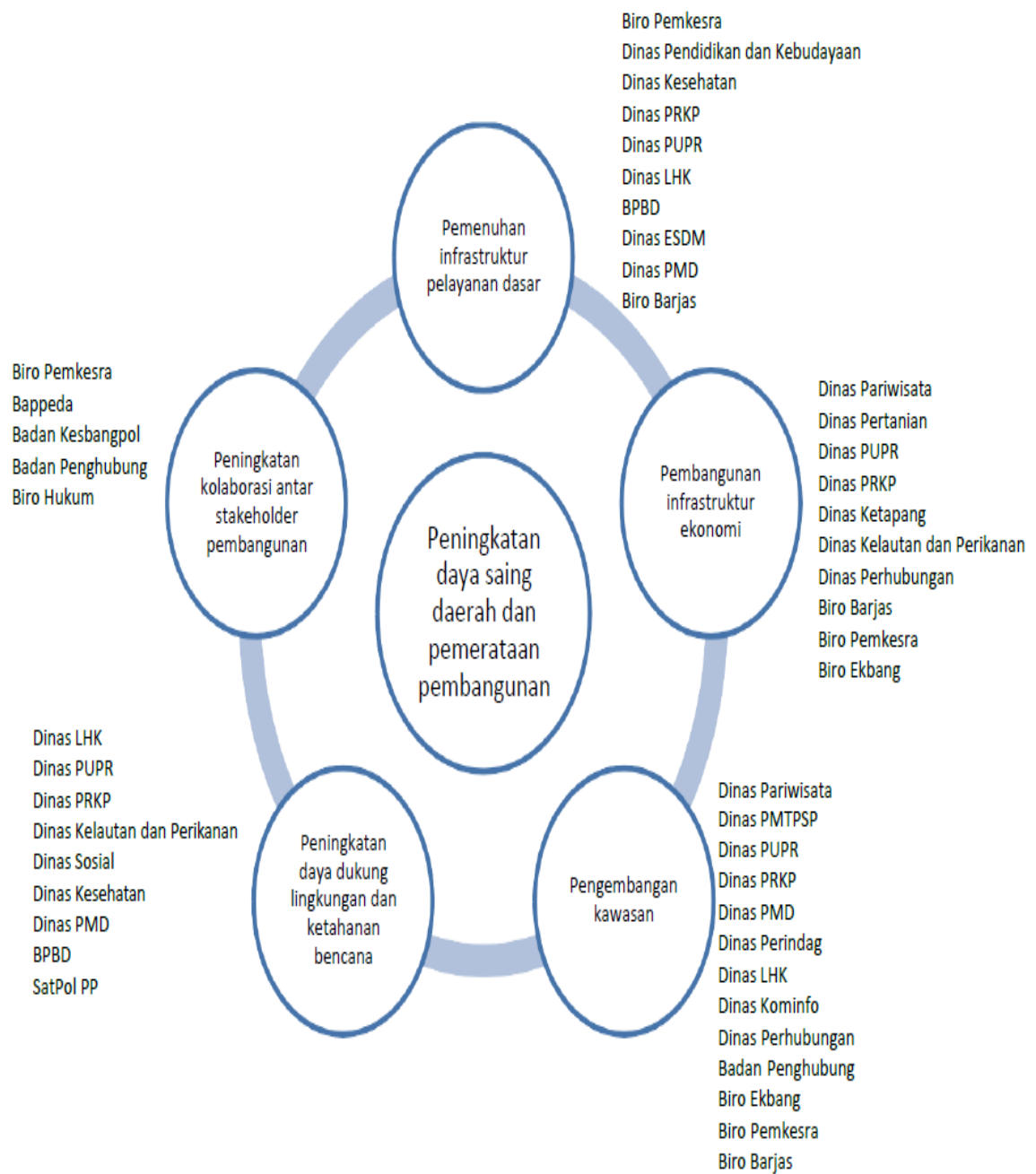
- Peningkatan budaya literasi masyarakat dan desa;
 - Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat;
 - Fasilitasi pelayanan hak atas kekayaan intelektual.
- m. Program Prioritas Revolusi Mental dan Pelestarian kebudayaan daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan Pendidikan karakter;
 - Penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara;
 - Penguatan kualitas dan peran keluarga dalam pembentukan karakter;
 - Peningkatan pelayanan kepemudaan;
 - Optimalisasi fungsi museum;
 - Pengelolaan cagar budaya;
 - Pembinaan lembaga adat;
 - Peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan;
 - Pelestarian sejarah, tradisi dan budaya.
3. Prioritas Daerah Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
- a. Program Prioritas Penguatan kelembagaan dan tatalaksana, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Finalisasi penyederhanaan birokrasi;
 - Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Peningkatan keterbukaan informasi publik;
 - Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;
 - Peningkatan kualitas budaya kerja;
 - Peningkatan penyelenggaraan kearsipan daerah;
 - Peningkatan kualitas produk hukum daerah.
- b. Program Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan;
 - Peningkatan kompetensi dan perilaku SDM pelayanan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
 - Peningkatan zona integritas dan wilayah bebas korupsi;
 - Peningkatan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.
- c. Program Prioritas Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur, kegiatan prioritas diarahkan pada:

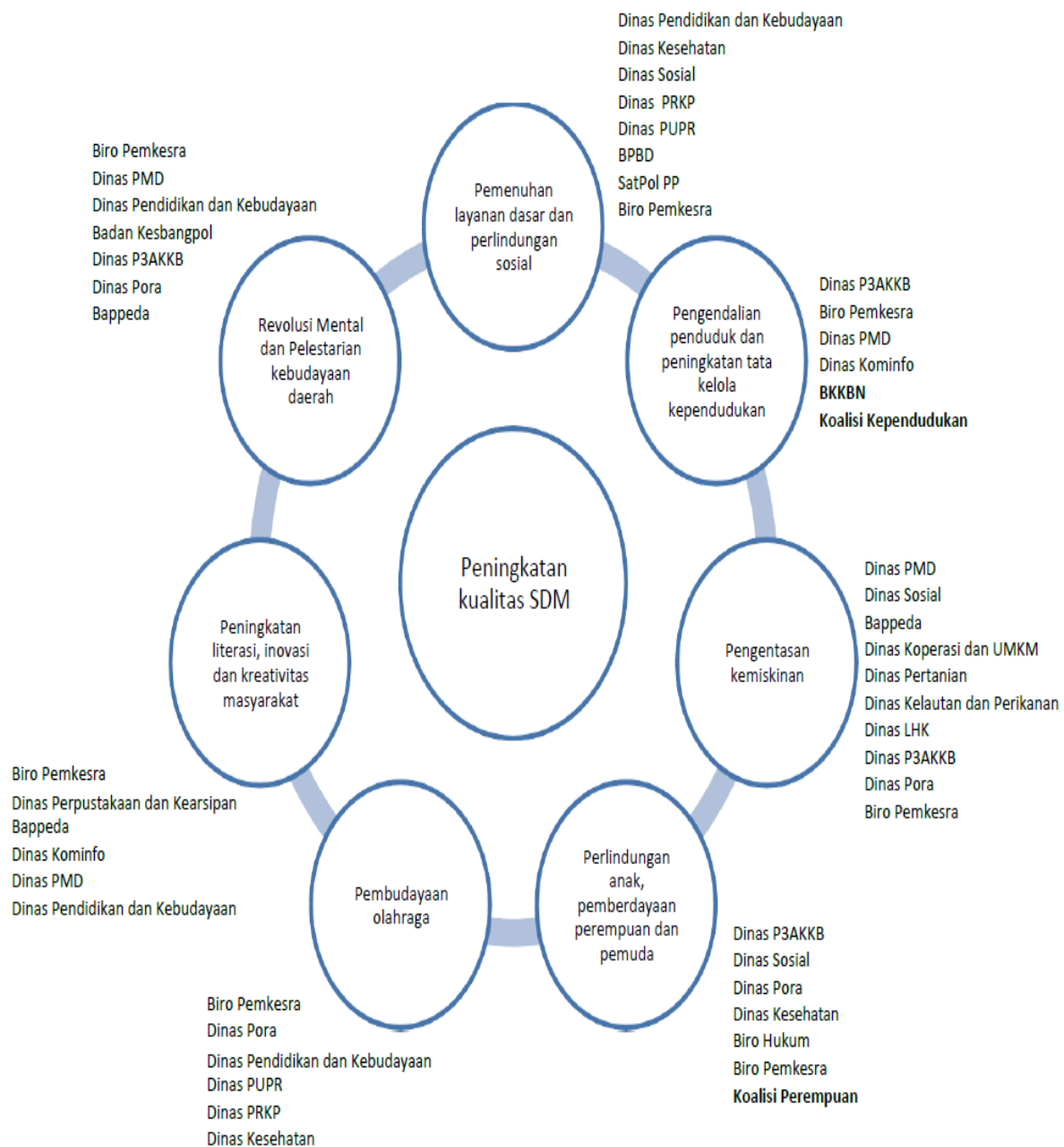
- Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN;
 - Penataan Anjab, ABK, Standar Kompetensi;
 - Implementasi manajemen talenta (talent pool);
 - Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan HCDP.
- d. Program Prioritas Peningkatan tata kelola keuangan dan aset, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah;
 - Peningkatan pengawasan pelaksanaan APBD;
 - Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - Peningkatan pendapatan asli daerah.
 - Peningkatan kualitas penatausahaan kekayaan dan kewajiban daerah
- e. Program Prioritas Penguatan penerapan SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan cross-cutting program dan kegiatan;
 - Peningkatan kualitas pengukuran kinerja;
 - Peningkatan kualitas pelaporan kinerja;
 - Peningkatan kualitas evaluasi kinerja;
 - Peningkatan kualitas capaian kinerja.
- f. Program Prioritas Peningkatan riset dan inovasi daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan basis data pemerintahan daerah;
 - Optimalisasi hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - Peningkatan inovasi daerah;
 - Peningkatan kolaborasi stakeholder kelitbangan.
- g. Program Prioritas Peningkatan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;

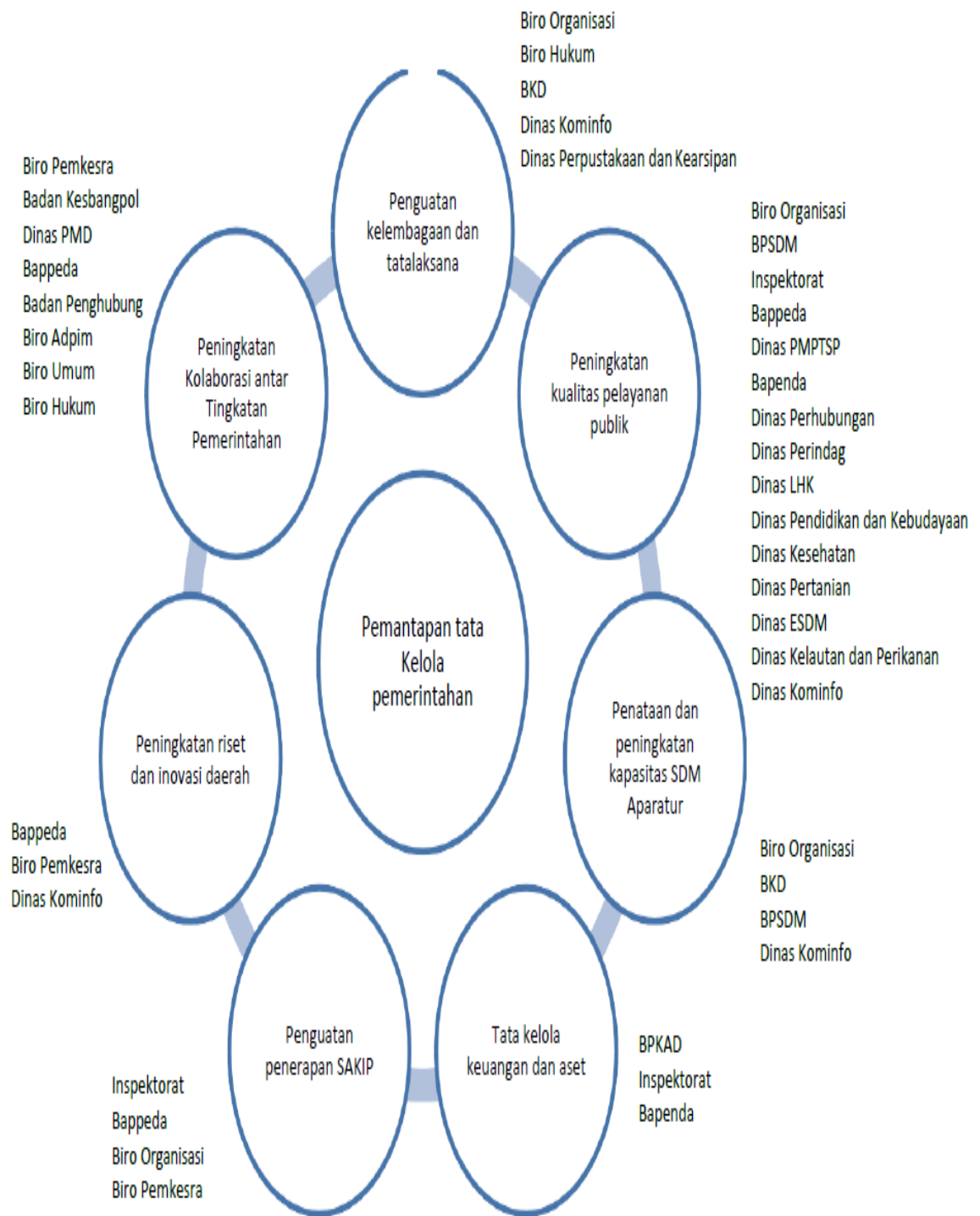
- Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Peningkatan fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota;
- Peningkatan stabilitas politik, hukum dan keamanan.

Dalam pendekatan HTIS, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, pendekatan integratif diselenggarakan dengan mengintegrasikan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas. Untuk mencapai indikator dan target kinerja pada setiap program prioritas, dalam rangka mencapai indikator dan target kinerja prioritas pembangunan daerah, dilakukan integrasi beberapa perangkat daerah dan institusi di luar perangkat daerah Provinsi Banten, sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan prioritas, sebagai berikut









Selain mengintegrasikan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu, beberapa kegiatan prioritas dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 adalah berbasis lokasi spasial tertentu, seperti:

- Pengembangan komoditas unggulan daerah dan perikanan budidaya akan dipusatkan di Kabupaten Pandeglang;
- Untuk mendukung Prioritas Nasional, pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan jagung akan dipusatkan di KPPN Pandeglang;
- Dalam rangka menunjang investasi daerah, maka peningkatan ketersediaan infrastruktur, berupa pemenuhan jalan Provinsi sesuai standar teknis dan pemeliharaan jembatan yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Banten;
- Fasilitasi promosi akan dipusatkan di Kota Serang;
- Pengembangan kewirausahaan perempuan, pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan UMKM, sehingga akan dipusatkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- Pengembangan destinasi wisata, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, promosi dan pemasaran, serta jaminan keamanan dan 3K, akan dipusatkan di Kabupaten Lebak;
- Pembangunan USB untuk pemerataan akses pendidikan menengah dan khusus, akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Banten;
- Pengembangan Rumah Sakit Provinsi akan dilaksanakan di Kota Serang dan Kabupaten Lebak;
- Pembangunan Rumah Sakit Provinsi akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan dipusatkan di Kota Serang dan Kabupaten Serang;
- Pengelolaan sampah dan limbah akan dilaksanakan di Kabupaten Lebak;
- Pemulihan infrastruktur pasca bencana akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- Pembangunan infrastruktur pertanian untuk mendukung

pengembangan produk unggulan daerah dan ketersediaan pangan akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang.

- Untuk mendukung Jalan Tol Serang–Panimbang, maka Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan pembangunan jalan akses Cikeusal-Boru di Kabupaten Serang dan Kota Serang;
- Pengembangan pusat logistik pangan provinsi dan regional akan dipusatkan di Kabupaten Serang;
- Lokasi prioritas untuk peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- Untuk mendukung penyelenggaraan SAUM SMA (Sistem Angkutan Umum Masal Serang metropolitan Area), akan dilaksanakan di Kota Serang dan Kabupaten Serang;
- Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, akan dilaksanakan di Kabupaten Lebak;
- Untuk mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan di daerah yang menjadi Prioritas Nasional akan dipusatkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- Pengelolaan dan konservasi hutan akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- Mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana akan dilaksanakan di daerah-daerah rawan bencana, di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang;
- Dalam rangka mendukung perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK), lokasi prioritas adalah di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
- Untuk mendukung perluasan kepemilikan akta kelahiran, lokasi prioritas adalah di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang;
- Dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat dan desa, layanan perpustakaan keliling akan diarahkan pada 15 desa tertinggal di Provinsi Banten.

Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri telah

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menentukan bahwa penyusunan RKPD provinsi adalah sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. Sehubungan dengan itu, terhadap prioritas daerah dilakukan penyelarasan antara indikasi program prioritas dengan program dalam RPJMD, serta program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penyelarasan tersebut sebagaimana dituangkan dalam tabel 4.9 berikut

Tabel 4. 7
Penyelarasan program prioritas dengan program dalam RPJMD, serta program dalam
Kepmendagri 050-3708/2020

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
1	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif				
	a	Pengendalian inflasi daerah	Penguatan peran TPID	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting
			Menjamin kelancaran pasokan dan distribusi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting
			Penguatan sistem logistik provinsi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Diversifikasi pangan untuk mengendalikan volatilitas harga	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	b	Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan ketahanan pangan	Pengembangan komoditas unggulan daerah dan perikanan budidaya	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
				Program Pembangunan Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
				Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya
			Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan jagung di KPPN Pandeglang (PN)	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Penguatan koordinasi stakeholder sektor unggulan daerah	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Program Keterjangkauan Pangan, Program Peningkatan Ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
	c	Revitalisasi Industri dan Perdagangan	Peningkatan hubungan industrial antara pekerja, pemerintah dan pengusaha	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program hubungan industrial
				Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program pengendalian izin usaha industri
			Dukungan infrastruktur dan pasokan bahan baku	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program hubungan industrial
				Program Peningkatan Daya Saing Industri	Program perencanaan dan pembangunan industri
			Dukungan SDM tenaga kerja terampil	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Program pengembangan kurikulum
			Peningkatan stabilitas kamtibmas	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program pengawaasan ketenagakerjaan
				Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	Program standardisasi dan perlindungan konsumen

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
	d	Peningkatan investasi daerah	Penyediaan data dan informasi peluang investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
			Penyederhanaan dan percepatan perizinan	Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Program pelayanan penanaman modal
				Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur investasi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program pengembangan permukiman
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program penyelenggaraan jalan
				Program Keciaptakaryaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			Keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal
				Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Program perencanaan dan pembangunan industri
			Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Kemudahan akses pasokan bahan baku	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Kemudahan akses tenaga kerja terampil	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program penempatan tenaga kerja
				Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Program pengembangan kurikulum
			Fasilitasi promosi	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Program promosi penanaman modal
				Program Pembangunan Kemitraan	Program Pelayanan Penghubung
			Peningkatan stabilitas kamtibmas	Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
			Peningkatan dukungan kebijakan investasi	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	Program perekonomian dan Pembangunan
	e	Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif	Skema pembiayaan dan akses permodalan	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM
				Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Fasilitasi start-up dan inkubasi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM
			Peningkatan informasi, promosi dan pemasaran	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM
				Program Pembangunan Kemitraan	Program Pelayanan Penghubung
			Peningkatan standar kualitas: perijinan dan sertifikasi	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pengembangan UMKM
			Penjaminan supply and demand	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Kemitraan dan Link and match dengan e-commerce	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Inovasi, teknologi dan branding	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
				Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Revitalisasi PLUT Banten untuk SDM UMKM	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Pengembangan perempuan kewirausahaan	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
			Pengembangan pemuda	kewirausahaan Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM
				Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Dayasaing Kepemudaan
	f	Pengembangan pariwisata	Pengembangan destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Peningkatan dukungan infrastruktur destinasi wisata	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
			Peningkatan promosi dan pemasaran	Program Pemasaran Produk Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
			Peningkatan SDM dan kelembagaan pariwisata	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
			Peningkatan jaminan keamanan dan 3K pada destinasi wisata	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	g	Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Revitalisasi SMK, terutama pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan	Program Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Program Pendidikan Menengah	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
			Revitalisasi BLKI, yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
			Peningkatan kerjasama dengan BBLKI	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Kerjasama pemagangan dengan negara/daerah lain	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	h	Adopsi dan Inovasi IPTEK, untuk memberikan nilai tambah ekonomi	Akselerasi Peran Iptek dalam diversifikasi Produk Olahan hasil Pertanian dan Perikanan	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
				Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Kolaborasi Akademisi, Bisnis dan Government dalam perwujudan Ekonomi Digital	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Penerapan Inovasi dan Iptek	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Peningkatan Daya Saing Daerah dan				

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
Pemerataan Pembangunan					
	a	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Penuntasan pembangunan USB dan RKB	Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan
			Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Provinsi (pembangunan Rumah Sakit Cibaliung dan Ciligrang)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Perluasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Keciaptakaryaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Pengelolaan sampah dan limbah	Program Keciaptakaryaan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Dukungan pemulihan infrastruktur pasca bencana (Kawasan Pesisir Selat Sunda dan bencana lainnya)	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
			Penyediaan sarana tenaga listrik di perdesaan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	b	Pembangunan infrastruktur ekonomi	Dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
			Optimalisasi infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan usaha tani)		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
				Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Pengembangan pusat logistik pangan provinsi dan regional	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
			Peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan	Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Dukungan penyelenggaraan SAUM SMA (Sistem Angkutan Umum Masal Serang metropolitan Area)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	c	Pengembangan kawasan	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Pengembangan pusat industri manufaktur, sektor industri kreatif dan jasa di KEK Tanjung Lesung (PN)	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Pengembangan Kawasan Perdesaan di daerah entas: Pandeglang dan Lebak (PN)	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Program Peningkatan Kerjasama Desa
			Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Pandeglang (PN)	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Program Peningkatan Kerjasama Desa
			Pengembangan kawasan Serang metropolitan area	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Dukungan pembangunan Kota Baru Maja	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
	d	Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Pengelolaan dan konservasi hutan	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Program Pengelolaan Hutan
				Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
				Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
				Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
			Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana	Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dan zonasi	Program Penatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penatan Ruang

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
			Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kebencanaan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Pemenuhan logistik kebencanaan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Peningkatan koordinasi antar stakeholder lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	e	Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan	Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi dengan universitas	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Penguatan Provinsi Banten di forum kerjasama Jabodetabekjur dan wilayah perbatasan lainnya	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Penguatan kerjasama dengan provinsi/daerah lain	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Penguatan kerjasama dengan negara asing	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Penguatan kerjasama dengan forum tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Penguatan kerjasama dengan komunitas	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Penguatan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	a	Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kegiatan prioritas diarahkan pada:	Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, air minum, trantibum)	Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan
				Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
				Program Keciaptakaryaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial
				Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
			Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
			Penanganan anak tidak sekolah	Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus	Program pengelolaan pendidikan
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial
			Penanganan stunting	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	b	Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan, kegiatan prioritas diarahkan pada:	Penerapan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			Peningkatan kolaborasi stakeholder kependudukan	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pendaftaran penduduk

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Dukungan perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (PN)	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pencatatan sipil
			Dukungan perluasan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang (PN)	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pencatatan sipil
	c	Pengentasan kemiskinan	Penguatan basis data untuk integrasi bantuan sosial	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			Revitalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan Fakir Miskin	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
			Peningkatan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan (penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat pesisir dan hutan, penguatan wirausaha pemuda)	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
				Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
				Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			Perluasan jenis dan penerima manfaat bantuan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
			Perluasan penerima manfaat Jamsosratu	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
	d	Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda	Penguatan sistem informasi data gender dan anak	Program Pemberdayaan Perempuan	Program pengelolaan sistem data gender dan anak
			Penguatan perlindungan perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan perempuan
				Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan khusus anak
			Pengembangan Provinsi Layak Anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan khusus anak
			Penguatan PUG-PPRG	Program Pemberdayaan Perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Peningkatan penyelenggaraan Kepemudaan	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
	e	Pembudayaan olahraga	Pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pelajar	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan
			Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan
			Optimalisasi fasilitas dan sarana olah raga milik Pemprov Banten	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan
	f	Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat	Peningkatan budaya literasi sekolah	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan
			Peningkatan budaya literasi masyarakat dan desa	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan
			Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
			Fasilitasi pelayanan hak atas kekayaan intelektual	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
	g	Revolusi Mental dan Pelestarian kebudayaan daerah	Penguatan kualitas dan peran keluarga dalam pembentukan karakter	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program peningkatan kualitas keluarga
				Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Peningkatan pelayanan kepemudaan	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
			Optimalisasi fungsi museum	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengelolaan permuseuman
			Pengelolaan cagar budaya	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
			Pembinaan lembaga adat	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
			Peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
			Pelestarian sejarah, tradisi dan budaya	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pembinaan sejarah
4	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan				
	a	Penguatan kelembagaan dan tatalaksana	Finalisasi penyederhanaan birokrasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program pengelolaan aplikasi informatika
			Peningkatan keterbukaan informasi publik	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Penataan Organisasi

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Peningkatan kualitas budaya kerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Penataan Organisasi
			Peningkatan penyelenggaraan kearsipan daerah	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip
			Peningkatan kualitas produk hukum daerah	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	b	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Penataan Organisasi
			Peningkatan kompetensi dan perilaku SDM pelayanan	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	Program tata kelola pemerintahan (seluruh OPD)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
			Peningkatan zona integritas dan wilayah bebas korupsi	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan
				Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
			Peningkatan inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
	c	Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	Program Kepegawaian Daerah
			Penataan Anjab, ABK, Standar Kompetensi	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
			Implementasi manajemen talenta (talent pool)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah
			Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan HCDP	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah
	d	Peningkatan tata kelola keuangan dan aset	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan pengawasan pelaksanaan APBD	Program Penatausahaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan pendapatan asli daerah	Program Peningkatan Pajak Daerah Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan kualitas penatausahaan kekayaan dan kewajiban daerah	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
	e	Penguatan SAKIP penerapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan <i>cross-cutting</i> program dan kegiatan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
			Peningkatan kualitas pengukuran kinerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas pelaporan kinerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
			Peningkatan kualitas evaluasi kinerja	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Peningkatan kualitas capaian kinerja	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	f	Peningkatan riset dan inovasi daerah	Penguatan basis data pemerintahan daerah	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Optimalisasi hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Peningkatan inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
			Peningkatan kolaborasi stakeholder kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
	g	Peningkatan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan	Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Penataan Desa
			Peningkatan fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Peningkatan stabilitas politik, hukum dan keamanan	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
				Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
				Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
				Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 sebagai turunan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, telah ditetapkan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022, seperti tabel berikut ini:

Tabel 4. 8
Target Indikator Utama Provinsi Banten Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,5	3,5
2	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	A
3	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	A	A
4	Capaian kinerja infrastruktur daerah	%	100	100
5	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	90	90
6	Indeks Pembangunan Manusia	%	73,40-74,16	72,60 – 73,68
7	Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,370	0,370
8	Kemiskinan	%	4,99-5,4	4,99 – 5,4
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84	9,7-9,2
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15	15
11	Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9.3	9.3
12	Daya Beli	%	100	100
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	100	100
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	92,79	92,79
15	Angka Harapan Hidup	%	70,96	70,96
16	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	285	285
17	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	26	26

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0 – 5,6	5,0 – 5,6
19	Tingkat Inflasi	%	3,4 - 4	3,4 - 4
20	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	6,4	6,4
21	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	3	3
22	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	5	5
23	Emisi Rumah Kaca	%	100	100

Tabel 4. 9

Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Fokus Kesejahteraan Masyarakat			
1101	Pendidikan			
1	Harapan lama sekolah	Tahun	15	15
1	Rata rata lama sekolah	Tahun	9,3	9,3
1102	Kesehatan			
1	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	285	285
1	Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	26	26
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1106	Sosial			
1	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	2,08	2,08
1201	Ketenaga Kerjaan			
1	Daya beli	%	100	100
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	5,74	5,74
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	100	100
2	ASPEK PELAYANAN UMUM			
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1101	Pendidikan			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	80	80
2	Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	65	65
2	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	%	100	100
1102	Kesehatan			
2	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	227	227
2	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	100	100
2	Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jumlah	1.129,00	1.129,00
2	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	%	80	80
2	BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	75	75
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	90	90
2	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	42,42	42,42
2	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	100	100
2	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	100	100
2	Luas layanan irigasi	Ha	20.888,19	20.888,19
2	Persentase penyediaan prasarana air baku	%	100	100
1104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
2	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375,29	375,29
2	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	100	100
2	Persentase Rumah Layak Huni	%	88,66	88,66
2	cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	20	20
1105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
2	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	80	80
2	Indeks Resiko Bencana	Nilai	110	110

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
2	Rasio Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah	%	85	85
2	Penanganan konflik masyarakat	%	100	100
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
1201	Ketenaga Kerjaan			
2	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	46,29	46,29
1202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72,74	72,74
2	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100	100
2	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	92,79	92,79
1203	Pangan			
2	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	85	85
1205	Lingkungan Hidup			
2	Emisi Rumah Kaca	%	100	100
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	52,79	52,79
1206	Administrasi Kependudukan dan Capil			
2	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100	100
1207	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
2	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	%	25	25
1208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,26	2,26
1209	Perhubungan			
2	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	20	20
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	%	100	100
1210	Komunikasi dan Informatika			

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET CAPAIAN	
	SATUAN			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	
2	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	4	4	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90	90	
1211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
2	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	3	3	
2	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	6	6	
2	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	1	1	
1212	Penanaman Modal				
2	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	2,26	2,26	
2	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)				
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	20	20	
1213	Kepemudaan dan Olahraga		100	100	
2	Indeks Pembangunan Kepemudaan				
2	Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	4	4	
1214	Statistik	Nilai	90	90	
2	Maturitas Data Base Statistik Sektoral				
2	Maturitas SIPD	%	3	3	
1215	Persandian	%	6	6	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	1	1	
1216	Kebudayaan				
2	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	5	5	
1217	Perpustakaan	%	53,9	53,9	
2	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	85,97	85,97	
1218	Kearsipan				
2	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	45	45	
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	%	45	45	
2001	Kelautan dan Perikanan				
2	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	100	100	
2002	Pariwisata				
2	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	3,09	3,09	
2003	Pertanian				

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	6,4	6,4
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	6,2	6,2
2004	Kehutanan			
2	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	33,21	33,21
2005	Energi dan Sumberdaya Mineral			
2	Rasio elektrifikasi	%	100	100
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB		0,6	0,6
2006	Perdagangan			
2	LPE Sektor Perdagangan	%	6,9	6,9
2	Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	4	4
2007	Perindustrian			
2	LPE Sektor Perindustrian	%	4,7	4,7
2	Fokus Administrasi Pemerintahan			
3001	Administrasi Pemerintahan			
2	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100	100
2	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	100	100
2	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100
2	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	100	100
2	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	100	100
2	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100
2	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	100	100
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	100	100
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	100	100
2	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	85	85
2	Persentase Manajemen Reformasi birokrasi	%	100	100
2	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	85	85
2	Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	100	100
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85	85
3002	Pengawasan			
2	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	4	4
2	Capaian Kapabilitas APIP	Level	4	4
3003	Perencanaan			
2	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	80	80
2	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	85	85
3004	Keuangan			
2	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	100	100
2	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	64,44	64,44
3005	Kepegawaian			
2	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	95	95
3006	Pendidikan dan Pelatihan			
2	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	30	30
3007	Penelitian dan Pengembangan			
2	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	100	100
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
3	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	92,5	92,5

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan hasil dari formulasi rangkaian pembahasan pada bab sebelumnya. Program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang bersifat politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up*.

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD/APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2022, maka disusun Perubahan Rencana kerja tahun 2022 serta pagu indikatifnya. Perubahan Rencana kerja tahun 2022 dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022 berdasarkan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.865.119.408.000	2.940.656.053.706	75.536.645.706
2	Dinas Kesehatan	1.178.360.505.919	1.305.156.547.908	126.796.041.989
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	960.198.845.000	845.929.450.380	(114.269.394.620)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	916.040.161.000	868.096.236.394	(47.943.924.606)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	35.537.925.000	39.470.504.500	3.932.579.500
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.484.844.000	27.453.093.000	968.249.000
7	Dinas Sosial	89.288.365.000	92.239.629.000	2.951.264.000
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	58.906.826.000	69.017.137.000	10.110.311.000
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	29.247.020.000	32.936.285.000	3.689.265.000
10	Dinas Ketahanan Pangan	17.770.368.000	20.622.914.000	2.852.546.000
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.747.171.000	55.979.290.000	5.232.119.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.834.163.000	21.276.086.700	2.441.923.700
13	Dinas Perhubungan	54.297.231.000	58.264.795.000	3.967.564.000
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	42.186.312.938	43.755.063.850	1.568.750.912
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.847.260.000	26.015.461.000	1.168.201.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.031.508.000	23.702.883.000	671.375.000
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	61.137.954.000	74.304.325.400	13.166.371.400
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.940.225.000	23.666.301.200	1.726.076.200
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	78.285.837.000	78.502.451.000	216.614.000
20	Dinas Pariwisata	52.303.870.000	49.698.987.000	(2.604.883.000)
21	Dinas Pertanian	88.698.801.000	91.581.374.000	2.882.573.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	39.354.218.000	39.871.501.320	517.283.320
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.062.234.000	48.103.757.000	(35.958.477.000)
24	Sekretariat Daerah	286.475.249.931	278.612.947.050	(7.862.302.881)
25	Sekretariat DPRD	477.786.813.000	522.035.202.850	44.248.389.850
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.379.595.000	51.384.349.785	4.004.754.785
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.040.643.516.443	3.300.924.446.907	260.280.930.464
28	Badan Pendapatan Daerah	322.081.614.000	303.843.344.708	(18.238.269.292)
29	Badan Kepegawaian Daerah	39.905.019.000	42.470.469.502	2.565.450.502
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57.289.068.000	56.461.112.100	(827.955.900)
31	Badan Penghubung	8.237.678.000	9.390.716.725	1.153.038.725
32	Inspektorat	59.927.967.000	74.534.948.000	14.606.981.000
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.772.663.000	68.373.581.000	1.600.918.000
JUMLAH		11.223.180.236.231	11.584.331.245.985	361.151.009.754

Pagu Indikatif Perangkat Daerah mengalami penambahan sebesar Rp361.151.009.754,- sebelum perubahan sebesar Rp11.223.180.236.231,- setelah perubahan menjadi Rp11.584.331.245.985,-. Perubahan pagu indikatif diikuti dengan perubahan target indikator kegiatan yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya dan dijabarkan dalam lampiran.

Tabel 5.2
Perubahan Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022 berdasarkan Urusan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.066.201.088.319	6.114.088.449.288	47.887.360.969	
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2.860.290.442.400	2.935.742.988.106	75.452.545.706	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.178.360.505.919	1.305.156.547.908	126.796.041.989	Dinas Kesehatan
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	960.198.845.000	845.929.450.380	(114.269.394.620)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		471.945.000.000	426.249.656.176	(45.695.343.824)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	444.095.161.000	441.846.580.218	(2.248.580.782)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	35.537.925.000	39.470.504.500	3.932.579.500	Satuan Polisi Pamong Praja
		26.484.844.000	27.453.093.000	968.249.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	89.288.365.000	92.239.629.000	2.951.264.000	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	401.849.362.338	448.967.191.550	47.117.829.212	
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	58.906.826.000	69.017.137.000	10.110.311.000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	27.533.742.000	30.609.809.000	3.076.067.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	17.770.368.000	20.622.914.000	2.852.546.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	44.821.528.800	50.492.873.800	5.671.345.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	463.278.000	463.278.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	18.834.163.000	21.276.086.700	2.441.923.700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.250.000.000	1.863.198.000	613.198.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	54.297.231.000	58.264.795.000	3.967.564.000	Dinas Perhubungan
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	40.256.440.000	41.462.065.600	1.205.625.600	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	24.847.260.000	26.015.461.000	1.168.201.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	23.031.508.000	23.702.883.000	671.375.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	61.137.954.000	74.304.325.400	13.166.371.400	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	468.668.000	379.630.000	(89.038.000)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1.461.204.938	1.913.368.250	452.163.312	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4.828.965.600	4.913.065.600	84.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	20.541.225.000	22.790.715.200	2.249.490.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.399.000.000	875.586.000	(523.414.000)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	348.630.602.200	313.244.486.520	(35.386.115.680)	
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	78.285.837.000	78.502.451.000	216.614.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	52.303.870.000	49.698.987.000	(2.604.883.000)	Dinas Pariwisata
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	88.698.801.000	91.581.374.000	2.882.573.000	Dinas Pertanian
3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	5.925.642.200	5.486.416.200	(439.226.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	39.354.218.000	39.871.501.320	517.283.320	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6.480.000.000	5.795.000.000	(685.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	77.582.234.000	42.308.757.000	(35.273.477.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	764.262.062.931	800.648.149.900	36.386.086.969	
4.01	Sekretariat Daerah	286.475.249.931	278.612.947.050	(7.862.302.881)	Sekretariat Daerah
4.02	Sekretariat Dprd	477.786.813.000	522.035.202.850	44.248.389.850	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.515.536.490.443	3.764.474.439.727	248.937.949.284	
5.01	Perencanaan	45.644.266.000	49.758.734.285	4.114.468.285	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02	Keuangan	3.040.643.516.443	3.300.924.446.907	260.280.930.464	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		322.081.614.000	303.843.344.708	(18.238.269.292)	Badan Pendapatan Daerah
5.03	Kepegawaian	39.905.019.000	42.470.469.502	2.565.450.502	Badan Kepegawaian Daerah
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	57.289.068.000	56.461.112.100	(827.955.900)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1.735.329.000	1.625.615.500	(109.713.500)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.07	Pengelolaan Penghubung	8.237.678.000	9.390.716.725	1.153.038.725	Badan Penghubung
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	59.927.967.000	74.534.948.000	14.606.981.000	
6.01	Inspektorat Daerah	59.927.967.000	74.534.948.000	14.606.981.000	Inspektorat
8	Unsur Pemerintahan Umum	66.772.663.000	68.373.581.000	1.600.918.000	
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	66.772.663.000	68.373.581.000	1.600.918.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
JUMLAH		11.223.180.236.231	11.584.331.245.985	361.151.009.754	

Disamping itu dengan diterapkannya Permendagri 90 tahun 2019 maka Nomenklatur Program dan Kegiatan telah mengacu pada regulasi tersebut dengan mengacu indikator pada RPJMD 2017-2022. Untuk Tahapan RKPD disajikan penyandingan Prioritas Daerah dengan Program Prioritas dan Program dalam Nomenklatur di dalam SIPD beserta OPD Pengampu. Tahapan selanjutnya dalam penyusunan RKPD dilakukan sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi beserta pagu indikatifnya.

Berikut tabel Perubahan Anggaran berdasarkan sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2022 dengan Program Prioritas, sebagai berikut:

Tabel 5.3
Perubahan Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022 berdasarkan Prioritas Daerah

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.024.800.000	1.173.669.000	148.869.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	200.000.000	200.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	308.000.000	308.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	340.000.000	340.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2.788.251.900	2.443.122.000	(345.129.900)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.413.112.750	1.240.767.000	(172.345.750)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Umkm	3.991.503.250	3.455.529.220	(535.974.030)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	850.000.000	935.000.000	85.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	2.300.000.000	1.930.000.000	(370.000.000)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	400.000.000	375.000.000	(25.000.000)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.409.114.000	870.654.000	(538.460.000)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	200.000.000	250.000.000	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.023.700.000	830.096.000	(193.604.000)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	35.470.911.310	31.234.362.310	(4.236.549.000)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.298.081.163	3.123.747.415	(174.333.748)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	259.100.000	164.100.000	(95.000.000)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	663.100.000	616.200.000	(46.900.000)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	26.003.574.000	21.648.574.000	(4.355.000.000)	Dinas Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	5.500.000.000	3.799.183.000	(1.700.817.000)	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.000.000.000	1.000.000.000	0	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.500.000.000	1.500.000.000	0	Dinas Pariwisata
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.606.732.200	12.789.330.162	182.597.962	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.375.816.750	1.900.482.276	(475.334.474)	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.695.309.038	3.051.486.850	1.356.177.812	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	300.000.000	300.000.000	0	Dinas Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	390.000.000	390.000.000	0	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	5.296.383.750	5.292.947.050	(3.436.700)	Dinas Pertanian

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	300.000.000	255.000.000	(45.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	600.000.000	500.000.000	(100.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.200.000.000	1.160.000.000	(40.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	1.300.000.000	1.300.000.000	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2.700.000.000	2.250.000.000	(450.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	380.000.000	330.000.000	(50.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.650.000.000	2.570.000.000	(80.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	150.000.000	140.000.000	(10.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	SUB JUMLAH	121.887.490.111	109.667.250.283	(12.220.239.828)	
2. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	125.199.545.720	123.128.454.820	(2.071.090.900)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.500.000.000	22.957.007.200	11.457.007.200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	300.000.000	-	(300.000.000)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.920.000.000	690.000.000	(1.230.000.000)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Bangunan	406.425.000.000	381.127.588.407	(25.297.411.593)	Dinas Perumahan Rakyat

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Gedung			)	dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	51.800.000.000	21.475.060.569	(30.324.939.431)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Jalan	701.420.352.230	589.950.876.178	(111.469.476.052)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	6.270.000.000	5.872.208.500	(397.791.500)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.450.000.000	5.101.200.000	(1.348.800.000)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	13.400.000.000	13.275.761.800	(124.238.200)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	56.965.000.000	56.349.139.900	(615.860.100)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	345.250.000.000	340.131.349.500	(5.118.650.500)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penanggulangan Bencana	6.356.980.000	5.456.550.000	(900.430.000)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	948.450.000	794.354.000	(154.096.000)	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.142.790.000	1.140.478.000	(2.312.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	25.020.000	25.020.000	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	433.600.000	476.730.000	43.130.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	316.800.000	276.800.000	(40.000.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Persampahan	1.827.949.900	1.877.949.900	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.774.117.000	18.407.471.000	(366.646.000)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	900.000.000	860.000.000	(40.000.000)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	398.850.000	398.850.000	0	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Hutan	3.694.924.200	3.541.140.200	(153.784.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	1.238.738.000	1.124.136.000	(114.602.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	416.800.000	286.300.000	(130.500.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	575.180.000	534.840.000	(40.340.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2.052.295.000	1.855.870.500	(196.424.500)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	542.593.000	524.391.000	(18.202.000)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	13.144.510.000	12.888.337.320	(256.172.680)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	SUB JUMLAH	1.779.689.495.050	1.610.527.864.794	(169.161.630.256)	
3. Peningkatan Kualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	1.638.078.378.813	1.637.125.250.843	(953.127.970)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
Sumber Daya Manusia					
	Program Pengembangan Kurikulum	400.000.000	400.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	81.695.000.000	94.695.000.000	13.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	702.226.271.919	785.370.855.975	83.144.584.056	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	39.484.528.000	28.992.879.000	(10.491.649.000)	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	435.994.000	185.618.750	(250.375.250)	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.215.206.500	2.538.257.500	(676.949.000)	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Sosial	1.599.250.000	2.099.250.000	500.000.000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	75.000.000	75.000.000	0	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	6.483.194.000	8.956.555.500	2.473.361.500	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	52.491.558.500	39.491.558.500	(13.000.000.000)	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	842.240.000	1.842.240.000	1.000.000.000	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	350.500.000	850.500.000	500.000.000	Dinas Sosial
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.713.886.600	4.713.886.600	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	581.100.000	581.100.000	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	1.869.503.000	1.869.503.000	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	716.032.000	716.032.000	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2.513.278.000	2.155.551.000	(357.727.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Perlindungan Perempuan	1.313.255.500	1.013.486.500	(299.769.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.646.472.000	2.357.448.000	(289.024.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	390.250.000	390.250.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	410.568.000	360.568.000	(50.000.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Perlindungan Khusus Anak	627.976.500	677.745.500	49.769.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Penataan Desa	725.000.000	685.000.000	(40.000.000)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.165.770.500	2.720.542.500	554.772.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pengendalian Penduduk	275.000.000	275.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
					Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	175.000.000	175.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	800.000.000	1.413.198.000	613.198.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.853.190.000	6.339.050.000	(514.140.000)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	30.861.405.400	43.220.780.499	12.359.375.099	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Kebudayaan	113.241.600	113.241.600	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.120.000.000	1.120.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	3.595.724.000	3.679.824.000	84.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.600.338.000	1.145.419.200	(454.918.800)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	SUB JUMLAH	2.591.444.112.832	2.678.345.592.467	86.901.479.635	
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.350.000.000	2.829.971.900	(520.028.100)	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pendaftaran Penduduk	166.639.000	166.639.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Pencatatan Sipil	166.639.000	166.639.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.665.000	99.665.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	30.335.000	30.335.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	6.628.020.000	6.503.122.000	(124.898.000)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14.527.495.000	14.283.022.800	(244.472.200)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	468.668.000	379.630.000	(89.038.000)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.461.204.938	1.913.368.250	452.163.312	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Pengelolaan Arsip	600.000.000	376.535.000	(223.465.000)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	799.000.000	499.051.000	(299.949.000)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penataan Organisasi	2.749.591.000	2.457.268.000	(292.323.000)	Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	3.300.000.000	3.300.000.000	0	Sekretariat Daerah
	Program Kesejahteraan Rakyat	35.782.601.931	25.594.397.500	(10.188.204.431)	Sekretariat Daerah

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	4.002.227.000	3.436.237.840	(565.989.160)	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	902.415.200	778.682.000	(123.733.200)	Sekretariat Daerah
	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	2.208.868.000	1.708.882.000	(499.986.000)	Sekretariat Daerah
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.141.225.800	826.425.800	(314.800.000)	Sekretariat Daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	229.519.001.500	277.495.681.750	47.976.680.250	Sekretariat DPRD
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7.970.919.500	7.340.952.500	(629.967.000)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.361.502.500	2.217.024.650	(144.477.850)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.994.043.296.417	3.249.695.784.215	255.652.487.798	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.521.223.000	7.471.223.000	(1.050.000.000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	23.581.790.480	24.962.779.230	1.380.988.750	Badan Pendapatan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	8.698.400.000	9.017.906.500	319.506.500	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.147.422.500	17.632.079.100	(3.515.343.400)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.735.329.000	1.625.615.500	(109.713.500)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Pelayanan Penghubung	1.044.386.830	931.793.555	(112.593.275)	Badan Penghubung
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.381.913.000	5.654.268.500	(1.727.644.500)	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.493.964.000	1.446.786.750	(47.177.250)	Inspektorat
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.900.000.000	3.117.940.680	217.940.680	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20.748.449.000	20.772.949.000	24.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	375.000.000	375.000.000	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	650.000.000	850.000.000	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	24.190.024.000	25.001.570.000	811.546.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	SUB JUMLAH	3.434.747.216.596	3.720.959.227.020	286.212.010.424	
	JUMLAH	7.927.768.314.589	8.119.499.934.564	191.731.619.975	

Tabel 5.4
Perubahan Rencana Kerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022 berdasarkan Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	54.666.810.280	54.744.278.280	77.468.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.024.800.000	1.173.669.000	148.869.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	200.000.000	200.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	308.000.000	308.000.000	0	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2.788.251.900	2.443.122.000	(345.129.900)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1.413.112.750	1.240.767.000	(172.345.750)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Pengembangan Umkm	3.991.503.250	3.455.529.220	(535.974.030)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	850.000.000	935.000.000	85.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	2.300.000.000	1.930.000.000	(370.000.000)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	400.000.000	375.000.000	(25.000.000)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.409.114.000	870.654.000	(538.460.000)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	200.000.000	250.000.000	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1.023.700.000	830.096.000	(193.604.000)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	35.470.911.310	31.234.362.310	(4.236.549.000)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.298.081.163	3.123.747.415	(174.333.748)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	259.100.000	164.100.000	(95.000.000)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	663.100.000	616.200.000	(46.900.000)	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	26.003.574.000	21.648.574.000	(4.355.000.000)	Dinas Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	5.500.000.000	3.799.183.000	(1.700.817.000)	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	Dinas Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Intelektual				
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.500.000.000	1.500.000.000	0	Dinas Pariwisata
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	12.606.732.200	12.789.330.162	182.597.962	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.375.816.750	1.900.482.276	(475.334.474)	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.695.309.038	3.051.486.850	1.356.177.812	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	300.000.000	300.000.000	0	Dinas Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	390.000.000	390.000.000	0	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	5.296.383.750	5.292.947.050	(3.436.700)	Dinas Pertanian
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2.052.295.000	1.855.870.500	(196.424.500)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	542.593.000	524.391.000	(18.202.000)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	300.000.000	255.000.000	(45.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	600.000.000	500.000.000	(100.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.200.000.000	1.160.000.000	(40.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	1.300.000.000	1.300.000.000	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Standardisasi Dan	2.700.000.000	2.250.000.000	(450.000.000)	Dinas Perindustrian dan

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Perlindungan Konsumen				Perdagangan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	380.000.000	330.000.000	(50.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.650.000.000	2.570.000.000	(80.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	150.000.000	140.000.000	(10.000.000)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	902.415.200	778.682.000	(123.733.200)	Sekretariat Daerah
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	650.000.000	850.000.000	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	SUB JUMLAH	180.361.603.591	168.080.472.063	(12.281.131.528)	
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Program Pengelolaan Pendidikan	1.638.078.378.813	1.637.125.250.843	(953.127.970)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kurikulum	400.000.000	400.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	81.695.000.000	94.695.000.000	13.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	702.226.271.919	785.370.855.975	83.144.584.056	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	39.484.528.000	28.992.879.000	(10.491.649.000)	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	435.994.000	185.618.750	(250.375.250)	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.215.206.500	2.538.257.500	(676.949.000)	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Sosial	1.599.250.000	2.099.250.000	500.000.000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	75.000.000	75.000.000	0	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	6.483.194.000	8.956.555.500	2.473.361.500	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	52.491.558.500	39.491.558.500	(13.000.000.000)	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	842.240.000	1.842.240.000	1.000.000.000	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	350.500.000	850.500.000	500.000.000	Dinas Sosial
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.713.886.600	4.713.886.600	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	581.100.000	581.100.000	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	1.869.503.000	1.869.503.000	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	716.032.000	716.032.000	0	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2.513.278.000	2.155.551.000	(357.727.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Perlindungan Perempuan	1.313.255.500	1.013.486.500	(299.769.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	2.646.472.000	2.357.448.000	(289.024.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Sistem Data	390.250.000	390.250.000	0	Dinas Pemberdayaan

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Gender Dan Anak				Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	410.568.000	360.568.000	(50.000.000)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Perlindungan Khusus Anak	627.976.500	677.745.500	49.769.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pendaftaran Penduduk	166.639.000	166.639.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pencatatan Sipil	166.639.000	166.639.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.665.000	99.665.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	30.335.000	30.335.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Penataan Desa	725.000.000	685.000.000	(40.000.000)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	340.000.000	340.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	2.165.770.500	2.720.542.500	554.772.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Dan Masyarakat Hukum Adat				
	Program Pengendalian Penduduk	275.000.000	275.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	175.000.000	175.000.000	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	800.000.000	1.413.198.000	613.198.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	6.853.190.000	6.339.050.000	(514.140.000)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	30.861.405.400	43.220.780.499	12.359.375.099	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program Pembinaan Perpustakaan	1.600.338.000	1.145.419.200	(454.918.800)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Kesejahteraan Rakyat	1.150.000.000	1.350.000.000	200.000.000	Sekretariat Daerah
	SUB JUMLAH	2.588.568.425.232	2.675.585.804.867	87.017.379.635	
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	Program Pengembangan Kebudayaan	113.241.600	113.241.600	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.120.000.000	1.120.000.000	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	3.595.724.000	3.679.824.000	84.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Kesejahteraan Rakyat	34.632.601.931	24.244.397.500	(10.388.204.431)	Sekretariat Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.493.964.000	1.446.786.750	(47.177.250)	Inspektorat
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.900.000.000	3.117.940.680	217.940.680	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	20.748.449.000	20.772.949.000	24.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	SUB JUMLAH	64.603.980.531	54.495.139.530	(10.108.841.001)	
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	70.532.735.440	68.384.176.540	(2.148.558.900)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.500.000.000	22.957.007.200	11.457.007.200	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	300.000.000	-	(300.000.000)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.920.000.000	690.000.000	(1.230.000.000)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Bangunan Gedung	406.425.000.000	381.127.588.407	(25.297.411.593)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penataan Bangunan Dan	51.800.000.000	21.475.060.569	(30.324.939.431)	Dinas Perumahan Rakyat

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Lingkungannya			)	dan Kawasan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Jalan	701.420.352.230	589.950.876.178	(111.469.476.052)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	6.270.000.000	5.872.208.500	(397.791.500)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.450.000.000	5.101.200.000	(1.348.800.000)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan	13.400.000.000	13.275.761.800	(124.238.200)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Kawasan Permukiman	56.965.000.000	56.349.139.900	(615.860.100)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	345.250.000.000	340.131.349.500	(5.118.650.500)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.774.117.000	18.407.471.000	(366.646.000)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	900.000.000	860.000.000	(40.000.000)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	398.850.000	398.850.000	0	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	6.628.020.000	6.503.122.000	(124.898.000)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	14.527.495.000	14.283.022.800	(244.472.200)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	13.144.510.000	12.888.337.320	(256.172.680)	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	SUB JUMLAH	1.726.606.079.670	1.558.655.171.714	(167.950.907.956)	
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Program Penanggulangan Bencana	6.356.980.000	5.456.550.000	(900.430.000)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.142.790.000	1.140.478.000	(2.312.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	25.020.000	25.020.000	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	433.600.000	476.730.000	43.130.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	316.800.000	276.800.000	(40.000.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Persampahan	1.827.949.900	1.877.949.900	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Hutan	3.694.924.200	3.541.140.200	(153.784.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	1.238.738.000	1.124.136.000	(114.602.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	416.800.000	286.300.000	(130.500.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	575.180.000	534.840.000	(40.340.000)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Sub Jumlah	16.028.782.100	14.739.944.100	(1.288.838.000)	
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.350.000.000	2.829.971.900	(520.028.100)	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)					
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	948.450.000	794.354.000	(154.096.000)	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	468.668.000	379.630.000	(89.038.000)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.461.204.938	1.913.368.250	452.163.312	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Program Pengelolaan Arsip	600.000.000	376.535.000	(223.465.000)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	799.000.000	499.051.000	(299.949.000)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penataan Organisasi	2.749.591.000	2.457.268.000	(292.323.000)	Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	3.300.000.000	3.300.000.000	0	Sekretariat Daerah
	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	4.002.227.000	3.436.237.840	(565.989.160)	Sekretariat Daerah
	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	2.208.868.000	1.708.882.000	(499.986.000)	Sekretariat Daerah
	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.141.225.800	826.425.800	(314.800.000)	Sekretariat Daerah
	Program Dukungan Pelaksanaan	229.519.001.500	277.495.681.750	47.976.680.250	Sekretariat DPRD

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	Tugas Dan Fungsi Dprd				
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	7.970.919.500	7.340.952.500	(629.967.000)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.361.502.500	2.217.024.650	(144.477.850)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.994.043.296.417	3.249.695.784.215	255.652.487.798	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.521.223.000	7.471.223.000	(1.050.000.000)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	23.581.790.480	24.962.779.230	1.380.988.750	Badan Pendapatan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	8.698.400.000	9.017.906.500	319.506.500	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.147.422.500	17.632.079.100	(3.515.343.400)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.735.329.000	1.625.615.500	(109.713.500)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pelayanan Penghubung	1.044.386.830	931.793.555	(112.593.275)	Badan Penghubung
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.381.913.000	5.654.268.500	(1.727.644.500)	Inspektorat
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	375.000.000	375.000.000	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	24.190.024.000	25.001.570.000	811.546.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	SUB JUMLAH	3.351.599.443.465	3.647.943.402.290	296.343.958.825	

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	PERANGKAT DAERAH
	JUMLAH	7.927.768.314.589	8.119.499.934.564	191.731.619.975	

Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 di atas merupakan Sinkronisasi dari Prioritas Daerah dan Prioritas Nasional dengan Program Daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan masyarakat, sedangkan Kegiatan rutin seperti sebagian besar pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada setiap Perangkat Daerah dijabarkan dalam lampiran.

5.2 Program Pembangunan Daerah

Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan (Perubahan RKPD) tahun 2022, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2022 terdiri dari 179 (seratus tujuh puluh sembilan) program untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan (Perubahan RKPD) tahun 2022 dijabarkan ke dalam 166 program, 537 kegiatan dan 2.225 sub kegiatan, untuk Sub Kegiatan terdapat perubahan jumlah Sub Kegiatan semula 2.223 Sub Kegiatan menjadi 2.226 Sub Kegiatan. Program-program pembangunan tersebut akan dilaksanakan oleh 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Daftar program pembangunan dan pagu indikatif berdasarkan Perangkat Daerah penanggungjawabnya dapat dilihat pada lampiran.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022 dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional serta respon cepat penanganan dampak akibat pandemi COVID-19 yang masih melanda masyarakat Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2022. Kondisi tersebut mempengaruhi keuangan daerah, baik pendapatan, belanja daerah, prioritas, arah kebijakan, fokus pembangunan maupun program dan kegiatan pembangunan.

Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 antara lain memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan arah kebijakan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya.

Dokumen perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2022.

Tentu saja keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Provinsi Banten memerlukan dukungan dan komitmen bersama semua pihak. Diperlukan kerjasama dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat secara luas untuk dapat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi Provinsi Banten seperti sebelum pandemi COVID-19.

Pj. GUBERNUR BANTEN,
ttd

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19670619 199403 1 002